JURNAL
ANALISIS SOSIAL
Vol. 10 No. 2 Oktober 2005

AKATIGA

Menjelajah Gagasan tentang RAKYAT PEKERJA

ISSN 1411-0024

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 10 No. 2 Oktober 2005

Penanggung jawab

Yulia Indrawati Sari

Redaksi

Ika Wahyu
Rini Andrijani

Penyunting Bahasa

Sonya Indriati Sondakh

Penerjemah

Maria Epik Pranasari
Hesti H. Legowo

Penata Letak & Perancang Kulit

Pamuji Slamet

Alamat Penerbit & Redaksi

Jl. Tubagus Ismail II/2, Bandung 40134
Telp. (022) 2502302
Faks. (022) 2535824
E-mail: akatiga@akatiga.or.id
Homepage: www.akatiga.or.id

ISSN 1411-0024
Terbit 3 kali setahun
Sejak 1996

DAFTAR ISI

Menjelajah Gagasan tentang Rakyat Pekerja v

Exploring the Idea of Working People xi

BAHASAN UTAMA

Pekerja Industri Indonesia, Gerakan Buruh, dan *New Social Movement*: Merajut Sebuah Kemungkinan
Nicolaas Warouw 1

"Lapak" Politik Kelas Dalam Sejarah Indonesia? (Sekelumit Persoalan Pengorganisasian Rakyat Pekerja Indonesia)
Willy Aditya 19

Melepas Perbedaan, Menemukan Persatuan Rakyat Pekerja dalam Ancaman Krisis: Analisis Kelas terhadap Dinamika Perjuangan Kelas Buruh dan Rakyat Pekerja
Dominggus Octavianus 39

Perumahan bagi Rakyat Pekerja: Perdebatan, Tantangan, dan Implementasi
Yudi Fajar Margono Wahyu 59

***Ojo Njawil, Ojo Nyaduk*: Hubungan Sosial Buruh dalam Komuniti Rungkut Lor, Surabaya**
Maria Dona & Selly Riawanti 71

DAFTAR ISI

RUANG METODOLOGI

Upaya Memadukan Penelitian dan Praksis Perubahan: Sebuah Refleksi antara Intelektual dan Aktivisme
Ika Wahyu **99**

RESENSI BUKU

Fast Forward: Work, Gender and Protest in a Changing World
Ika Wahyu **109**

Menjelajah Gagasan tentang RAKYAT PEKERJA

Dinamika perubahan situasi perburuhan yang berkaitan dengan *Labour Market Flexibility* (LMF) telah membuat buruh semakin kehilangan posisi tawar. Industri dengan amat mudahnya mendesentralisasi proses produksinya dari pabrik ke komuniti. Fenomena ini tidak hanya terjadi di manufaktur, tetapi juga terjadi di perkebunan. Bahkan fenomena PHK massal juga terjadi di industri-industri ekstraktif. Pindahnya pabrik ke wilayah yang upah buruhnya lebih murah dan buruhnya lebih terkendali pun tidak dapat dielakkan. Dalam konteks ini serikat buruh sedang mengalami proses pelemahan melalui mekanisme restrukturisasi dan reorganisasi produksi. Lemahnya organisasi buruh membuat posisi tawar buruh semakin terjepit. Sistem kerja kontrak, fleksibilitas kerja yang tinggi, dan organisasi yang terbirokratisasi adalah hal-hal yang antara lain menyebabkan sulitnya pembangunan gerakan dan organisasi buruh yang kuat dan kohesif. Salah satu indikasinya adalah jumlah keanggotaan kelas pekerja dalam serikat-serikat pekerja. Data yang ada menunjukkan bahwa *hanya 3%* dari seluruh kelas pekerja Indonesia yang menjadi anggota Serikat Buruh/Pekerja. Keadaan ini semakin menguatkan betapa rendahnya posisi tawar kelas pekerja berhadapan dengan kelas pemilik modal, ketika *hampir 30%* dari angkatan kerja (data Depnakertrans) tidak memperoleh pekerjaan alias menganggur.[1] Sekalipun semua anggota serikat buruh bergerak untuk mengadakan perlawanan, pemilik modal tidak akan kesulitan untuk menyingkirkan 3% pekerja yang "bandel" ini dan menggantikannya dengan orang lain. Masih ada

1 Ken Budha Kusumandaru, 'Krisis Serikat Pekerja', tulisan yang dipublikasikan dalam website PDSO. *www.PDSO.topcities.com*

38 juta orang yang putus asa mencari kerja. Jika ini terjadi, maka para pekerja baru ini akan lebih "jinak" karena mereka pasti takut kehilangan pekerjaan yang telah dengan susah-payah mereka dapatkan. Masalah lain adalah sulitnya menumbuhkan solidaritas antarkelas pekerja. Kondisi ini telah pula memberi sumbangan dalam melemahkan Serikat Buruh/Pekerja Indonesia.

Dalam konteks sejarah, perlawanan dan gerakan buruh mencapai kematangannya karena bergerak dalam koridor yang lebih luas dan membuka diri bagi dukungan dari elemen-elemen masyarakat yang lain. Keterhubungan dan interaksi antara kelas buruh dengan elemen masyarakat miskin dan menengah lainnya pada hakikatnya merupakan wujud dari kehidupan sosial buruh, sehingga kepentingan dan aksi mereka tidak akan efektif bila diperjuangkan secara terpisah dari kepentingan elemen masyarakat miskin lain. Karena buruh tidak hanya terdiri atas mereka yang tergabung dalam serikat buruh, maka dalam konteks inilah terminologi 'rakyat pekerja' lahir. Konsep rakyat pekerja digunakan sebagai alat untuk mengorganisasi para pekerja yang berada dalam sistem produksi subkontrak dan mengorganisasi pekerja yang mengalami fenomena PHK massal di beberapa kawasan industri. Strategi gerakan buruh lama yang mengacu pada pola hubungan industrial dirasakan tidak lagi memadai karena hubungan-hubungan industrial yang terjadi pun telah mengalami perubahan yang pesat. Basis persoalan buruh tidak lagi semata-mata berada di pabrik dan bersifat bipartit antara buruh dan pengusaha di tingkatan lokal, namun sudah meluas dan berkaitan dengan persoalan-persoalan kebijakan di tingkat lokal maupun makro.

Artikel pertama menampilkan **Nicolaas Warouw**, seorang pengajar dan pemerhati masalah perburuhan, yang memberikan kemungkinan akan pengorganisasian buruh menjadi '*new social movement*'. Menurutnya, kondisi-kondisi marginalisasi dan dominasi yang dihasilkan oleh relasi produksi tidak selalu harus direspons dengan perlawanan dan kritisisme seperti yang ditemukan dalam gerakan maupun organisasi perburuhan (tradisional) pada umumnya. Data yang didapatnya dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa gerakan buruh sendiri saat ini masih sulit mentransformasi diri menjadi sebuah gerakan rakyat pekerja yang *solid*. Warouw juga berusaha menunjukkan bahwa isu non-materialisme adalah mungkin dalam realitas buruh industri di Indonesia, setidaknya di Tangerang. Penulis juga memperlihatkan bahwa stigma kemiskinan dan ketidakberdayaan buruh industri dalam kenyataannya

dihindari buruh dengan menciptakan identitas modern dan tingkat konsumsi yang tinggi. Menurutnya, menempatkan negara dan pasar agar bisa sejajar dengan masyarakat dan individu pada saat ini merupakan persoalan yang sulit dan menjadi tantangan bagi gerakan sosial baru (*new social movement).*

Selanjutnya, dari kalangan aktivis, **Willy Aditya** dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) mengajak kita untuk menelusuri kembali pemahaman akan konsep rakyat pekerja dan penempatan politik kelas dalam sejarah Indonesia. Dalam tulisannya ia menyatakan bahwa terpinggirnya kekuatan politik kelas dari dinamika politik nasional sekarang bisa diartikan terjadinya kekosongan secara vertikal dan horisontal antara gerakan politik yang berkembang dengan rakyat pekerja Indonesia. Penulis melihat bahwa praktik pengorganisasian rakyat pekerja di Indonesia 20 tahun terakhir bergerak tidak pada tujuan bagaimana merebut kekuasaan. Pemahaman tentang *civil society* dihadapkan dengan *political society* sehingga membuat kesadaran yang seolah-olah anti *state.* Perjuangan politik menjadi ditabukan dan lebih memilih perjuangan ekonomi. Akibatnya, terlihat bahwa isu buruh hanya diusung kaum buruh sementara isu politis lainnya cenderung dihindari oleh serikat buruh.

Dengan menggunakan perspektif kelas, **Dominggus Octavianus** mencoba menguraikan persoalan-persoalan yang selama ini menghambat persatuan di antara buruh sendiri. Dengan perspektif kelas, penulis melihat bahwa selama ini perbedaan yang ada di kalangan buruh atau rakyat miskin umumnya bukanlah perbedaan yang fundamental. Ia melihat bahwa ada kesamaan kepentingan yang dapat ditemukan dalam strata sosial ini untuk menjalankan suatu perjuangan bersama, terutama sebagai kesatuan identitas yang disebut rakyat pekerja. Melepas perbedaan dan menemukan persatuan merupakan hal yang harus dilakukan oleh kaum buruh dan rakyat pekerja pada umumnya. Penulis menyatakan bahwa persatuan dan pembaruan ke dalam komunitas merupakan salah satu langkah politik untuk menguatkan posisi kelas buruh, sekaligus memberikan dan mendapatkan dukungan dalam perjuangan pada lingkup yang lebih khusus.

Selama ini isu normatiflah yang menjadi isu serikat buruh. Bahkan isu mengenai tuntutan upah setiap tahun selalu menjadi agenda nasional dari serikat buruh. **Yudi Fajar Margono Wahyu** mencoba menawarkan perspektif lain yaitu isu perumahan. Menurut Yudi, perumahan mnerupakan isu yang seharusnya

diperjuangkan serikat buruh kerena produktivitas buruh amat ditentukan oleh tempatnya saat kembali seusai bekerja. Proses reproduksi (biologis maupun sosial) tidak dapat dipisahkan dari aktivitas produksi formal karena kedua ruang tersebut akan saling berpengaruh. Penulis ingin memperlihatkan bahwa ada ruang yang belum dimanfaatkan serikat buruh dan rakyat pekerja di Indonesia. Pengadaan perumahan bagi buruh mempunyai dua dampak yaitu sebagai tempat reproduksi tenaga kerja dan pembangunan komunitas. Kerja sama antara buruh dengan rakyat pekerja diperlukan untuk menghadapi struktur pembagian kerja yang semakin fleksibel (kepentingan modal) dan menyatukan kepentingan (melalui tuntutan fasilitas konsumsi kolektif) kepada pemerintah daerah/pusat. Perdebatan antara tuntutan kenaikan upah dan hidup layak menjadi pilihan-pilihan yang harus direnungkan dan didiskusikan bersama.

Memang benar bahwa buruh hanya menghabiskan sebagian waktunya di pabrik. Waktu selebihnya dihabiskan di lingkungan tempat tinggal untuk reproduksi (bagi buruh berkeluarga) dan aktivitas kesehariannya sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, menarik untuk melihat bagaimana dinamika kehidupan buruh di luar pabrik. **Maria Dona** dan **Selly Riawanti** menuliskannya dengan melihat bahwa buruh di komuniti memiliki beragam identitas. Identitas buruh di kota yang *notabene* adalah pendatang memunculkan jurang antara mereka dengan warga komuniti lainnya yang merupakan warga asli wilayah yang didiami buruh. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa ada banyak identitas yang memunculkan kesadaran kelas baik di pabrik maupun di komuniti. 'Bendera organisasi' seperti yang diperlihatkan oleh serikat buruh bukan bentuk akhir kesadaran kelas dan jawaban atas persoalan buruh. Penulis mencoba mempertanyakan, jika gagasan pengorganisasian menggunakan pengertian 'rakyat pekerja', apakah strategis jika kejamakan identitas tersebut kemudian dibuat menjadi tunggal dengan sebutan 'rakyat pekerja'?

Dalam ruang metodologi, **Ika Wahyu** mencoba merefleksikan masalah metodologi yang digunakan peneliti dan kalangan aktivis. Tulisan ini berangkat dari pengalaman di lapangan, baik di kalangan akademis maupun di kalangan aktivis. Kontradiksi pandangan mengenai cara suatu masyarakat berubah menjadi perdebatan di antara kalangan aktivis dan LSM. Penulis memandang bahwa hubungan antara peneliti dan aktivis gerakan sosial seharusnya diusahakan untuk — *meminjam istilah Gramsci* — 'diberi kerangka kembali'

(*reframe*) pada kenyataan sosial yang kompleks dan melihat perbedaan sebagai ketegangan yang perlu ditangani ketimbang diabaikan. Sama halnya dengan tulisan sebelumnya, selayaknya peneliti dan aktivis melepas perbedaan dan menemukan kesamaan bagaimana memberdayakan kaum marginal dengan caranya masing-masing.

Resensi buku berjudul ***Fast Forward: Work, Gender and Protest in A Changing World*****,** karya Dickinson dkk. ini menguraikan persoalan kerja dan maknanya dalam dunia yang terus berubah. Buku ini penting untuk dibaca dan dibahas dalam rangka memahami gerakan sosial. Karena buku ini digunakan untuk memahami gerakan sosial, sangatlah penting untuk memahami perubahan kerja dan konteks kultural di mana gerakan sosial itu terjadi. Meluasnya gerakan buruh menjadi gerakan perempuan, gerakan mencari keadilan, dan gerakan demokrasi telah membuka ruang protes yang luas dan melibatkan banyak institusi lain di luar serikat buruh. Dalam konteks ke-Indonesiaan, membaca buku ini membuat kita bisa melihat lagi akan peran negara dan kondisi pekerja informal kita.

★★★

Selebihnya, menjadi renungan kita bersama apakah pengorganisasian buruh *an sich* (dalam pengertian lama) masih diperlukan di tengah dunia yang berubah. Ketika hidup buruh tidak lagi terbatas pada kegiatan organisasinya, di mana peran serikat buruh bisa masuk dalam salah satu ruang hidup buruh? Persoalan akankah gerakan buruh bisa meluas dan menjadi sebuah gerakan sosial bersama merupakan pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama. Semoga kajian yang disajikan kali ini bisa menggugah pemikiran dan wacana yang lebih luas mengenai persoalan perburuhan dan pemberdayaan buruh.

[Redaksi]

★★★

EXPLORING THE IDEA OF WORKING PEOPLE

The contemporary change in labor condition as a result of *Labor Market Flexibility* (LMF) has been the ever weakening bargaining position of workers. The industry sector is left unchecked when it chooses to shove production processes from factories to communities, a phenomenon pervasive not only in the manufacture sector, but also in the plantation sector. Even the extractive industries make massive lay-off a good choice. Relocation to areas where wage level is considered lower and workers can be effortlessly controlled is unavoidable. This is the context for the weakening bargaining position of workers, a grave impact of restructuring and reorganizing mechanisms in production.

Poor organizing is a cause to the declining bargaining position, but the contract-based employment, the high labor flexibility, and the bureaucratized fashion of organizations are among the factors obstructing the development of strong workers organizations, and thus cohesive and empowered workers movement. The existing data shows that only 3% of all workers nationwide are unionized, which somehow reflects the seriously shaky bargaining position against employers, considering that nearly 30% of the work force (data from Department of labor and transmigration) are desperate for jobs.[1] Even when all unions were determined to struggle for their rights, employers would hardly find it problematic to shovel out the "rebellious" three percent, and bring in new

1 Ken Budha Kusumandaru, "Krisis Serikat Pekerja", available at *www.PDSO.topcities.com*

people into their places. For job security, the "new people" would be the tamed ones. Poor solidarity among members of the working class also a significant factor to the weakening of unions in Indonesia.

History has taught that workers movement and struggle reach maturity only if it chooses to move forward through a broader corridor and reaches out to, in order to gain support from, other elements of the society. Linkage and interaction with the poor and middle classes are by nature the manifestation of the social sphere of workers, hence workers need to align their interests with those of other elements of the society. Otherwise, any workers movement is ineffective and is bound to failure. As the vast majority of workers are not unionized, a terminology is proposed here, "working people", as a means to organize those working under the subcontracting system as well as those suffering from massive lay-off in several industrial zones. Old strategies that gain significance due to emphasis on industrial relations may have lost effectiveness, as industrial relations have changed remarkably. Focus of labor problems has broadened from merely bipartite relations between workers and employers in the factory to include a network of policy issues at both micro and macro levels.

The first article by **Nicolaas Warouw**, a lecturer and labor observer, looks into the possibility of organizing workers towards a "new social movement". He argues that domination and marginalization stemming from productive relations need not necessarily be responded to with opposition and criticism, which normally employed by the traditional workers organization and movement. His research reveals that workers movement has not transformed itself into a solid working people movement. He tries to show that non-materialism is possible in the Indonesian context, at least in the case of Tangerang. He observes that workers always attempt to defy the stigma of poverty and powerlessness through adoption of modern identity with high rate of consumption. He finally maintains that the delicate challenge to the new social movement is the problem of balancing the state and market powers with society and individuals.

Activist **Willy Aditya** from Perhimpunan Rakyat pekerja (PRP) traces back the concept of working people and its use in class politics in Indonesian history. He argues that the marginalization of class forces and politics from the national politics may amount to both horizontal and vertical gap between the current political movement and working people in Indonesia. He observes that the

organizing of working people in the last twenty years did not aim at power grabbing. The opposition between civil society and political society led to anti-state consciousness, in which political struggle was a taboo and hence economic struggle became the sole choice. As a consequence, workers chose to focus on labor issues alone, while unions avoid political issues.

From class perspective, **Dominggus Octavianus** brings up problems that have been obstructing the unity of workers. He maintains that the existing divergence, either perceived or real, between workers and the poor are not in any way fundamental. Instead, both categories share the same identity as working people, thus the same interests that may lead them into joint struggle. Leaving out differences is the first step both workers and working people should take in order to unite. He argues further that unity and internal reform within both categories are political in nature which will enable workers to strengthen their position as well as to support and to gain support for their struggle in a broader scope.

Though normative issues are the main preoccupation of unions, the yearly national agenda for workers seem to be limited to wage level. **Yudi Fajar Margono Wahyu** proposes that housing be put into the priority list of issues in the national agenda. The argument is that the place to rest after the working day, thus housing, is also a determining factor of worker productivity. Reproduction processes, both biological and social, are inseparable from production activities, as both affect each other. Provision of housing for workers will yield multiple fruits in relation to reproduction for workers and community building among workers. Cooperation between workers and the working people is necessary to align interests through collective demand for facilities (made to the central/regional governments) and to jointly struggle against the increasingly flexible structure of labor division (the interest of the capital).

It is true that workers spend larger part of their time outside the factory, that is in their community, for reproduction (workers with families) and for daily activities as ordinary members of the community. It is necessary, therefore, to have a look into daily life of workers outside factory. **Maria Dona** and **Selly Riawanti** observes that workers may preserve different identity in the community. Workers coming from different communities (non-local) tend to distance themselves from the community they live. The various identities of workers may

contribute to class consciousness for better or for worse. "Organization flag" associated with unions is not the final form of class consciousness, neither is it the final answer. They ask, if organizing is to be carried out based on the concept of working people, will it be strategically effective, considering that the varied identities of workers are to be put under a single notion of "working people"?

Ika Wahyu, in methodology rubric, reflects on methodologies employed by academic researchers and activist researchers, taking field experiences as the starting point. She observes that conflicting views on how social change takes place has long ignited fierce debate among social movement and NGO activists and proposes that the relations between social researchers and activists need to be reframed, in Gramscian notion of it, in line with the complex social reality, determining to handle, rather than neglect, differences. In other words, researchers and activists should pay more attention to find out points of convergence, instead of differences, in the ways they have chosen to use in empowering the marginalized.

Review of **Fast Forward: Work, Gender and Protest in a Changing World** by Dickinson et al., looks into the problem of labor and its meaning in an ever changing world. The book is worth reading and discussing in order to comprehend the contemporary social movement, necessarily put into account changes in labor and the cultural context of the social movement. As labor movement extends to gender movement, justice movement, and democratization movement, rooms for protest widens to incorporate more institutions outside unions. In the Indonesian context, this book enables us to see the state's role and the condition of the informal sector.

It is left to all of us to ruminate on how far the traditional ways of workers organizing is still necessary in this changing world. When the life of workers is no longer limited to their organization activities, at which point should unions be considered a part of their lives? Whether or not labor movement will transform into a joint social movement is also worth reflection. Hopefully, ideas that the articles poses could initiate deeper thinking and wider discourse on labor issues and empowerment.

[Editor]

★★★

PEKERJA INDUSTRI INDONESIA, GERAKAN BURUH, DAN *NEW SOCIAL MOVEMENT*: MERAJUT SEBUAH KEMUNGKINAN

Nicolaas Warouw [1]

Abstract

The resignation of the Soeharto's regime in 1998 once built up the optimism towards the future of the labor movement in Indonesia. The new regime post Soeharto's finally has to adopt the ILO convention no.87 which admits the rights of labors to involve themselves in organizations, despite the government's political maneuver in order to create the impression of being reformist, and in order to interest international donation. Whatever the controversy is like, such a decision has become the principal breakthrough for the contemporary labor movement of Indonesia.

Bagi sebagian aktivis dan akademisi yang menaruh minat pada isu perburuhan dan perjuangan pekerja, terutama pekerja dari sektor industri manufaktur, kejatuhan rezim otoritarian Soeharto pada 1998 sempat membangkitkan optimisme terhadap masa depan gerakan buruh di Indonesia. Tradisi-tradisi radikal pada sekitar paruh pertama tahun 1990-an berupa aksi kolektif dan keterlibatan buruh dalam organisasi-organisasi perburuhan untuk menghadapi kepentingan kapital dan negara (Ford, 2000; Hadiz, 1997; Kammen, 1997) setidaknya dapat dilihat sebagai alasan bagi optimisme ini. Vedi Hadiz (1997) bahkan secara spesifik melihat bahwa radikalisme pada periode ini adalah gejala bagi kebangkitan kembali gerakan kelas pekerja di bawah Orde Baru yang

1 Staf Pengajar pada Universitas Sanata Dharma & Universitas Gajah Mada

ditandai dengan kemampuannya untuk mengusik stabilitas politik yang diciptakan rezim otoritarian di bawah Soeharto. Dengan tradisi radikal, ini serta sejumlah catatan tentang pengorganisasian, seharusnya, tidaklah berlebihan untuk melihat bahwa gerakan kelas pekerja akan terus bergulir layaknya bola salju seiring dengan merenggangnya represi politik – sekalipun tidak hilang sama sekali – pada tahun-tahun menjelang berakhirnya abad ke-20.

Destabilisasi kekuasaan Soeharto yang diakibatkan krisis moneter yang melanda sebagian Asia (Hill, 1998) memungkinkan komitmen Orde Baru terhadap kebijakan yang secara *de facto* hanya memungkinkan buruh direpresentasikan oleh satu kendaraan organisasional menemukan kerikil-kerikil penghambat (Ford, 2000). Rezim penguasa baru pasca-Soeharto akhirnya harus mengadopsi Konvensi ILO No.87 yang mengakui hak buruh untuk berorganisasi, sekalipun hal ini tidak lebih dari sebuah manuver politik untuk 'menciptakan kesan reformis' (Hadiz, 2001:122) dan demi memikat 'donor internasional' (Ford, 2000:5). Apa pun kontroversinya, keputusan ini menjadi tonggak penting bagi gerakan buruh Indonesia kontemporer. Michele Ford (2001:109-110), misalnya, mencatat kelahiran dan revitalisasi sejumlah serikat pekerja yang beroperasi baik pada tingkat nasional maupun lokal dalam konteks Indonesia pasca-otoritarian. Setidaknya empat partai politik yang mengusung kata "buruh" atau "pekerja" (Leclerc, 1972; Ford, 2003: 187; Hadiz, 1997:53-4; 212-213) dapat mengikuti Pemilihan Umum 1999 sekalipun gagal dalam memperoleh suara secara signifikan, apalagi memenangkan kursi di parlemen (Ford, 2003). Di luar organisasi formal buruh seperti partai politik dan serikat pekerja, peluang pengorganisasian juga terbuka bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) perburuhan yang menurut Ford (2003:113) secara faktual 'mendominasi gerakan buruh' secara umum pada senjakala kekuasaan Orde Baru. Mereka ini melanjutkan partisipasi aktifnya pada periode pasca-Soeharto dengan menjadi inisiator bagi pembentukan organisasi-organisasi buruh formal pada berbagai tingkatan.

Himpitan ekonomi terhadap kelas pekerja industri manufaktur yang datang silih berganti sejak krisis politik pada 1997-1998 menciptakan pula momentum lain untuk melandasi optimisme akan kematangan serta soliditas gerakan buruh Indonesia. Berbagai persoalan klasik yang dialami buruh industri pada awal dan

pertengahan tahun 1990-an berkaitan dengan kondisi kerja dan marginalisasi tidak serta-merta menemukan jawabannya hingga permulaan abad ke-21. Tuntutan kenaikan upah buruh agar layak dengan kondisi ekonomi pada umumnya — termasuk di dalamnya tingkat inflasi, kesesuaian dengan indikator-indikator hidup yang memadai, dan kenaikan konstan harga bahan bakar minyak — merupakan motor penggerak yang tetap ada untuk menghidupkan gerakan buruh, seperti yang dijumpai pada dekade sebelumnya. Intensitas pemogokan industrial tetap tinggi hingga mendekati angka-angka menjelang krisis pada 1997 (terutama antara 1994-1996) dan media massa hampir tiada hentinya melaporkan aksi-aksi buruh di berbagai kantong industrial hingga hari ini.

Namun demikian, optimisme yang berangkat dari kondisi-kondisi objektif ini tidak dapat disangkal masih belum menjelma menjadi sebuah realitas seutuhnya seperti yang dibayangkan para aktivis dan akademisi yang berpihak pada perbaikan nasib buruh Indonesia. Bahkan Hadiz (1997) yang pernah menyemai apresiasi dan keyakinan akan gerakan buruh Indonesia di bawah rezim represif Soeharto dalam karya pentingnya tentang buruh Indonesia dalam negara Orde Baru harus melihat kenyataan lain. Dalam artikelnya yang lain yang mencoba mengevaluasi gerakan buruh pasca-krisis dan pasca-reformasi, ia mengakui bahwa iklim perubahan politik kontemporer hanya memungkinkan 'proliferasi' serikat pekerja dan organisasi perburuhan ketimbang 'konsolidasi' dan 'unionisme yang efektif.' Dalam sebuah studi empiris di sebuah kawasan industrial di Kotamadya Tangerang, penulis menemukan bahwa kondisi-kondisi subyektif dalam gerakan buruh masih belum sepenuhnya siap mentransformasikan dirinya menjadi sebuah instrumen kelas pekerja yang solid (Warouw, 2004). Status pekerja dalam organisasi-organisasi perburuhan di tingkat lokal, apalagi nasional, yang masih bersifat periferal — sebatas pada hubungan dalam bentuk pemotongan gaji untuk iuran serikat pekerja di tempat kerja — menegaskan pernyataan Hadiz di atas tentang problema 'konsolidasi' dalam organisasi-organisasi kelas pekerja. Ini belum termasuk keluhan para buruh atas kegagalan serikat pekerja, yang kerap dibahasakan oleh pekerja sebagai ”orang-orang dari Jakarta,” untuk merepresentasikan aspirasi-aspirasi yang berkibar di tingkatan akar rumput.

Bagaimana kondisi empiris yang dialami buruh Indonesia pada hari-hari ini serta bagaimana realitas tersebut menciptakan pintu masuk bagi berkembangnya wacana *new social movement* akan dibahas penulis pada bagian berikut ini.

Sebuah Cerita dari Satu Kantong Industri

Suatu siang tahun 2001 di sebuah pabrik penghasil ban mobil, sepeda motor, dan sepeda di Tangerang. Hari itu adalah hari gajian. Arief (22 tahun, bukan nama sebenarnya) meninggalkan antrian panjang pekerja yang menunggu giliran menerima pembayaran atas kerja mereka sebulan. Dengan penat masih menggantung setelah bekerja sepanjang pagi, Arief nampak sumringah dengan upah bulanannya yang sebesar Rp 529,500. Saat yang sama, ia pun sadar bahwa jumlah itu hanyalah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya di tengah kondisi ekonomi yang sulit pada masa itu. Namun, dalam perjalanan pulang ke kamar kontrakannya, benaknya terisi lebih dari sekadar kalkulasi matematis tentang bagaimana upahnya mencukupi pengeluarannya sehari-hari.

Sorenya, Arief terlihat mengusung sebuah kotak kardus berisi sebuah pesawat televisi (teve) *anyar* yang baru dibelinya di pasar dekat perkampungan buruh tempat ia tinggal. Segera setelah pesawat teve itu di*set* dan ditata di tengah kamar yang berukuran 3x3 meter, beberapa tetangga kamar di kompleks kontrakan itu datang untuk ikut menikmati perangkat baru milik Arief. Kualitas gambarnya tidaklah terlalu jernih, namun memadai bagi penontonnya yang duduk di atas lantai dingin hingga larut malam. Keesokan siangnya, Arief membawa sebatang bambu panjang ke kontrakannya untuk dipasangkan antena teve yang baru dibelinya selepas kerja *shift* siang di pabriknya. Setelah beberapa saat mengatur posisi antena, dengan dibantu seorang teman, Arief nampak puas dengan kualitas gambar pada teve barunya dan lega karena ia tidak perlu lagi mendatangi tetangga kontrakannya untuk menikmati hiburan segar dari saluran-saluran teve nasional.

Beberapa bulan ke depan, Arief kembali menambah pemilikan barang 'mewah'nya dengan sebuah pemutar CD/VCD, dua perangkat pengeras suara (*loudspeaker*), dan sebuah sepeda gunung. Kesemuanya dibeli dari uang hasil kerja kerasnya sebagai pekerja pabrik. Dan Arief hanyalah salah satu dari ratusan bahkan ribuan pekerja pabrik di perkampungan buruh itu dengan kepemilikan barang konsumtif yang senantiasa bertambah begitu tanggal muda tiba.

Ilustrasi di atas dikutip dari catatan lapangan penulis saat melakukan penelitian etnografis di kawasan yang dimaksud pada kurun 2000-2002. Menjamurnya insidensi kepemilikan barang konsumtif sebagai simbol modernitas dan kemajuan mungkin menggambarkan tahapan-tahapan akhir dari garis unilinear Rostowian mengenai perkembangan pembangunan ekonomi yang seolah menjadi keharusan bagi bangsa dunia berkembang sebagai syarat bagi kesejajarannya dengan bangsa yang telah terindustrialisasi (Todaro, 1982). Beberapa kata kunci dari paradigma tersebut adalah industrialisasi, *high consumption*, dan *leisure time*, nampak sesuai dengan impresi sepintas dari narasi di atas. Namun, sebuah realisasi penuh atas modernitas seperti diindikasikan dalam fase tinggal landas (*take-off*), atau bahkan pada tahap *high mass consumption*, mungkin juga hanya menjadi cermin obskura dari realitas keseharian di perkampungan-perkampungan pekerja industri di Tangerang. Adalah ironis bahwa pola konsumsi dan gaya hidup seperti ini menjadi keseharian mereka yang masih tinggal di kawasan yang air bersihnya masih menjadi persoalan sehari-hari dan tipikal kampung kumuh merupakan pengalaman keseharian. Lebih jauh, para pekerja industri masih harus bekerja keras demi Rp.16.000,00 perhari (sesuai dengan pagu upah masa itu) atau lembur untuk bayaran lebih. Sebuah premis mengenai sedikit kerja untuk *leisure time* yang lebih jelas tidak berlaku di sini.

Identitas Modern dan Penegasan Diri Kelompok Marginal

Ilustrasi di atas mengekspresikan 'apa artinya menjadi manusia modern, menjadi orang kota, menjadi berbeda dari eksistensi kedesaan yang (dianggap) tidak modern,' sesuai dengan pandangan subjek-subjek lokal. Praktik budaya dan ekspresi seperti ini oleh Joel Kahn (2001:17) disebut sebagai 'modernisme,' yakni cara khusus untuk memahami modernitas. Di samping itu, oleh karena modernisme berkembang sesuai dengan ciri lokal, akan terdapat bentuk jamak modernisme.

Praktik modernisme di atas mengindikasikan upaya pekerja industri untuk menolak konsekuensi industrialisasi yang mengalienasi mereka. Problema alienasi yang disuarakan buruh dalam ekspresi ini tidak sepenuhnya dikaitkan dengan eksistensi mereka dalam hubungan produksi, seperti yang diisyaratkan Karl Marx (1977).

Bagi buruh migran di Tangerang, respons kreatif atas kehidupan modern baru akan nampak saat jagad (*universe*) mereka ditarik ke luar dinding pabrik, merambah wilayah-wilayah non-produksi. Dalam *setting* non-produksi inilah, modernisme tidak semata menjadi kritik terhadap industrialisasi, namun juga terhadap ketidakadilan (*inequality*) dalam masyarakat secara luas. Dalam ranah di luar pabrik inilah tercipta banyak arena modernitas yang menciptakan diskursus tempat kaum marginal menegaskan dan mendefinisikan sendiri dirinya, bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan dominan.

Konsumsi komoditas yang dikaitkan dengan gaya hidup (modern) menjadi ekspresi kelas yang menantang stigma kemiskinan dan ketidakberdayaan buruh industri. Dengan demikian, kualitas kehidupan material yang dialami pekerja industri saat ini mengindikasikan usaha subaltern untuk menempatkan dirinya kurang lebih sejajar dengan kelas-kelas sosial perkotaan lainnya yang menikmati buah pembangunan. Konsumsi juga menjadi ranah tempat kaum marginal mencari jalan keluar dari tekanan dan pengalaman traumatis di lantai produksi. Modernisme seperti dipahami para pekerja ini menjadi realitas keseharian perkotaan di mana mereka dapat mengklaim pengambilalihan (*appropriation*) gaya hidup modern dan modernitas perkotaan. Tidak jadi masalah lama jam kerja dan keringat adalah harganya. Konsumerisme pada mereka menjadi representasi penolakan atas persepsi umum masyarakat bahwa menjadi 'buruh pabrik' identik dengan kemiskinan dan kepapaan.

New Social Movement: Sebuah Ringkasan

New Social Movement (NSM) sesungguhnya merupakan sebuah bentuk pemaknaan baru atas aksi kolekif dengan mencoba memperhatikan aspek sosiokultural lebih daripada faktor sosiopolitis dalam gerakan sosial (Touraine, 1985:780). NSM sebagai bentuk aksi kolektif (*collective action*) maupun sebagai suatu bangunan teori sebenarnya merupakan gejala yang sangat khas dalam masyarakat industrial di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal ini ditandai dengan kemunculan gerakan-gerakan sosial berskala luas pada dekade 1960-an dan 1970-an yang merespons gejala menguatnya negara, yang bersamaan dengan ekspansi pasar, menjadi dua kekuatan dominan dalam melakukan penetrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan

warga negara. Kemampuan negara dan pasar untuk mengatur secara sistematis ini menjadikan masyarakat sipil (*civil society*) kehilangan ruang sosialnya.

Gerakan sosial, dalam perspektif NSM, merupakan perjuangan dalam merebut kendali atas produksi makna — bukan barang — dan pembentukan identitas-identitas kolektif baru yang diorganisasikan kembali dalam sebuah masyarakat sipil pasca-industrial. NSM, baik sebagai teori maupun praktik aksi, berangkat dari keyakinan bahwa baik kekuasaan dan resistensi tersebar di mana-mana dan, karenanya, terdesentralisasi. Berbeda dengan gerakan sosial sebelumnya, yang dapat disebut sebagai *old social movement*, seperti banyak dijumpai pada gerakan buruh, NSM tidak membatasi dirinya pada pencapaian material dan perjuangan redistributif secara ekonomis. Dengan demikian, isu mengenai peningkatan upah buruh, ketidakadilan ekonomi, dan eksploitasi kelas menjadi sekunder. Lebih jauh, NSM tidak melibatkan dirinya dalam pergulatan ideologis seputar persoalan anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas (Singh, 2001:96). Oleh sebab itu, gagasan mengenai revolusi dan perjuangan revolusioner demi penggulingan kekuasaan negara bukan menjadi perhatian utamanya.

Realitas pasca-industrial di mana diferensiasi sosial menjadi sedemikian kompleks telah membuat identitas sosial tidak lagi dapat dilihat sebagai hasil atau konsekuensi logis dari relasi produksi dan refleksi mekanis dari kepentingan ekonomi. Itulah sebabnya Alain Touraine (1985: 777) menyebut bahwa NSM seharusnya dilihat dalam kaitannya dengan konsepsi tentang bentuk representasi baru dalam masyarakat yang ditandai dengan keberagaman. Dalam kerangka ini maka konflik dan gerakan sosial tidak dapat lagi dipahami semata dalam perspektif kelas yang ditentukan oleh kondisi ekonomi. Secara tradisional, aksi-aksi kolektif dalam pusaran NSM dikaitkan dengan isu, di antaranya, ekologi, feminisme, perdamaian, regionalisme, dan identitas etnis yang secara umum lebih berorientasi pada nilai-nilai humanis, kultural, dan non-materialistis (Inglehart, 1971; Abramson dan Inglehart, 1986). Tidaklah mengherankan bahwa dalam beberapa hal, NSM terinspirasi oleh nilai dan kebudayaan tradisional. Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai "tradisionalisme kritis" (Nandy, 1987). Menguatnya wacana-wacana anti-sistemik ini mengindikasikan

sinyalemen Alain Touraine (1984) bahwa dalam masyarakat pasca-industrial terdapat kecenderungan pemisahan antara struktur sosial — termasuk pula ekonomi dan politik — dan budaya. Hubungan antara struktur, terutama ekonomi, dengan bidang-bidang kehidupan lainnya tidak lagi semata merupakan hubungan antara bangunan bawah dan bangunan atas dalam konsepsi Marxian. Ini sekaligus mentransendensikan dimensi kelas dan membongkar selubung kondisi-kondisi material dan ekonomi dalam mobilisasi-mobilisasi NSM pada tingkatan akar-rumput. Para aktor dalam aksi-aksi kolektif menegaskan keterlibatan mereka di dalam gerakan sebagai manusia secara utuh dan bukan lagi sebagai pihak yang diasosiasikan semata pada aktivitas ekonomi dan kerja produksi (Singh, 2001:114). NSM merupakan gerakan sosial yang aspek kualitasnya menjadi lebih dominan daripada faktor kuantitas (Habermas, 1981; Offe, 1985). Dengan demikian, alih-alih mencerminkan kepentingan satu kelas tertentu seperti dalam gerakan-gerakan sosial sebelumnya, NSM sebagai praktik aktivisme ditujukan lebih untuk membela nilai-nilai dasar kemanusiaan serta perjuangan bagi kondisi-kondisi kehidupan yang lebih baik (Singh, 2001:96).

Secara konseptual NSM menolak preposisi Marxis mengenai keutamaan sistem produksi dan perjuangan berbasis kelas sebagai motor perubahan sosial. Berangkat dari asumsi mengenai kegagalan Marxisme dalam merealisasikan pembebasan dan emansipasi, teori NSM melihat dua kecenderungan reduksionis dari Marxisme sebagai penyebabnya (Laclau dan Mouffe, 1985:76). Pertama adalah reduksionisme ekonomi yang beranggapan bahwa sebuah formasi sosial beserta proses politis dan ideologisnya merupakan turunan (hanya) dari logika ekonomi. Kedua adalah reduksionisme kelas yang meyakini bahwa identitas para agen sosial ada terutama karena posisi kelas mereka sehingga aktor-aktor sosial secara fundamental adalah aktor kelas dan identitas mereka merupakan cerminan dari kepentingan kelas (Poulantzas, 1973:27; Wright, 1979:61). Dengan demikian, semua bentuk perjuangan merupakan perjuangan berbasiskan kelas dan segala bentuk pengelompokan manusia adalah pengelompokan berdasarkan kelas. Permasalahannya adalah bahwa berbagai gerakan sosial kontemporer yang berkaitan dengan isu anti-rasisme, perlucutan senjata, diskriminasi gender, lingkungan, dan hak asasi manusia berada di luar paradigma kelas dan mengabaikan konsepsi

materialistik dan determinisme ekonomi Marxian. Hal ini sekaligus memberikan penegasan tentang runtuhnya paradigma kelas sebagai model eksplanatoris dalam gerakan sosial.

Oleh karena identitas aktor dalam aksi kolektif tidak lagi terbentuk berdasarkan latar belakang kelas, NSM secara umum mengabaikan model pengorganisasian serikat buruh oleh pekerja industri maupun model partai politik dalam sistem demokrasi representatif, yang oleh NSM dianggap konvensional (Gorz, 1982). Kedua model ini merupakan pengejawantahan yang khas dari representasi modernis yang menganggap bahwa masyarakat kontemporer — yang modern dan industrial — merupakan hasil dari representasi kapitalisme, industrialisme, dan dominasi peradaban Barat. Alternatif terhadap kedua model 'usang' ini adalah politik dan aksi pada tingkatan akar rumput dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil yang terfokus pada isu-isu lokal. Atas kesadaran untuk menghindari bentuk-bentuk representasi pada tingkatan makro dan elite inilah, NSM mengarahkan ranah sosialnya pada masyarakat sipil (*civil society*) dengan mengangkat persoalan-persoalan mengenai 'demoralisasi struktur kehidupan keseharian' (Cohen, 1985:667). Kemerosotan ini menjadi manifes sejalan dengan menguatnya kemampuan negara bersama dengan ekspansi pasar untuk mengatur kehidupan warganya. Pada tataran ini masyarakat kehilangan otonominya berhadapan dengan kekuatan negara dan pasar. Dalam kerentanan inilah maka NSM mengangkat isu mengenai 'pembelaan diri' (*self-defense*) (Singh, 2001:99) masyarakat terhadap kontrol sosial yang dilakukan keduanya. Menguatnya kekuasaan negara dan pasar telah menggerogoti otonomi dan kebebasan manusia untuk mengontrol dirinya, memiliki tubuhnya sendiri, dan menafsirkan sendiri apa yang baik bagi diri dan masyarakatnya sendiri. Gejala ini oleh Jurgen Habermas (1981:35) disebut sebagai '*colonization of life-world*', di mana kehidupan privat manusia telah menjadi objek bagi kontrol negara dan modal.

Kesadaran terhadap kemerosotan ini kemudian menjadi pijakan bagi para aktor lintas-kelas dalam gerakan sosial ini untuk memperjuangkan otonomi, keragaman, serta hak untuk memiliki corak eksistensi yang berbeda (Cohen, 1985:669; Frank dan Fuentes, 1987:155-6). NSM, oleh karenanya, menjadi sebuah inisiatif masyarakat dan individu untuk memulihkan kembali otoritas atas dirinya yang sebelumnya telah sedemikian

dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh sistem (Habermas, 1981). Perjuangan pada tingkatan akar rumput termasuk pula inisiatif untuk menempatkan masyarakat (*society*) sejajar dengan negara dan ekonomi**.** Dimasukkannya masyarakat dalam relasi-relasi ini memungkinkan terciptanya 'ruang publik (*public space*) (Habermas, 1981, 1989) di mana baik individu maupun kelompok menegaskan otonomi dan kebebasannya dalam merepresentasikan dirinya dalam berhadapan dengan negara dan pasar.

Penegasan *agency*, yang di dalamnya mencakup individu maupun masyarakat, dapat dilihat bukan saja dengan mengaktifkan tradisi dan kearifan lokal, namun juga melalui aksi-aksi yang terlokalisasi pada topografi yang khusus (Giri, 1992: 41). Dalam banyak hal, aksi-aksi yang dilakukan dalam tingkatan ini tidak secara langsung menghujamkan kritiknya pada struktur-struktur yang memungkinkan terjadinya marginalisasi. Sebaliknya, perlawanan dilakukan terhadap berbagai dampak langsung yang diakibatkan oleh beroperasinya struktur-struktur yang mengabaikan para agen lokal dan masyarakat sipil. Itulah sebabnya gerakan-gerakan ini cenderung menempatkan kehidupan sehari-hari (*everyday life*) sebagai medan perlawanan di mana pada kesehariannya manusia diasumsikan senantiasa terlibat di dalam politik mikro di luar kerangka negara dan sistem (Walker, 1988: 141; Scott, 1990). Politik dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengejawantahan konsepsi tentang "politik yang hidup" yang menjadi sebuah "pandangan hidup" (*way of life*) (Bailey, 1988). Bentuk ini sekaligus membedakannya dari politik formal dalam masyarakat modern yang cenderung mengabaikan partisipasi dan emansipasi semua pihak di dalam instrumen-instrumen politik seperti yang banyak dijumpai dalam sistem demokrasi perwakilan.

Tidak ada satu bentuk gerakan pun yang dapat secara eksklusif dikaitkan dengan NSM. Sebaliknya, ia memiliki 'bentuk yang beragam' (*polymorphous expressions*) (Singh, 2001:96) dan di dalamnya terkandung semangat untuk menolak penyeragaman, homogenisasi, dan penyamarataan di bawah kekuasaan ideologi global maupun sistem kekuasaan tertentu. Itulah sebabnya gerakan antirasisme, antinuklir, perlucutan senjata, feminisme, maupun aksi-aksi kolektif berbasiskan isu lingkungan, etnisitas, kebebasan sipil, hingga pada pembelaan atas gaya hidup (*life style*) dan kontrol atas tubuh memberikan

warna pada NSM. Keragaman bentuk ini menjelaskan bahwa identitas dalam masyarakat modern tidak semata bergantung pada posisi kelas. Sosialitas manusia bersifat heterogen dan, sebagai akibatnya, bentuk-bentuk aksi sosial pun memiliki arah, tujuan, dan kepentingan yang berbeda.

New Social Movement: Sebuah Akhir bagi Politik Kelas Pekerja?

Terpaparnya pekerja industri terhadap berbagai praktik, ekspresi, dan ranah, khususnya seperti yang penulis temukan, menjelaskan bahwa identitas mereka bukan merupakan sesuatu yang bersifat *ajeg* dan tak dapat diganggu gugat. Identitas itu sendiri bukan sesuatu yang sudah jadi (*fixed*) atau sudah ada sebelumnya (*predetermined*). Identitas-identitas pekerja industri tidak terbangun semata oleh kondisi-kondisi yang konstan (misalnya: produksi industrial menghasilkan identitas buruh, tradisi dan sejarah menciptakan identitas kedesaan yang homogen), tanpa peduli pada kondisi-kondisi kontemporer. Konstruksi identitas pekerja industri merupakan proses yang belum dan tidak akan pernah selesai. Ia secara konstan mengalami transformasi dan perubahan secara dinamis. Proses pencarian format identitas budaya mereka justru dipertajam oleh interaksi dengan diskursus global dan dunia yang senantiasa berubah. Hal ini, di antaranya, dimungkinkan oleh apa yang disebut Appadurai (1990:7-9) dengan *ethnoscape* (mobilitas fisik yang memberikan mereka realitas dan ruang yang senantiasa bergeser) dan *mediascape* (kemelekhurufan yang semakin meningkat dan paparan pada media), yang menghasilkan citra yang beragam yang menjadi dasar bagi pembentukan eksistensi masa kini dan mendatang. Dinamika-dinamika yang ada ini menunjukkan bahwa realitas buruh tidak *melulu* tentang pabrik. Ada desa tempat imajinasi tentang migrasi, modernitas, dan pekerjaan di kota dimulai. Desa itu sendiri tidak secara eksklusif berarti tradisi dan konservatisme, terutama karena desa telah menjadi modern melalui pembangunan dan modernisasi pedesaan. Di sini pendidikan modern (yang tersentralisasi) dan media massa memiliki peran dalam produksi imajinasi mengenai kehidupan (*imagined lives*). Di kota, perkampungan buruh sama pentingnya sebagai ranah tempat internalisasi sebagai individu modern, dengan merengkuh gaya hidup perkotaan dan praktik-praktik lainnya yang dianggap 'modern,' diekspresikan. Dalam ranah

yang sama para buruh juga berhadapan dengan pengalaman multietnis dan multikultural, yang bersama dengannya buruh terlebur dalam aspirasi dan gagasan yang terkonvergensi mengenai *imagined community*. Masih ada lagi ranah-ranah yang tercipta melalui citra, di mana mereka tidak pernah menjadi bagian darinya, namun dalam khayalan mereka menjadi bagian darinya, dan hal ini menentukan bagaimana mereka akan membayangkan dan mengkonstruksikan masa depannya.

Dengan melihat ekspektasi kaum buruh industri perkotaan terhadap modernitas dan bentuk-bentuk modernisme, seperti yang dikemukakan pada ilustrasi di depan tentang gaya hidup dan imajinasi sosial yang berorientasi pada kelas menengah, nampak bahwa eksistensi kelas pekerja tidak dapat lagi semata didukung oleh preposisi mengenai perjuangan dan antagonisme kelas. Jacquelyn Southern (2000:222), dalam konteks masyarakat pasca-industrial, berpendapat bahwa faktor-faktor seperti 'kemakmuran, konsumerisme, dan produktivisme' telah menciptakan kondisi di mana para pekerja kasar/manual (*blue-collar worker*), meninggalkan 'kondisi proletarian' dan 'kepemimpinan moral' mereka dalam perjuangan kelas melawan kelas-kelas antagonis mereka. Di sini imajinasi modern menjadi penting dalam mentransendensikan eksistensi kekinian kaum pekerja ke dalam wilayah-wilayah imajiner, yang secara tipikal didefinisikan sebagai realitas kelas-non-pekerja. Dengan demikian, konflik-konflik yang melingkari kaum pekerja industri kontemporer telah bergeser dari isu-isu ketertindasan ke isu-isu yang lebih khas dimiliki oleh masyarakat modern dengan gejala-gejala pasca-industrialnya.

Dunia kini diwarnai oleh peran baru imajinasi dalam kehidupan sosial' (Appadurai, 1990:4). Imajinasi menjadi sebuah tolok ukur bagi seseorang untuk melihat tempatnya di tengah aktualitas kekinian, sama dengan saat Benedict Anderson (1983) melihat perjuangan kaum pribumi melawan penguasa kolonial dengan merealisasikan '*imagined communities,*' yang menyejajarkan mereka dengan bangsa-bangsa berdaulat lainnya. Praktik-praktik untuk menjadikan modernitas sebagai bagian dari kesadaran subjektif pekerja industri perkotaan merupakan upaya untuk menegaskan bahwa modernisme bukan merupakan 'proses yang terpisah' (Kahn, 2001:20) dari dinamika-dinamika yang terjadi di tempat-

tempat lain. Jadi, eksistensi 'kelas pekerja' di Tangerang merupakan 'sebuah kesadaran relasional' (Appadurai, 1996:186) dengan eksistensi lain di luar realitas para pekerja industri perkotaan. Pengalaman kelas dan marginalitas perkotaan, sebagai akibat dari subordinasi mereka dalam hubungan industrial dan status sosio-ekonomi mereka, merupakan ancaman bagi upaya mengejar identitas modern, sebuah hambatan bagi terealisasinya imajinasi modernitas menjadi realitas sosial. Oleh karena itu, modernisme sebagai praktik untuk mentransformasikan imajinasi menjadi pengalaman aktual serta merupakan perjuangan sebuah kelas melawan proses pengabaian mereka dari modernitas demi memperoleh pengakuan modern (*modern recognition),* yang menempatkan mereka sejajar dengan warga negara lainnya yang diuntungkan dari proses pembangunan. Pengambilalihan simbol-simbol perkotaan oleh para pekerja pabrik ini menggarisbawahi 'kesadaran subaltern' (Spivak, 1999:24-8) terhadap pengabaian mereka dari arus global yang besar yang secara kreatif dibalik menjadi sebuah keadaan tempat inklusivitas mereka alamnya memperoleh pengakuan.

Namun demikian, modernitas tidak serta-merta menjadikan politik kelas pekerja — yang secara tipikal berpusat di sekitar aktivisme buruh — tidak lagi relevan. Angka pemogokan buruh dan aksi-aksi kolektif dalam dunia industri tetaplah tinggi. Kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang tidak berpihak pada masyarakat luas, terutama dengan dicabutnya subsidi anggaran atas bahan bakar minyak (BBM), menjamin bahwa penolakan-penolakan pada tingkatan akar-rumput akan senantiasa berlanjut, bahkan berkembang. Media massa pun tidak berhenti melaporkan tentang aksi-aksi buruh di kantong-kantong industri. Isu-isu klasik mengenai kondisi kerja yang buruk dan marginalisasi industrial masih tetap hadir hingga hari ini. Namun, kondisi-kondisi subjektif dalam gerakan buruh mengungkapkan bahwa ia belumlah siap untuk mentransformasikan dirinya menjadi instrumen kelas pekerja yang solid. Apa yang terjadi dengan pengalaman empiris yang penulis temukan menunjukkan bahwa politik kelas pekerja tidak lagi dapat bersandar pada premis-premis mengenai ketidakberdayaan buruh dan penaklukan total mereka dalam menghadapi kekuatan-kekuatan dominan (negara dan pengusaha). Kondisi-kondisi objektif, misalnya: upah nominal yang

meningkat, semakin murahnya barang-barang konsumtif, pendidikan yang lebih baik, dan paparan terhadap media, mengindikasikan bahwa pekerja industri di permulaan abad ke-21 ini memiliki arena permainan dan aspirasi yang berbeda dengan yang dialami kaum buruh industri dari era-era sebelumnya. Kondisi-kondisi ini memberikan mereka serangkaian kemungkinan untuk mengusung aspirasinya dalam arena-arena yang berbeda (bukan lagi pabrik-pabrik dan hubungan-hubungan buruh-kapital), tanpa menghilangkan kapabilitas kritis mereka untuk mengkritisi ketidakadilan dan *inequality* dalam masyarakat.

Penutup

Dalam artikel ini penulis tidak berpretensi untuk membuat klaim bahwa dinamika politik perburuhan pada tingkatan akar-rumput merefleksikan gejala terbuka dari NSM. Tentu saja ada persoalan konseptual untuk mengkategorikan gerakan buruh ke dalam wacana ini mengingat dunia kerja dan premis-premis klasik yang mendasari keberadaan pekerja industri merupakan representasi dari masyarakat industrial. Hal ini menjadi sedikit lebih rumit karena pada umumnya karakteristik gerakan buruh mewakili kecenderungan dalam gerakan sosial lama (*old social movement*) yang berkaitan dengan institusi-institusi politik formal dalam sistem demokrasi perwakilan.

Namun demikian, bukan berarti realitas dan eksistensi pekerja industri Indonesia tidak memiliki kaitan dalam bentuk apa pun dengan premis-premis pembentuk NSM. Ilustrasi penulis tentang merebaknya konsumerisme di kalangan pekerja mungkin dapat dipakai sebagai rantai penghubung. Tidak tertutup kemungkinan bahwa sementara pihak memandangnya semata sebagai suatu bentuk kesadaran palsu (*false consciousness*). Namun, gejala yang sama dapat pula dilihat sebagai bagian dari upaya manusia-manusia marginal seperti buruh untuk mengklaim kembali otonomi atas diri mereka sendiri dalam ranah non-produksi. Dengan memahami bahwa eksistensi pekerja industri bukan semata lingkungan pabrik dan kerja, maka akan ditemukan berbagai kemungkinan *life-world* seperti yang dimaksudkan oleh Habermas. Kondisi-kondisi marginalisasi dan dominasi yang dihasilkan oleh relasi produksi tidak selalu harus direspons dengan perlawanan dan kritisisme seperti yang ditemukan dalam gerakan maupun organisasi perburuhan (tradisional) pada umum-

nya. Sebaliknya, eksklusi struktural seperti ini dapat pula diterjemahkan menjadi diskursus-diskursus kultural di luar lantai pabrik tempat para buruh membuka ruang untuk menemukan kembali martabat dan otonominya sebagai manusia secara penuh.

Justru dengan penemuan ruang ekspresi dan eksistensi yang semakin luas itulah sesungguhnya gerakan buruh tidak akan pernah kehabisan sumber inspirasi perjuangannya. Seandainya semua tuntutan ekonomi dan isu tentang kondisi kerja telah terpenuhi, pertanyaan tentang ke mana gerakan buruh setelah itu mungkin akan menjadi persoalan besar. NSM memberikan alternatif tentang bagaimana kritisisme terhadap negara dan pasar dapat terus dipelihara. Apa yang penulis coba tunjukkan adalah bahwa isu non-materialisme adalah mungkin dalam realitas buruh industri di Indonesia, setidaknya di Tangerang. Adalah benar bahwa gambaran-gambaran kecil pada tingkatan akar rumput ini masih jauh, sangat jauh, dari sebuah gerakan kritis secara kolektif. Klaim terhadap ruang publik dalam usaha untuk menempatkan masyarakat dan individu sejajar dengan negara dan pasar seperti kebanyakan NSM masih jauh dari perhatian para pekerja. Tentu saja akan menarik mengamati apa yang menurut penulis merupakan gejala prematur sebuah gerakan berbasis identitas dalam gerakan buruh mengalami transformasi menjadi NSM.

Daftar Rujukan

Abramson, Paul dan Ronald Inglehart. 1986. "Generational Replacement and Value Change in Six Western Societies". *American Journal of Political Science* 31(1):1-25.

Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.* London: Verso.

Appadurai, Arjun. 1990. "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." *Public Culture* 2(2):1-24.

Appadurai, Arjun. 1996. *Modernity at Large*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Cohen, Jean. 1985. "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements." *Social Research* 52(4): 663-716.

Ford, Michele. 2000. "Research Note: Indonesian Trade Union Developments since the Fall of Suharto." *Labour and Management in Development Journal* 1(3):1-10.

Ford, Michele. 2001. "Challenging the Criteria of Significance: Lessons from Contemporary Indonesian Labour History." *Australian Journal of Politics and History* 47(1):100-113.

Ford, Michele. 2003. *NGO as Outside Intellectual: A History of Non-Governmental Organisations' Role in the Indonesian Labour Movement.* Disertasi PhD, tidak diterbitkan. Wollongong: University of Wollongong.

Frank, Andre Gunder dan Marta Fuentes. 1987. "Nine Theses on Social Movements." *Thesis Eleven* 18/19: 143-65.

Giri, Ananta. 1992. "Understanding Contemporary Social Movements." *Dialectical Anthropology* 17:1: 35-49.

Gorz, Andre. 1982. *Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism*. London: Pluto Press.

Habermas, Jurgen. 1981. "Social Movements". *Telos* No.19.

Habermas, Jurgen. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into A Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hadiz, Vedi R. 1997. *Workers and the State in New Order Indonesia.* London: Routledge.

Hadiz, Vedi R. 2001. "New Organising Vehicles in Indonesia: Origins and Prospects", dalam Jane Hutchison dan Andrew Brown (eds.). *Organising Labour in Globalising A*sia. London: Routledge. Hal 108-126.

Hill, Hal. 1998. "The Indonesian Economy: The Strange and Sudden Death of A Tiger", dalam Geoff Forrester dan R.J May (eds.). *The Fall of Soeharto*. Bathurst: Crawford House Publishing. Hal 93-103.

Inglehart, Ronald. 1971. "The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies." *The American Political Science Review* 64(4):991-1017.

Kahn, Joel. 2001. *Modernity and Exclusion*. London: Sage Publications.

Kammen, Douglas Anton. 1997. A Time To Strike: Industrial Strikes and Changing Class Relations in New Order Indonesia. Disertasi PhD tidak diterbitkan. Ithaca: Cornell University.

Laclau, Ernesto dan Chantall Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy.* London: Verso.

Leclerc, Jacques. 1972. "An Ideological Problem of Indonesian Trade Unionism in the Sixties: Karyawan versus Buruh". *Review of Indonesian and Malayan Affairs (RIMA)* 6(1):76-91.

Marx, Karl. 1977. "The German Ideology", dalam David McLellan (ed.). *Karl Marx: Selected Writing.* London: Oxford University Press. Hal 159-91.

Nandy, Ashis. 1987. "Cultural Fraes for Social Transformation: A Credo." *Alternatives* 13(1): 113-123.

Offe, Claus. 1985. "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics". *Social Research* 52(4): 817-68.

Poulantzas, Nicos. 1973. "On Social Classes". *New Left Review* 78 (March-April): 27-54.

Scott, James. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.

Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-modernist Critique*. New Delhi: Sage Publications.

Southern, Jacquelyn. 2000. "Blue Collar, White Collar: Deconstructing Classification" dalam J.K Gibson-Graham, Stephen Resnik, dan Richard D. Wolff (eds.). *Class and Its Others.* Minneapolis: University of Minnesota Press. Hal 191-224.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1995. "Can the Subaltern Speak", dalam B. Ashcroft, G. Griffiths, H Tiffin (eds.). *The Post-Colonial Studies Reader*. London: Routledge. Hal 24-28.

Todaro, Michael. 1982. *Economics for a Developing World: An Introduction to Principles, Problems and Policies for Development.* Barlow: Longman.

Touraine, Alain. 1984. *The Return of the Actor*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Touraine, Alain. 1985. "An Introduction to the Study of Social Movements". *Social Research* 52(4): 749-787.

Walker, R.B. 1988. *One World, Many Worlds: Struggles for a Just World Peace*. London: Zed Books.

Warouw, J. Nicolaas. 2004. Assuming Modernity: Migrant Industrial Workers in Tangerang, Indonesia. Disertasi PhD tidak diterbitkan. Canberra: The Australian National University.

Wright, Erik Olin. 1979. *Class, Crisis and the State.* London: Verso.

"LAPAK" POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?

(Sekelumit Persoalan Pengorganisasian Rakyat Pekerja Indonesia)

Willy Aditya [1]

Abstract

A struggle against oppression in any way of it always requires an "organizing" action. Organizing, especially organizing people, has become the key of success for the struggle combating it. Organizing the working people is the strategy and even a tactics in terminating the chain of the people's being oppressed. Releasing the working people out of their being oppressed is the primary matter normally faced by human civilization. The Indonesian working people themselves have faced the critical situation, as they are indeed at a position of such incomplete transformation just before the end of the colonization by the imperialists.

Pengantar

Gelombang pasang demokrasi nasional di Amerika Latin menjadi rujukan kontemporer bagi gerakan rakyat pekerja di negara-negara dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia. Kemenangan kelompok kiri tak hanya pada tingkatan influence terhadap kebijakan Negara, namun sampai pada kursi presiden. Banyak tafsir dari gelombang pasang demokrasi nasional di negara Amerika Latin, mulai dari munculnya new social movement, kejenuhan demokrasi ala neo-liberalisme yang memiskinkan, sampai pada kerinduan terhadap wajah baru sosialisme. Apa pun argu-

1 Willy Aditya, Sekretaris Jeneral Komite Persiapan Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP). Menamatkan Studi di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta program studi Ideologi dan Politik.

mentasi dan asal latar ideologi, sejarah pergolakan kekuasaan yang panjang telah memberikan pelajaran tersendiri tentang mengakarnya pengorganisasian rakyat pekerja.

Tidak dapat disangkal bahwa perjuangan melawan penindasan baik kolonialisme maupun neo-kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apa pun, selalu saja membutuhkan "pengorganisasian". Pengorganisasian, terutama pengorganisasian rakyat, menjadi kunci dari suksesnya perjuangan melawan penindasan. Kuba adalah contoh yang baik dalam sejarah abad ke-20 yang mencatat kebenaran tesis ini dalam konteks perlawanan terhadap kapitalisme dan neo-kolonialisme (Machel, 1999).

Rakyat pekerja, istilah apakah ini? Kenapa tidak proletariat yang lebih tegas dalam polarisasi kelas, marhaenisme yang merupakan pemikiran orisinal Soekarno terhadap relasi produksi negara terjajah, Murba dalam istilah Tan Malaka, atau rakyat miskin yang akhir-akhir ini sering dipakai? Rakyat pekerja dalam terminologi Marxian memiliki kecenderungan pembauran dari komposisi kelas buruh, pekerja mandiri, dan borjuasi kecil progresif. Penulis menggunakan terminologi 'rakyat pekerja' berangkat dari kecenderungan komposisi kelas di Indonesia yang memperlihatkan banyaknya borjuasi kecil dan pekerja mandiri.[2] Secara ideologis, posisi politik kepemimpinan kelas buruh dalam relasi produksi termaju tak disangsikan lagi. Namun, materialisme dialektika adalah ilmu pengetahuan tentang ruang praktik perjuangan yang luwes dalam eksplorasi karakter massa berlawan. Politik pembebasan rakyat pekerja bukanlah ruang kosong yang bereksperimentasi dalam wacana besar di media massa liberal atau propaganda koran partai saja. Untuk konteks Indonesia, setidaknya harus mampu diselesaikan delinking sejarah perjuangan kelas serta mencoba mengisi kekosongan politik kelas.[3]

---

2 Pekerja mandiri bukanlah buruh dalam relasi produksi kapitalisme yang menjual penuh tenaganya untuk mendapatkan upah. Pekerja mandiri memiliki otoritas (*self authority production*) berproduksi dalam skala tertentu dan tak terikat disiplin besi seperti pabrik. Pekerja mandiri acapkali ditemukan di negara-negara postkolonial seperti tukang bakso, tukang sol sepatu, tukang becak, dsb.

3 Istilah 'politik kelas' dirujuk karena menempatkan masyarakat dalam konteks kepentingan sosial-ekonomis yang dibawanya. Dalam konteks ini, kepemilikan atau dominasi ekonomi atau penguasaan atas alat-alat produksi dianggap sebagai faktor utama yang memilah-milah masyarakat. Dominasi ini tidak terjadi secara alami atau takdir, tetapi sebagai sesuatu yang sistematis karena penguasaan sumber-sumber ekonomi (basis material) ini juga berkorelasi langsung dengan upaya perebutan dan mempertahankan 'kekuasaan politik'.

Pembebasan Rakyat Pekerja dari rantai ketertindasan adalah persoalan pokok yang selalu dihadapi oleh peradaban manusia. Persoalan lanjutannya adalah bagaimana strategi dan taktik untuk memutus rantai ketertindasan tersebut. Apakah perjuangan revolusioner atau damai, metode ini selalu tidak berdiri bebas dalam zamannya namun berkorespondensi terhadap kesiapan massa dan sejarah massa berlawan. Namun, kata kunci tetapnya tak bisa disangkal adalah pengorganisasian rakyat pekerja!

Apakah pengorganisasian rakyat pekerja dalam situasi sekarang memiliki perspektif politik kelas? Untuk mengurai pertanyaan tersebut, mungkin harus dilakukan analisis secara komprehensif dari aktor, strategi, dan taktik yang dipilih. Politik kelas harus diterjemahkan secara plural dalam berbagai dimensi kreatif. Politik kelas harus pula menyebar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi obyektifnya masing-masing.

Akhir-akhir ini kata "pengorganisasian" menjadi kata yang amat sering dipakai di setiap rapat komite aksi, pendidikan fasilitator, sampai forum otokritik. Namun demikian, pada kenyataannya justru kurang sekali pelaksanaannya. Di mana sebenarnya letak silang-sengkarut pengorganisasian di tengah sejumlah klaim berbagai kelompok tentang senjata perlawanan rakyat untuk pembebasan ini?

Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketertindasan Rakyat Pekerja

Krisis berkepanjangan yang terjadi berulang-ulang dalam kapitalisme sesungguhnya korban utamanya selalu bukan kelas borjuis dan kaum penguasa. Fakta-fakta yang nyata dan terang-benderang terus-menerus dipelintir dan dikaburkan sehingga realitas yang sesungguhnya tidak dikenali lagi. Begitu kabur hingga hanya sedikit pakar yang mengemukakan realitas pahit yang terus terjadi, bahkan setelah berakhirnya rezim otoriter Suharto, seperti yang diingatkan oleh Ignas Kleden (2003) bahwa kelas bawah terus dipaksa membayar privilese dan kemewahan buat kelas atas. Untuk lebih jauh mengenali realitas ketertindasan kelas pekerja, kita perlu mendalami beberapa deskripsi berikut tentang kenyataan itu dalam pengalaman sektoral rakyat pekerja di Indonesia hingga hari ini.

Kaum Buruh:

Rakyat pekerja Indonesia dihadapkan pada situasi yang selalu krisis karena memang berada dalam suatu transformasi yang tidak akan terselesaikan sebelum berakhirnya penjajahan oleh imperialisme. Imperialisme mengakibatkan pengereman laju masyarakat suatu negeri, karena super profit diakumulasi di luar negeri sehingga mengakibatkan stagnasi pertumbuhan pembangunan industri baru. Hal ini adalah salah satu latar belakang munculnya hutang dari negeri-negeri donor atau lembaga-lembaga internasional, yang pada hakikatnya modal tersebut adalah hasil dari penghisapan terhadap negara-negara semikolonial dan kolonial.

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Suharto menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing yang dilanjutkan dengan pembentukan Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing pada 19 Januari 1967. Sementara sebagai kelanjutan Pertemuan Tokyo pada bulan September 1966, pada tanggal 23-24 Februari 1967 di Amsterdam diselenggarakan pertemuan untuk membentuk sebuah badan pemberi pinjaman yang dikenal dengan sebutan Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI). Dalam Amsterdam Meeting ini disepakati bantuan sebesar US$ 325 juta kepada Indonesia. Pinjaman dan investasi swasta asing pun masuk, maka dibukalah kawasan-kawasan industri. Hingga 1995 kawasan industri telah menggunakan lahan seluas 42.304,35 Ha, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Kawasan Industri di Indonesia

Lokasi	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
DKI Jakarta	6	3.151,6
Jawa Barat	75	21.489,4
Jawa Tengah	15	2.891,4
Jawa Timur	29	6.035,69
Sumatera	18	6.869,24
Sulawesi	3	1.015,02
Kalimantan	6	852
J U M L A H	152	42.304,35

Sumber: Himpunan Kawasan Industri (HKI), dikutip dari "Lahan Kawasan Industri di Indonesia 42.304 Ha, *Kompas*, 13 Juli 1995

Pembukaan kawasan-kawasan industri ini ditopang oleh kebijakan pemerintah yang kooperatif terhadap investasi, tetapi bersikap sebaliknya dalam memperlakukan kaum buruh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan utama bahwa investasi masuk ke Indonesia adalah karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif, yakni tenaga buruh yang murah dan iklim investasi yang nyaman di bawah rezim Orde Baru.

Peralihan rezim dari Soeharto ke Habibie mulai membawa perubahan kebijakan terhadap kaum buruh. Habibie mulai meratifikasi konvensi ILO mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebagai hak kolektif buruh untuk melakukan perjanjian. Juga mulai terjadi demokratisasi di tingkatan pabrik dengan bermunculannya organisasi-organisasi serikat buruh baru di luar korporatisme Orde Baru. Namun di sana-sini masih terdapat kekangan terhadap hak buruh untuk berorganisasi, apalagi untuk menyalurkan hak mereka untuk mogok atau berdemonstrasi. Jika sebelumnya pada masa Orde Baru terdapat kekangan dan korporatisme organisasi yaitu harus melalui SPSI sebagai serikat pekerja resmi, kemudian mulai terjadi demokratisasi dengan berdirinya banyak serikat buruh baru yang melakukan tuntutan-tuntutan radikal dan bahkan politis.

Setelah berjalannya agenda neoliberalisme imperialisme untuk melakukan privatisasi dan pasar bebas, mulai muncul persoalan baru bagi kaum pekerja Indonesia yaitu relokasi industri dan penciutan jumlah pekerja. Pada tahun 2002 lalu, misalnya, terjadi relokasi pabrik Sony Indonesia ke Vietnam. Kasus Sony ini menjadi gunung es dari persoalan imperialisme yang tidak mengenal batas-batas negara. Kemudian mulai terjadi demonstrasi dan mogok kerja pekerja-pekerja BUMN yang sebelumnya dikenal moderat (plat kuning). Bahkan sampai tesis ini dibuat, pekerja PT Dirgantara Indonesia (BUMN) masih melakukan mogok kerja karena ancaman pensiun awal dari pihak manajemen perusahaan sebagai konsekuensi dari masalah keuangan. Sebelumnya, bahkan ribuan pekerja dari PT Dirgantara Indonesia, Indosat, Semen Padang, dan banyak lagi BUMN lain di Idonesia pernah melakukan hal serupa yang menggugat privatisasi yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.

Di banyak perusahaan masih terjadi mogok atau unjuk rasa buruh mengenai masalah pengupahan,

tunjangan, dan beberapa hak dasar mereka yang belum diberikan oleh pengusaha. Persoalan ini semakin memberatkan buruh karena sekarang ada rencana dari pemerintah untuk mengundang-undangkan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang mengancam hak buruh untuk bersatu dalam memperjuangkan nasib mereka.

Kaum Tani:

Kaum tani Indonesia dewasa ini mengalami bermacam penindasan, penghisapan, dan gangguan sebagai berikut:

- Di beberapa tempat masih terdapat penindasan tuan tanah dan lintah darat yang menghisap kaum tani berdasarkan hubungan patron-klien yang feodal karena pembelokan program *Land Reform* oleh rezim berkuasa;
- Pengambilalihan lahan kaum tani dengan paksa atau setengah paksa oleh kapitalis (baik lokal maupun imperialis) yang didukung oleh birokrat/militer dan kapitalis birokrat sendiri;
- Murahnya nilai produk pertanian karena terbukanya impor pangan, tidak adanya subsidi untuk pupuk, dan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani lainnya;
- Monopoli bibit, produksi, dan pemasaran produk pertanian oleh kapitalis; monopoli adalah konsekuensi dari liberalisasi pertanian.

Tatanan ekonomi global imperialisme menempatkan negara-negara dunia ketiga yang berada di periferi sebagai pemasok bahan baku industri, penyedia tenaga kerja, dan sekaligus sebagai konsumen potensial produk-produk dari negara imperialis. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya perlambatan transformasi masyarakat menuju kapitalisme. Industri yang dibangun adalah industri orientasi ekspor yang berteknologi rendah tetapi padat karya sehingga dipilih yang manufaktur (tekstil) dan pengolahan produk-produk pertanian seperti industri rokok, pengolahan makanan, dan sebagainya. Dengan demikian keunggulan ekonomi Indonesia adalah pada sektor-sektor yang berkaitan dengan ekstraktif yang membuatnya terbelakang dalam hal teknologi (sebagai salah satu aspek dari *force of production*). Hal ini membuka kesempatan bagi kapitalis (imperialis) — apalagi sejak dibukanya liberalisasi — untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan hubungan produksi baru dengan kekuatan produksi yang lebih modern.

Penetrasi modal pertama dimulai dengan konsolidasi lahan milik tani

supaya bisa lebih efisien dalam pemanfaatan teknologi dan manajemen produksi. Terdapat empat cara untuk melakukan konsolidasi lahan ini:

1. Melakukan pembelian atau penggusuran dengan harga murah dengan menggunakan alat represi dari TNI atau negara (kasus Tapos);
2. Dengan sistem Corporate Farming atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang mengkonsolidasikan lahan petani-petani kecil dengan sistem pembagian saham atau si kapitalis berperan sebagai manajemen;
3. Menguasai lahan besar yang dimiliki secara komunal oleh rakyat, yaitu tanah-tanah marga, ulayat, dan sebagainya dengan perjanjian bagi saham atau pembagian keuntungan yang sebagian besar dinikmati oleh elite-elite masyarakat atau marga;
4. Perjanjian pembagian saham atau keuntungan antara kapitalis dengan pemilik lahan besar feodal yang menggusur petani penggarap yang sejak lama menggunakan tanah tersebut; atau kaum feodalnya sendiri yang mentransformasikan diri menjadi kapitalis yang memajukan corak produksi lahan yang dimilikinya sehingga petani penggarap tergusur.

Selain itu, masih terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh pembelokan program *Land Reform* oleh Orde Baru. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagian besar lahan-lahan yang di-*Land Reform* oleh rakyat di era Orde Lama adalah lahan hak *Erfpacht* (Hak Guna Usaha) yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Belanda. Hak *erfpacht* ini muncul dari politik agraria Belanda untuk menguasai lahan-lahan petani yang tidak dapat membuktikan kepemilikan lahannya kepada pemerintah kolonial pada waktu itu. Lalu lahan-lahan yang diserobot dari rakyat tersebut dikuasai oleh pemerintah kolonial yang kemudian memberikan hak guna usaha pada perusahaan-perusahaan perkebunan.

Hak guna usaha lahan-lahan hasil nasionalisasi oleh rakyat tersebut diserahkan oleh Orde Baru kepada militer, kabir (kapitalis birokrat), dan kapitalis-kapitalis kroni mereka. Dalam beberapa kasus terjadi kontradiksi kepentingan antara kaum tani dengan buruh perkebunan. Sesungguhnya kontradiksi pokok terjadi antara petani dengan kabir yang menguasai lahan, namun hubungan produksinya bukan lagi semata-mata antara petani dengan kabir namun juga terdapat hubungan produksi

antara buruh perkebunan dengan kabir.

Selain itu, petani kecil Indonesia juga berhadapan dengan pasar bebas dan persaingan bebas yang membuat mereka tidak mampu bersaing karena sistem produksi mereka yang tidak semaju sistem kapitalisme. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani seperti pencabutan subsidi pupuk, pembukaan pintu impor pangan, dan berbagai kebijakan lainnya yang membuat munculnya resistensi yang kuat dari massa tani terhadap negara.

Kaum Nelayan:

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai yang tergolong terpanjang di dunia. Sayangnya, dari segi produktivitas hasil laut, Indonesia kalah dari Inggris dan Thailand yang jauh lebih pendek garis pantainya. Produktivitas ini bukan semata dilihat dari kenyataan bahwa nelayan Indonesia tidak bekerja keras. Sekalikali tidak! Nelayan Indonesia adalah nelayan yang bekerja keras, namun terbelakang dalam teknologi penangkapan ikan dan alat produksinya juga terbatas.

Dikenal tiga jenis nelayan, yakni buruh nelayan, nelayan kecil, dan nelayan besar. Buruh nelayan merupakan buruh-buruh yang bekerja untuk nelayan besar dan kapitalis pemilik kapal. Kehidupan mereka sangat terhisap, bahkan banyak yang tidak diupah dengan layak oleh borjuasi. Sedangkan nelayan besar adalah nelayan yang memiliki alat produksi dan teknologi yang memadai serta mempekerjakan buruh-buruh nelayan dalam kegiatannya. Namun, massa terbesar dari nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yaitu nelayan yang hanya memiliki perahu kecil dan minim teknologi sehingga dalam bekerja sering melakukan upaya kolektif bersama nelayan-nelayan kecil lainnya. Nelayan kecil dan buruh tani merupakan sekutu terdekat kelas pekerja mengingat banyak perannya yang lain seperti penjagaan teritori dan pengangkutan sungai dan laut.

Kaum Miskin Kota:

Dalam proses transformasi masyarakat pra-kapitalisme menuju kapitalisme, terjadi peralihan kelas petani tak bertanah menjadi proletar. Dalam perkembangannya proses urbanisasi tak mampu menampung ledakan tenaga produksi ini sehingga memunculkan kelas di tengah (borjuis kecil dan semi proletariat) yang menggembung. Tak terkira contoh kasus yang menunjukkan bahwa penetrasi imperialisme di dunia ketiga telah menciptakan urban-proletariat (Co-

hen dan Gutkind, 1979). Fenomena yang terjadi di negara semikolonial atau negara yang sedang berevolusi menuju kapitalisme ini mengakibatkan munculnya kaum miskin kota dengan berbagai profesi. Profesi-profesi kaum miskin kota ini meliputi tukang becak, gelandangan, tukang ojek, pengamen, pemulung, pedagang kaki lima (kulakan), dan beberapa profesi lain. Heterogenitas pekerjaan dan bahkan tanpa pekerjaan (pengangguran) harus ditempatkan dalam pemahaman bahwa mereka adalah kelas pekerja dan subproletariat sesuai definisi "mereka yang tidak memiliki alat produksi dan tak memiliki suatu apa pun yang dijual kecuali tenaga untuk bekerja" (Sandbrook, 1975).

Jika mempunyai keterampilan kerja yang lumayan, kaum miskin kota ini bisa menjadi buruh di sektor-sektor industri rumah tangga seperti konveksi, fotokopi, karyawan toko, dan berbagai profesi buruh sektor informal lainnya. Namun, terdapat juga kaum miskin kota yang dibujuk rayu oleh kapitalis/borjuis untuk menjadi centeng mereka atau kemudian terjebak melacurkan diri, menjadi maling, atau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan kriminal lainnya oleh hukum yang berlaku.

Kaum miskin kota ini merupakan sekutu terdekat kelas pekerja dalam perlawanan melawan imperialisme dan negara diktator borjuasi. Kemunculan mereka merupakan dampak dari imperialisme yang menghalangi kemajuan perekonomian dan dampak dari kebijakan negara yang menjadi kaki tangan kapitalis. Sebagaimana kita ketahui, negara yang dikuasai oleh kapitalis akan menyusun perekonomian yang memihak kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat lainnya yang mayoritas.

★★★

Selain kelas-kelas yang telah disebutkan di atas, terdapat juga kaum terpelajar, pekerja seni, dan mahasiswa/pemuda yang juga merasakan kesukaran yang sama dengan yang dialami oleh kelas pekerja. Mereka tidak diuntungkan oleh hambatan-hambatan yang ada dalam suatu negara semikolonial, seperti tidak adanya penghargaan yang layak bagi pekerja seni yang pro-rakyat, kaum terpelajar yang jujur pada ilmunya, dan juga mahasiswa yang sering kali mengalami kesukaran dalam menuntut ilmunya karena kurangnya fasilitas dan tidak demokratisnya sistem pendidikan.

Di Pinggiran Politik Rakyat Pekerja Terkurung

Alang2 ditembok, berat kepalanja, lemah pokoknja, dangkal akarnja. Rebung digunung, runtjing putjuknja, tebal kulitnja, kosong isinja.
—Mao Tse Tung

Terpinggirnya kekuatan politik kelas dari dinamika politik nasional sekarang dapat diartikan terjadinya kekosongan secara vertikal dan horisontal antara gerakan politik yang berkembang dengan rakyat pekerja Indonesia. Secara vertikal bermakna bahwa belum ada kepemimpinan politik yang cukup memadai dan, terutama, dipercaya oleh massa. Memang hadir berbagai kekuatan atau organisasi yang berusaha tampil untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi pasca GESTOK 1965 sudah tidak ada lagi organ yang mampu memimpin dan menjadi muara perjuangan kelas di Indonesia. Organisasi atau kekuatan yang ada saat ini cenderung lebih banyak bertarung di ranah politik elite yang jauh dari kesadaran massa kelas Indonesia. Secara horisontal bermakna bahwa tidak ada kekuatan atau organisasi yang memiliki anggota dan massa yang cukup besar untuk dapat bertarung secara riil dalam persoalan keseharian massa di tingkatan bawah.

Marx, Lenin, dan Mao sendiri memang sangat menitikberatkan taktik-strategi perjuangannya pada pengorganisasian dan politisasi kelas buruh dan tani untuk merebut negara. Hal ini wajar sebab Marx mengambil basis materi teorinya dari perkembangan masyarakat kapitalis Eropa serta penindasan kaum feodal terhadap kaum tani di China pada saat itu. Bagaimana dengan taktik-strategi perjuangan revolusioner di negeri-negeri terbelakang yang mayoritas masyarakatnya adalah petani atau dalam hubungan penindasan kolonialisme dan semi-feodal? (Wilson, 2003).

Praktik pengorganisasian rakyat pekerja di Indonesia 20 tahun terakhir bergerak tidak pada tujuan bagaimana merebut kekuasaan. Pemahaman tentang *civil society* dikonfrontasikan dengan *political society* sehingga membuat kesadaran yang seolah-olah anti *state*.[4] Perjuangan

4 Baca Coen Husein Pontoh, Masyarakat Sipil sebagai agen Globalisasi. "Akankah *mission sacre* (misi suci) masyarakat sipil berupa gagasan emoh negara, dan memberi tekanan terus-menerus terhadap perilaku negara yang intervensionis, harus dipegang erat-erat? Lalu, buat apa kita membangun masyarakat sipil yang kuat di atas landasan mayoritas yang miskin? Bukankah kita sedang menggali liang kubur sendiri?"

politik menjadi ditabukan dan perjuangan ekonomi lebih dipilih. Kekecewaan terhadap gerakan politik — yang hasilnya selalu diambil oleh borjuasi oportunis atau elite politik — membuat gerakan sosial kemudian malas merambah ke dunia yang seharusnya menjadi medan pertarungan yang sesungguhnya. Kecenderungan *civil society* yang memisahkan antara perjuangan ekonomi dan perjuangan politik kelas adalah wujud alamiah dari masyarakat dengan relasi sosial yang ditentukan kapitalisme, berbeda dengan tahap perkembangan sejarah dalam corak produksi sebelumnya yang tidak memisahkannya.

Ironisnya, di berbagai kalangan yang lantang menyuarakan kritik atas kapitalisme — LSM, kelompok buruh, kelompok tani, atau kelompok pengorganisasian sosial lain — pemisahan perjuangan ini juga dipelihara, dengan menyatakan bahwa urusan mereka adalah soal bagaimana anggota atau massa yang diorganisasikannya sejahtera, sedangkan soal politik itu urusan gerakan mahasiswa atau partai politik. Suatu pernyataan yang benar secara prinsip namun salah dalam pemahaman. Adalah benar bahwa tugas organisasi adalah membuat anggota atau kelas yang diorganisasikannya mencapai kesejahteraan, tetapi salah apabila kemudian melupakan bahwa kesejahteraan hanya dapat diperoleh apabila kekuasaan politik telah direbut oleh kelas yang akan menghapuskan penindasan.

Pengorganisasian adalah bekerja bersamanya sekelompok orang untuk membuat sesuatu yang tak berjalan dan mengalami kemacetan dapat berjalan sebagaimana semestinya. Intinya adalah terjadinya perubahan ke arah kemajuan dan lebih baik. Untuk kasus Indonesia, ada beberapa kondisi yang menyebabkan pengorganisasian rakyat pekerja menjadi tak jelas orientasinya, terutama gerakan sosial. Diantaranya adalah:

a. Tidak memiliki 'orientasi politik' yang tegas

Masyarakat sipil didefinisikan sebagai "masyarakat yang sadar politik tapi tidak berambisi untuk merebut kekua-saan politik" (Coen Husein Pontoh, 2000). Setidaknya ada dua gerbong demokrasi yang memiliki kesamaan dengan cara pandang anti politik. Pertama, sebagian besar aktivis LSM Indonesia fasih politik dan menjadi fasilitator *civic education* yang meng-giring kesadaran massa untuk anti partai politik dan negara, namun tidak melahirkan ruang politik yang signifikan di tingkat lokal. Kedua,

student movement sisa-sisa Mei '98, dengan alasan tidak mau mengulangi kesalahan Angkatan '66, diam-diam membelot menjadi kaki tangan kekuasaan korup. [5]

Ada sebuah gerbong lagi yang perlu ditambahkan yaitu organisasi-organisasi rakyat pekerja seperti serikat buruh, serikat tani, dan kaum miskin kota yang gatal untuk berpolitik namun rikuh untuk terjun langsung. Sikap dan tindakan organisasi rakyat pekerja ini lahir dari ketidak beranian untuk meninggalkan induk semangnya, para LSM yang berkontribusi terhadap jalannya program organisasi. Sikap bimbang organisasi rakyat pekerja inilah yang mewarnai tingginya angka GOLPUT [6] pada PEMILU 2005. Banyak organisasi rakyat pekerja bekerja sama pada program seperti anti militerisme pada PEMILU 2005 tapi tidak mau eksplisit dalam posisi pemenangan langsung satu calon.

Guillermo O'Donnell menegaskan kenapa pilihan berpolitik adalah dengan mendeklarasikan partai sendiri atau masuk parpol yang segaris menjadi kunci bagi orientasi organisasi rakyat pekerja. Parpol adalah kendaraan terbaik untuk terlibat dalam pengelolaan kekuasaan secara aktual dan efektif, parpol tidak hanya bersikap mengawasi pemerintahan yang busuk tetapi juga menggantikan pemerintahan tersebut. Parpol memiliki isu yang paling menyeluruh dan karena itu menjangkau kelas masyarakat yang paling luas. Parpol tidak bekerja berdasarkan isu tapi bekerja atas dasar kepentingan paling mendasar dari kelas pekerja.

b. Pengorganisasian kasus

Tersandung pada ketidakjelasan orientasi politik berimbas pada metode dan praktik pengorganisasian rakyat pekerja di Indonesia. Tidak tuntas pada level pembacaan ekonomi-politik dan geopolitik membuat gerakan rakyat pekerja acak dalam peng-

5 Beberapa kaum muda malah menjadi *darah segar* bagi alat politik Orde Baru seperi GOLKAR dan tak jarang pula yang menjadi *think tank*-nya militer seperti Susilo Bambang Yudhono. Istilah *darah segar* merujuk pada korespondensi Budiman Sudjatmiko ketika masih kuliah di Inggris dengan Agus Subhan yang menegaskan bahwa kaum muda kehilangan moralitas perjuangannya.

6 GOLPUT di era demokrasi liberal berbeda dengan tindakan yang dilakukan Arief Budiman di zaman Otoritarian yang merupakan *power blocking* yang efektif terhadap rezim. GOLPUT di era demokrasi liberal adalah tindakan paradigmatik kelas kapitalis untuk mengeliminasi rakyat dari partisipasi politik secara aktif yang tetap memelihara depolitisasi melalui *floating mass*.

organisasiannya. Pendekatan asal ada kasus untuk diorganisasikan adalah fenomena yang lazim ditemukan dalam keseharian gerakan rakyat pekerja. Pendekatan ini berimplikasi pada susahnya mencari benang merah satu kasus dengan kasus lain karena mengalami spesifikasi dan cenderung parsial.

Pengorganisasian kasus bukanlah barang haram dalam meluaskan agitasi propaganda, namun harus dipahami sebagai faktor penunjang dari target sesungguhnya. Pengorganisasian kasus sering bertendensi ekonomisme dengan pola advokasi. Pola advokasi menciptakan jarak organisasi rakyat pekerja dengan korban.

Dari awal 2003-2005 terjadi PHK massal hampir di semua jenis industri, BUMN, manufaktur, dan lainnya. PHK massal ini telah mendorong inisiatif serikat-serikat buruh dalam beragam warna politik dan pendamping untuk menggalang Aliansi Tolak PHK (ATP) di berbagai kota di Indonesia. ATP mengorganisasikan pemogokan massal di berbagai pabrik serta menduduki kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hampir satu bulan, serta berulang kali dalam waktu terpisah. Beberapa tuntutan ATP adalah: subsidi langsung, akses seluruh proses produksi termasuk rahasia perusahaan dengan menghasilkan UU-nya, kontrol melalui dewan buruh, dan pengambilalihan perusahaan bangkrut oleh negara.

Kekuatan korban PHK yang terorganisasi dalam ATP ternyata belum mampu menjadi persatuan di kalangan kaum buruh untuk meningkatkan program dan kesolidan. ATP oleh beberapa serikat buruh lebih dipandang sebagai penyelesaian kasus dan masih dalam kerangka taktis.

Pandangan PHK sebagai suatu kasus adalah pandangan yang sangat keliru karena PHK adalah implikasi neoliberalisme secara konkret melaku program de-industrialisasi, *Labour Market Flexibility*, dan Relokasi Industri. Pada garis strategis itulah serikat-serikat buruh memandang persoalannya bukanlah semata-mata PHK yang kasuistis melainkan cengkeraman neoliberalisme yang mestinya direspons dengan program bersama yang sistematis.

Sejarah terulang lagi dalam aliansi rakyat untuk merespons Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Respons yang mencuat di media dan di lapangan terfokus pada penolakan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 itu namun tidak melihat secara

objektif *basic issue* dan taktik perjuangan massa. Aliansi Tolak Perpres mampu menggalang semua sektor rakyat pekerja dalam aksi bersama. Namun demikian, meski ada perspektif reforma agraria dari serikat petani, tetap kalah bersaing dengan konsentrasi penolakan Perpres Nomor 36.

"Target konsolidasi gerakan dalam momentum penolakan Perpres 36 tidak boleh terpelintir dengan ilusi bahwa tujuan akhirnya adalah mencabut Perpres saja. Ada atau tidak ada Perpres, penggusuran paksa terbukti berjumlah sangat besar beberapa tahun terakhir. Adanya Perpres justru menandai suatu pernyataan politik ke dalam di antara elite-elite politik yang menguasai dan terkait dengan negara bahwa mereka harus solid dalam suatu proyek bersama yang membutuhkan koordinasi untuk menggusur rakyat. Beberapa tahun ini, tidak ada konsolidasi secara optimal, sehingga terjadi ulur-mengulur yang memakan waktu. Penggusuran ini tidak akan berhenti dengan atau tanpa Perpres 36. Bila sepakat dengan itu, agenda strategisnya adalah bagaimana menempatkan perjuangan rakyat pekerja dalam kondisi seperti itu. Rakyat akan berhadap-hadapan dengan aparat negara dalam berbagai kasus, akankah kita siap atau tidak siap dengan langkah yang strategis, reaksioner, atau kasuistik[7]?"

c. Kehancuran kolektivitas dan solidaritas

Rasa senasib dan sependeritaan merupakan materi dasar untuk pembangunan organisasi di kalangan rakyat pekerja: terhisap oleh sistem produksi, terdiskriminasi oleh negara, dan teralienasi dari budaya dan agama sehingga memicu rasa kolektivitas dalam relasi sosialnya. Kolektivitas pulalah yang menjadi hantu atau momok bagi kekuasaan yang korup. Sementara itu solidaritas hadir sebagai bangunan tak terpisahkan dalam kolektivitas; solidaritas hadir sebagai wajah asli dari jalinan kolektif tersebut.

Celaka sungguh celaka ketika fondasi dan harta pusaka rakyat pekerja tersebut digerogoti oleh gurita dan ternyata lembaga yang ingin memberdayakan mereka justru melahirkan masalah baru

7 Dalam korespondensi dengan Irwansyah dalam hubungan dengan rencana tesis tentang "Gerakan Korban Penggusuran" di Institute of Social Studies (ISS) Belanda

yang jauh dari tradisi rakyat pekerja dalam memecahkan persoalannya.

Merujuk cara pengorganisasian yang dikatakan wahid dan menjadi momok pemerintahan di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di satu sisi telah mengikis kolektivitas dan solidaritas di tengah massa rakyat. Praktik beberapa tahun terakhir dengan memberikan imbalan *per diem* atau uang bulanan pada simpul-simpul massa di kampung telah menjadi kecemburuan sosial di kalangan rakyat miskin kota.[8] Sebagian mereka yang menjadi simpul massa justru memilih meninggalkan pekerjaan sebagai tukang bakso, pedagang kaki lima, atau tukang becak, dan mengalami mobilitas vertikal secara *personal* dengan *new life style* mendokumen rapat dan aksi besar-besaran.

Kehancuran kolektivitas dan solidaritas juga terjadi di beberapa serikat buruh dan tani yang memiliki *bapak pendamping*. Serikat-serikat rakyat pekerja ini kehilangan kemandiriannya dalam menjalankan program organisasi, seperti kekuatan dana organisasi dari iuran anggota sudah digantikan oleh proposal donor. Pola *netek* donor ini menyebabkan hancurnya daya tahan organisasi dalam menghadapi masalah. Di kalangan buruh, pemogokan tidak lagi menjadi senjata pamungkas karena serikat tidak memiliki iuran untuk dana kompensasi. Sementara itu merujuk pada stempel negara (kekuasaan), serikat-serikat yang dikategorikan INDEPENDEN ini dalam kenyataannya adalah jauh panggang dari api!

Secara faktual hal ini tidak hanya dialami oleh satu lembaga saja. Langgam pengorganisasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia pada umumnya telah mendistorsi orisinalitas rakyat pekerja. Tak dapat disangkal pemanglum terjadi hampir di semua tataran dengan argumentasi klasik atau retorik.

d. Sektarianisme

Alangkah celaka nasib rakyat pekerja Indonesia, sudah terhisap dan tersingkirkan, program-programnya pun diharamkan karena mengidap penyakit sektarianisme dan subjektivisme

8 Data dari wawancara langsung dengan pengurus LSM yang menangani kasus-kasus penggusuran di Jakarta.

di kalangan sesama. Sektarianisme ini merupakan penyakit warisan dari pemahaman lapak-lapakan aristokrat/elite pengambil kebijakan di tataran organisasi rakyat pekerja. Lebih mengutama isu sektoral dan tidak mau terlibat dalam aliansi luas di bawah kepentingan politik kelas. Praktik aksi masih sering menonjolkan simbol-simbol organisasi dan tidak mematuhi kepemimpinan lapangan adalah protret nyata dari praktik sektarianisme. Keculasan ini tak hanya berhenti pada praktik colong-menyolong di lapangan aksi, tetapi kenyataannya cukup parah, yakni tidak mau bergabung dalam aliansi untuk merespons isu bersama karena adanya kelompok P, R, atau S. Inilah penyakit kronis yang harusnya menjadi koreksi bila kekuatan rakyat pekerja Indonesia akan mengikuti jejak langkah gerakan rakyat pekerja Amerika Latin.

e. Persatuan kelas tertindas

Kemiskinan dan keterasingan tidak hanya menimpa segolongan buruh-tani saja, tetapi melanda semua lapisan rakyat pekerja, tidak memandang apakah ketua serikat buruh, sarjana, tukang becak, pedagang kaki lima, laki-laki, atau perempuan. Politik identitas atas kesamaan nasib-lah yang bisa menjadi perekat bagi persatuan kelas.

Persatuan Rakyat Pekerja adalah syarat mutlak untuk mencapai kekuasan. Persatuan untuk melepaskan diri dari imperialisme Amerika tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan melawan reaksi, perjuangan untuk perdamaian, untuk demokrasi, dan untuk sepiring nasi. Jelaslah bahwa hak dan kebebasan bagi rakyat pekerja adalah: hak mendapat pekerjaan, bebas dari ancaman pengangguran, hak mendapat upah penuh, dan bebas dari perbedaan ras dan gender. Rakyat pekerja tidak mungkin mendapat semua hak-haknya jika tidak ada persatuan kelas tertindas. Persatuan itu harus dilakukan mulai tingkatan nasional hingga sektoral seperti buruh, petani, dan kaum miskin kota. Diperlukan pula etos dalam perluasan organisasi rakyat pekerja secara bersama untuk melaksanakan suatu unifikasi.

James Petras memberikan gambaran tentang kaum tani di Amerika Latin, yaitu bahwa setelah lebih dari 20 tahun mereka kembali bangkit sebagai aktor sejarah untuk memainkan peran sentral dalam perubahan rezim,

dan memimpin perjuangan menentang perjanjian perdagangan internasional (ALCA atau wilayah perdagangan bebas Amerika/*Free Trade Area of the Americas*), dengan mendirikan kekuasaan yang berbasis lokal dan regional. Di banyak negara, koalisi buruh tani tak bertanah (*coalitions of landless farm workers*), keluarga petani kecil (*small family farmers*), dan kaum tani (*peasants*), mengambil peran sentral dalam perjuangan nasional menentang neoliberalisme dan kebijakan perdagangan bebas.

Penutup

Wajah bopeng pengorganisasian rakyat pekerja di atas mungkin membuat malu *mbah-mbah* yang pernah membangun partai rakyat pekerja pertama di Asia dan negara kolonial pada tahun 1920-an. Namun, pertanggungjawaban sejarah bukan pada masa lampau melainkan pada pertarungan hari ini dan esok. Di tengah gerakan-gerakan, rakyat pekerja belum kunjung memperoleh peran yang signifikan karena posisi politik mereka yang masih berada di pinggiran: masih berperan sebagai tukang demo, tukang bikin proposal, dan pengawal nilai-nilai luhur kemanusiaan. Persoalan pokoknya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai luhur yang diyakini itu dalam kehidupan politik praktis dan realisasi kekuasaan rakyat pekerja.

Tindakan kekiri-kirian, langsung atau pun tidak, masih bersemayam dalam gerakan rakyat pekerja hari ini. Vulgarnya propaganda sosialisme, revolusi agraria, serta program-program maksimum lainnya adalah tindakan prematur. Penulis tidak bertendensi paranoid terhadap hegemoni rezim atau bahkan menyangsikan kebenaran wacana di atas secara prinsipil. Masalahnya adalah tidak tersedianya lantai material yang cukup kuat untuk menyangga wacana dan program-program maju di atas. Tak ubahnya onani atau aborsi di kalangan sendiri!

Kesadaran massa selama 30 tahun terkonstruksi telah mengharamkan 'sosialisme,' 'kiri', bahkan 'politik praktis.' Kesadaran massa mengambang didikan Orde Baru tidak hanya di tataran politik tetapi sudah masuk pada konstruksi sosial yang membangun memori kolektif. Produk sosial Orde Baru telah melekat hingga alam bawah sadar masyarakat Indonesia seperti pengasosiasian maling ayam,

pemerkosa, dan tindakan kriminal lainnya dengan stempel 'komunis'.

Selayaknya ideolog dan penyusun strategi gerakan rakyat pekerja mampu menilik konstruksi kesadaran massa di atas secara kritis. Memang benar pengalaman gerakan reformasi 1998 telah memberikan pelajaran tentang aksi massa sebagai senjata penting perjuangan. Setelah itu, banyak aksi kaum tani yang mengklaim kembali tanahnya, gerakan melawan penggusuran, dan penolakan PHK.

Dapat disimpulkan bahwa, pertama, sejak zaman dahulu di Nusantara sudah dikenal istilah amuk massa secara spontan untuk melawan penindasan; kedua, materialisme historis menegaskan bahwa tingkat kesadaran massa paling dini adalah impresi. Lalu seberapa lama impresi aksi massa 1998 mampu diinternalisasikan oleh masyarakat yang masih lekat di pikiran mereka tentang semua stempel Orde Baru. Tak pelak banyak kalangan pragmatis mengatakan situasi tersebut sebagai amnesia kolektif dari masyarakat Indonesia.

Tanpa bermaksud menghakimi diri sendiri atau memberikan resep mujarab, perjuangan rakyat pekerja saat ini mulai menunjukkan adanya berbagai kreativitas dalam hal strategi dan taktik untuk menerjemahkan politik kelas dalam berbagai kondisi obyektif yang sesuai dengan masyarakatnya. Banyak praktik yang bisa dirujuk seperti tawaran unifikasi kiri-tengah, eksodus ke partai-partai yang platform-nya agak sama, atau pilihan kalangan LSM yang terinspirasi kemenangan Muspani dalam DPD bahwa untuk berkuasa harus bikin partai. Apa pun pilihan dan taktiknya, semua layak dicoba dalam koridor eksperimentasi politik kelas di Indonesia hari ini.

Daftar Rujukan

Cohen, Robert dan Peter C. W. Gutkind. 1979. Peasants and Proletarians: The Struggles of Third World Workers

Kleden, Ignas. 2003. 'Upper Class Luxury Destroying Civil Society'. The Jakarta Post March 13.

Machel, Samora. 1999. Pemimpin Visioner. Sahe Institut.

Mao Tse Tung. 1969. Mengubah Pelajaran Kita. Peking: Pustaka Bahasa Asing.

Petras, James. 2005. Strategi-strategi Perjuangan: Sentralisasi Gerakan Tani di Amerika Latin.

Pontoh, Coen Husein. 2004. Masyarakat Sipil sebagai agen Globalisasi. Jakarta: INSIST.

Sandbrook, Richard. 1975. Proletarians and African Capitalism: The Kenyan Case, 1960-1972. London: Cambridge University Press.

Wilson. 2003. Masyarakat dan Kelas Sosial di Indonesia. Jakarta.

Yayasan "Pembaruan" Jakarta. 1952. Kewajiban Front Persatuan Buruh.

MELEPAS PERBEDAAN, MENEMUKAN PERSATUAN RAKYAT PEKERJA DALAM ANCAMAN KRISIS

Analisis Kelas terhadap Dinamika Perjuangan Kelas Buruh dan Rakyat Pekerja

Dominggus Octavianus [1]

Abstract

Economic liberation in the slogan of "globalization" has evolved the social impacts felt directly by the levels of society. The political reaction representing the levels' interests have become the inevitable consequences. Unfortunately, such political reactions are still intermittent, undirected, and have even created horizontal conflicts. From the class perspective, the contradiction between different classes is an objective law derived from the different demands and interests of a society. The contradiction between labor and working people is of no exception as well. The reality, however, has shown that such contradictions are not principal, and are just the impacts of more fundamental situations. On the contrary, the interest similarities can be found in such social levels in order to run the mutual struggle, mainly as a unity of identity called working people.

Pendahuluan

Tekanan besar dari arus krisis ekonomi global sejak pertengahan 1997 berimbas pada hampir semua lapisan masyarakat, terutama pada lapisan bawah. Di satu sisi, situasi ini menghasilkan ekspresi politik yang variatif, bahkan saling berkontradiksi, antara unsur-unsur dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain, ekspresi politik yang berbeda tersebut dapat mencari muara bersama bagi perubahan kondisi yang mereka butuhkan.

[1] Staf Redaksi Tabloid *Pembebasan*. Sebelumnya bekerja pada Departemen Pendidikan dan Propaganda Pengurus Pusat Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PP FNPBI).

Dampak awal dari kebangkrutan industri adalah individu-individu yang kehilangan pekerjaan. Karena kasusnya yang begitu luas dan massal, hal ini tidak dapat lagi disebut fenomena. Selain itu, perpindahan penduduk dari pedesaan juga terus bertambah sejak produksi pertanian merosot, karena kehilangan kemampuan produksi dan tercaploknya pasar oleh komoditas pertanian impor. Bekerja pada sektor pertanian cenderung lebih merugikan, terutama bagi pertanian kecil yang lemah dalam permodalan. Mereka memilih keluar dari cara produksi lama dan mencari bentuk kerja yang lain di perkotaan, atau tetap di desa namun tidak sebagai produsen komoditas pertanian. Setelah meninggalkan cara produksi lama,[2] mereka kemudian terbagi ke dalam tiga pilihan, yakni masuk ke sektor industri dan menjadi buruh upahan, terutama pada industri berbasis teknologi rendah; menjadi tenaga kerja migran dengan kemampuan terbatas; atau masuk ke sektor informal atau menjadi pengangguran. Dalam sektor informal ini tiga asal-usul kelas bertemu, yakni: 1) kelas buruh yang tergusur dari tempat kerjanya; 2) borjuis kecil dan semi proletariat desa yang memilih ber pindah pekerjaan; dan 3) kelas bor juis kecil yang baru lepas dari asal-usul kelasnya dalam lingkungan keluarga dan menuju pasar tenaga kerja sebagai angkatan kerja baru.

Menarik realitas ini ke dalam kesimpulan teoretis, dapat dikatakan bahwa perkembangan situasi ekonomi-politik nasional dan internasional (krisis ekonomi) telah menghasilkan: 1) pola kerja dan hubungan sosial baru — meski tidak fundamental, yang pada situasi sebelumnya tidak tampak mencolok; 2) perubahan kuantitatif pada komposisi kelas-kelas sosial, antara lain menjamurnya pekerja pada sektor informal, pekerja pada *home industry*, sampai dengan kategori penduduk yang tidak melakukan kerja produktif apa pun (pengangguran terbuka).

Pekerjaan pada sektor informal dianggap sebagai alternatif di tengah

2 Perbandingan data tahun 1975 dan 1993 (satuan rumah tangga) menunjukkan jumlah petani turun dari 48% ke 30% rmt dan buruh tani turun dari 12% ke 10%. Sebaliknya bukan-petani di desa naik dari 18% ke 22%, di mana jumlah golongan atas di antara bukan-petani menjadi lebih besar dari bukan-petani golongan rendah. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, mayoritas dari mereka adalah angkatan kerja pada usia muda yang memiliki penilaian lebih kritis namun pragmatis terhadap potensi pengolahan pertanian di tengah situasi krisis.

kesulitan menemukan lapangan pekerjaan baru. Sebagai perbandingan, jumlah tenaga kerja di sektor formal menurun dari 37,9 persen di tahun 1996 menjadi 26,7 persen di tahun 2000 (Sekernas, dikutip dari Aloysius Gunadi Brata, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun II, No. 8 November 2003). Lebih lanjut, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2003, dari 88,1 juta penduduk yang bekerja, 64,4 persen di antaranya bekerja di sektor informal, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Namun, penghasilan pada lapangan ini relatif sama, atau di bawah pekerja sektor formal. Oleh karena itu, membengkaknya pekerja pada sektor informal sesungguhnya bukan karena "pilihan," namun tuntutan dari situasi ekonomi yang tidak memberikan alternatif yang lebih baik.[3]

Pergeseran-pergeseran kelas ini terjadi menyusul perubahan pada landasan ekonomi yang sedang berproses mundur, menuju kehancuran lebih lanjut. Perubahan tersebut terutama dalam rangka menyesuaikan landasan ekonomi Indonesia (dan negeri-negeri terbelakang lainnya) menurut kepentingan kekuatan korporasi-korporasi internasional di negeri Barat. Liberalisasi pasar (mata uang dan komoditas), privatisasi, pemotongan anggaran sosial (demi pembayaran utang dalam dan luar negeri), adalah bentuk-bentuk kebijakan yang melemahkan landasan ekonomi nasional. Semakin waktu bergerak semakin terlihat dan terasa proses kehancuran tersebut. Pada tataran sosial, dampak yang dihasilkan antara lain berupa pergeseran-pergeseran kelas sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Perubahan pada bentuk (bukan esensi) dari pola hubungan kerja dapat ditemukan dalam industri-industri manufaktur besar, yang dikenal dengan istilah *outsourcing*, yang semakin melemahkan daya tawar kelas buruh di hadapan pemilik modal. Sistem *outsourcing* ini menciptakan lapisan kelas pengusaha perantara, yaitu kelas pengusaha yang dipercaya oleh pemesan di negeri-negeri kapitalis maju (dikenal juga dengan istilah *buyers* atau induk korporasi) untuk memberikan *order* produksi komoditas tertentu kepada industri pengolahan. Posisi dan peran mereka (pengusaha perantara) berbeda dari kelas pengusaha yang langsung mengolah kegiatan pro-

3 Menurut hasil penelitian Edy Priyono (AKADEMIKA), pada tahun 1998 terdapat 19,7% pekerja yang tidak dibayar, atau naik 3,3 persen dibanding tahun 1997. Keseluruhan pekerja ini berada dalam kategori sektor informal.

duksi. Secara hierarkis, terdapat kelas kapitalis induk yang berada di luar negeri, kemudian kapitalis perantara yang menjadi pengatur pembagian *order* produksi, dan berikutnya kapitalis industri yang membeli tenaga kerja buruh untuk memproduksi *order*. Dengan demikian, kehadiran kapitalis perantara adalah penyematan satu tambahan mata rantai eksploitasi terhadap sebagian kelas buruh yang bekerja pada industri manufaktur. Tanggung jawab terhadap jaminan kerja kelas buruh juga menjadi tidak jelas, karena kelas pengusaha yang langsung berhadapan dengan buruh dapat menyalahkan pihak pengusaha perantara — yang tidak pernah diketahui oleh buruh — bila menemui suatu masalah. Kehadiran lapisan kapitalis perantara ini merupakan tuntutan dari kapitalis induk yang hanya berkepentingan pada efisiensi *cost* dan memperbesar laba, sehingga mengabaikan kebutuhan kesejahteraan kelas buruh.

Sistem *outsourcing* juga berdampak terhadap pekerja sektor informal yang mengerjakan produk yang dipesan kapitalis perantara. Salah satu alasan penting dari pengalihan *order* ini adalah karena biaya produksi yang relatif murah, termasuk biaya tenaga kerja, dibandingkan *cost* yang harus dikeluarkan pada sektor formal. Dalam kondisi perlindungan terhadap pekerja sektor informal yang masih sangat lemah, tidak heran jika mereka menjadi korban eksploitasi yang tak kalah memprihatinkan.

Bagi sektor informal yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan *outsourcing*, mereka dipaksa bersaing — bila tidak diredam — oleh kekuatan kelas kapitalis besar. Karena kalah dalam faktor modal, kemampuan mengakses pasar, dan faktor modernisasi struktur dan infrastruktur produksi serta pemasaran, maka proses persaingan tersebut menjadi tidak seimbang. Ketimpangan dalam kompetisi ini menggambarkan dominasi kelas yang kuat, yakni korporasi besar, terhadap yang lemah (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Dari paparan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Keberadaan kelas-kelas sosial pada lapisan bawah masih berada dalam ancaman krisis ekonomi dan represi politik, yang sewaktu-waktu dapat melempar mereka ke dalam situasi yang lebih sulit. Bentuk-bentuk ancaman ini semakin nyata dialami sehingga melahirkan resistensi, baik secara

spontan maupun terorganisasi.
2. Kelas buruh dan kelas pekerja sektor informal menghadapi kontradiksi terbuka dalam lingkup mikro, yang menjadi prioritas penyelesaian dalam jangka pendek.
3. Situasi rakyat pekerja saat ini ditentukan oleh korporasi-korporasi internasional. Dengan demikian, persamaan kepentingan antara kelas buruh dan kelas-kelas sosial lain adalah objektif.

Kesimpulan sementara di atas memiliki konsekuensi politis yang lebih jauh. Posisi dalam lapangan politik menjadi aspek yang penting karena di sini kepentingan-kepentingan riil dan hakiki dari semua kelas diperjuangkan. Dalam arena politik terjadi pertarungan untuk memperoleh kekuasaan, dan selanjutnya, dengan kekuasaan itu setiap kebijakan dapat diaplikasikan menurut kepentingan kelas yang menangani pertarungan tersebut.

Masalahnya adalah saat ini kita perlu mengukur pemahaman atau kesadaran politik kelas buruh dan kelas pekerja lain, yang menjadi panduan bagi tindakan pengorganisasian rakyat pekerja. Alat ukur untuk keperluan tersebut adalah penilaian terhadap tindakan-tindakan konkret dalam pergerakan, seperti: program, perkembangan organisasi-organisasi, aksi-aksi, aliansi, bacaan dan diskusi teoretis, serta keseluruhan pengalaman berjuang. Namun, pada tataran konservatif, kesadaran politik juga ditentukan oleh perkembangan basis ekonomi-politik yang melingkupi mereka sehari-hari. Oleh karena itu, tinjauan terhadap potensi politik rakyat pekerja secara keseluruhan, termasuk pembangunan komunitas sebagai salah satu langkah penguatan politik, akan berangkat dari dua aspek, yaitu ekonomi dan politik.

Kelas Buruh dan Rakyat Pekerja: Sebuah Pengertian

Sebelum memulai pembahasan, perlu kami kemukakan argumentasi mengapa pendekatan kelas-lah yang digunakan untuk menilai dinamika politik kelas buruh dan rakyat pekerja. Doug Lorimer dalam artikelnya "Kelas-Kelas Sosial dan Perjuangan Kelas" mengatakan:

> *Di antara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama dan jelas adalah pengelompokan berbasis kelas. Pertama, kelas-kelas itu tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar, yaitu dari relasi masyarakat/manusia dengan alat-alat produksi yang menentukan relasi-*

relasi lainnya. Kedua, kelas merupakan pengelompokan sosial yang paling kuat dan paling banyak keanggotaannya di tengah masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangannya amat mempengaruhi jalannya seluruh sejarah kehidupan sosial, politik, dan ideologi masyarakat.

Pandangan marxian menempatkan produksi sosial sebagai syarat utama keberadaan ras manusia, disamping proses reproduksi. Dalam proses produksi tersebut, terjadi interaksi antara manusia dengan alam dan antara sesama manusia. Interaksi antara sesama manusia disebut hubungan sosial produksi. Kelas-kelas sosial muncul ketika hubungan sosial produksi antara manusia menjadi tidak setara akibat adanya kepemilikan/penguasaan pribadi terhadap alat produksi.[4] Dalam perkembangannya, kontradiksi antarkelas menjadi catatan panjang sejarah masyarakat berkelas, terutama antara kelas yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi dan kelas yang memiliki dan menguasai alat produksi. Kelas yang tidak memiliki alat produksi dipaksa oleh tuntutan kelanjutan hidup sehingga, secara sadar atau tidak sadar, menjalin suatu hubungan produksi yang tidak setara dan menjadi kelas yang tereksploitasi. Kontradiksi-kontradiksi antar-kelas ini melahirkan suatu susunan sosial baru dalam sejarah peradaban manusia.[5]

Masyarakat berkelas tempat terjalinnya hubungan kerja antara kelas pemilik alat kerja dengan yang tidak bermilik telah berlangsung selama ribuan tahun. Dalam era modern, karena kemampuan hegemonik kelas berkuasa melalui semua perangkat ideologinya, maka kondisi eksploitasi tersebut diterima (atau dipaksa untuk diterima) oleh mayoritas anggota masyarakat sebagai

4 Menurut Frederich Engels, terdapat tiga sebab adanya kepemilikan pribadi: 1) penimbunan kekayaan oleh kelompok/individu tertentu dalam masyarakat komunal, sehingga berhasil menguasai kelompok lain melalui jerat utang; 2) adanya penaklukan oleh suatu kelompok komune terhadap komune lain, kemudian yang takluk dijadikan budak; serta 3) dalam konteks asiatik, adanya pembagian/pemisahan kerja antara kerja produksi dengan kerja nonproduksi (administrasi dan organisasi). Bentuk kerja ini kemudian dikelompokkan, dan akhirnya terbentuklah kelompok yang menguasai ilmu pengetahuan, organisasi, dan administrasi yang kemudian bertransformasi menjadi kelas pemilik alat produksi.

5 Termasuk kelahiran kapitalisme merupakan buah kontradiksi antara kelas tuan tanah feodal, dengan kelas pengrajin/*artisan* serta kelas tani tak bertanah yang mulai bertransformasi menjadi kelas pekerja modern. Penemuan mesin uap juga merupakan jawaban atas tuntutan fase awal kapitalisme untuk meningkatkan jumlah produksi komoditas (penemuan mesin uap merupakan salah satu fase terpenting bagi perkembangan tenaga produktif kapitalisme), sehingga mampu mengakumulasi kekayaan jauh lebih besar dan lebih cepat dibanding kelas tuan tanah feodal.

sesuatu yang alamiah. Penerimaan terhadap hubungan kerja tersebut selanjutnya berdampak pada bentuk-bentuk hubungan yang lebih spesifik, yang dalam masyarakat modern diatur oleh negara melalui produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Negara tidak bertindak sebagai 'fasilitator' bagi kelas-kelas yang berkontradiksi. Dari perspektif kelas, negara memiliki sikap politik yang disesuaikan terhadap kepentingan kelas yang menguasainya.[6]

Kelas buruh lahir dalam sebuah fase perkembangan masyarakat dengan syarat-syarat perkembangan tenaga produktif dan hubungan produksi modern, yang disebut kapitalisme. Selain kelas buruh dan kelas kapitalis sebagai kelas fundamental, dalam sistem kapitalisme juga terdapat kelas-kelas sosial yang lain atau kelas non fundamental. Kelas-kelas sosial yang lain ini tidak berada dalam sebuah hubungan produksi langsung untuk memproduksi komoditas dalam corak kapitalisme. Mereka berada dalam corak produksi prakapitalisme (terutama corak produksi feodalisme) atau kapitalisme tahap awal yang belum berkembang atau tidak berhasil dilumat oleh perkembangan kapitalisme.[7] Peran kelas-kelas sosial ini dalam rantai ekonomi kapitalisme adalah sebagai faktor pendukung, bila bukan sebagai faktor penghambat, dengan mengisi peran ekonomi yang belum dapat diisi oleh kapitalisme. Contoh kelas-kelas sosial tersebut adalah: petani dengan alat produksi sederhana dan lahan sempit, buruh tani, pekerja artisan (kerajinan), pekerja pada industri mikro dan kecil,[8] pedagang kecil atau pengecer, dan sebagainya.

Keberadaan penduduk yang bekerja pada sektor informal memang tidak mewakili satu kesatuan kelas sosial. Atau, dengan istilah lain, sektor informal tidak dapat didefinisikan sebagai satu kelas sosial tersendiri. Dalam suatu kegiatan ekonomi,

---

6 V.I. Lenin, dalam bukunya (The State and Revolution) Negara dan Revolusi menyebutkan negara sebagai instrumen penindas dari kelas berkuasa.

7 Dikenal dengan istilah *uneven development of capitalism*, atau perkembangan kapitalisme yang tidak seimbang, sebagai akibat pemaksaan penerapan (pencangkokan) sistem ekonomi kapitalis ke dalam masyarakat yang masih berada dalam fase feodalisme, atau melalui kolonialisme. Perkembangan berbeda terjadi di negeri-negeri Barat, yang perkembangan kapitalismenya lahir dari proses penghancuran terhadap corak produksi lama (feodalisme).

8 Menurut kategori yang dibuat oleh Deperindag, jenis usaha dibagi ke dalam empat jenis, yaitu: usaha mikro dengan jumlah pekerja antara 2-5 orang, usaha kecil dengan jumlah 6-15 orang, usaha menengah 25-99, dan usaha besar dengan jumlah pekerja diatas 100 orang.

sektor ini bisa ditemukan dalam lapisan-lapisan kelas sosial yang berbeda, mulai dari pemilik usaha, pekerja yang diupah, dan pekerja yang tidak diupah. Dalam terminologi marxisme, komposisi sektor ini terdiri atas gabungan kelas semi-proletariat dan borjuis kecil.

Secara teoretis, kuantitas dan kualitas produktivitas kelas buruh dalam sistem kapitalisme melebihi kelas sosial lain, karena tenaga produktif (manusia, alat produksi, manajemen kerja) memiliki kemampuan yang lebih unggul dibanding corak produksi masyarakat prakapitalis. Ini diperkuat oleh data pemerintah yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1993 sumbangan sektor industri manufaktur dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah melampaui sektor pertanian (Lihat Tabel 1). Kelas sosial yang lain memiliki produktivitas tertentu dan turut memberikan andil dalam memenuhi kebutuhan sosial.

Tabel 1
PDB Indonesia Menurut Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Berbagai Tahun

PDB	1969	1974	1979	1984	1989	1993	1998	2000 (III)

Sumber: BPS berbagai tahun

Terminologi rakyat pekerja lahir untuk membentuk kesatuan identitas pada kelas-kelas yang berbeda namun memiliki kontribusi kerja sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara ideologi dan politik, terminologi ini sekaligus memberikan batasan terhadap kelas sosial lain yang tidak memberikan konstribusi kerja sosial terhadap masyarakat. Kelas-kelas sosial ini secara tidak terhindarkan memiliki kontradiksi, namun kontradiksi tersebut tidak fundamental, atau hanya ekses dari situasi yang lebih mendasar, yakni eksploitasi kelas kapitalis besar.

Analisis kelas mendapatkan kesimpulan bahwa setiap tindakan atau pilihan politik dilandasi pada kepentingan kelasnya. Penolakan atas analisis dari perspektif ini kerap muncul dengan beberapa argumentasi. Pertama, tindakan atau pilihan politik dapat dilandasi oleh kesamaan faktor nonkelas (dalam pengertian marxisme), misalnya kesamaan etnis, gender, agama, dan lain sebagainya. Kedua, dalam perkembangan kapitalisme mutakhir, analisis dari perspektif kelas telah kehilangan konteks, karena kapitalisme mutakhir telah menghilangkan perbedaan kelas dengan munculnya lapisan menengah dalam masyarakat kapitalis.

Selain salah secara substantif, argumentasi-argumentasi itu pun mengandung sejumlah kelemahan. Benar bahwa faktor nonkelas juga tampak menjadi alasan pilihan politik seseorang, tetapi alasan tersebut hanyalah penampakan dari sesuatu yang lebih esensi. Misalnya dalam kasus fasisme Hitler yang mengunggul-unggulkan ras Arya atas ras manusia lain di dunia. Perbedaan ras di sini adalah penampakan dari kepentingan kelas kapitalis Jerman yang membutuhkan penguasaan dan perluasan modal ke daratan Eropa dan negeri-negeri koloni. Kelas kapitalis Jerman berhasil memanipulasi kesadaran massa rakyat, termasuk rakyat pekerja, untuk mendukung kepentingan-kepentingan kelas penguasa. Penilaian serupa dapat diberlakukan pada kasus-kasus yang menampakkan sikap politik atas pengelompokan agama. Lahirnya fundamentalisme pada keyakinan religius adalah salah satu bentuk ekspresi politik yang tampak, yang sesungguhnya berakar pada kepentingan ekonomi-politik kelas yang menggerakkannya. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui pengusutan terhadap asal-usul konflik yang meng-

angkat sentimen agama. Dan sekali lagi, manipulasi terhadap kesadaran massa adalah cara yang paling efektif untuk menghasilkan dukungan dari masyarakat terhadap gagasan tertentu. Kekuatan analisis dari perspektif kelas adalah kemampuannya untuk menembus selubung-selubung yang menjadi penampakan dari suatu gejala.

Berikutnya, perkembangan kapitalisme mutakhir sama sekali tidak menghilangkan keberadaan kelas sosial. Perkembangan kapitalisme hanya memberikan syarat-syarat baru dalam hubungan buruh upahan dan majikan, bahwa kelas kapitalis tidak lagi memiliki peran sosial dalam proses produksi, karena semua peran dalam produksi dan distribusi telah dilaksanakan oleh buruh upahan.[9]

Deindustrialisasi Nasional dan Posisi Kelas Buruh

Pada tahun 1998 pertumbuhan industri nasional anjlok ke angka minus, (-)13,10% dibandingkan pada tahun 1996 yang mencapai 11,66%. Pada tahun-tahun selanjutnya belum terlihat pemulihan yang signifikan, bahkan kembali terancam oleh berbagai kebijakan makro ekonomi dari pemerintah, seperti pencabutan subsidi BBM. Berturut-turut selama tiga tahun terakhir 2001-2003 pertumbuhan sektor industri hanya mencapai 3,95%, 3,68%, dan pada tahun 2003 turun jadi 2,83%.[10]

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perhitungan menunjukkan dalam periode 1988-1997, pertumbuhan tenaga kerja di sektor manufaktur rata-rata 7,1%. Daya serap ini mengalami penurunan drastis setelah krisis (1998-2002) menjadi rata-rata 1,9%. Bahkan, untuk tahun 2002, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur hanya 0,2%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tahun 2001 (3,8%). Persentase tersebut jelas tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja baru serta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik dan relokasi. Sebagai contoh, sejak tahun 2001 sampai bulan Juli 2002 jumlah buruh yang resmi diputuskan ter-PHK di sektor

9 Dalam masyarakat kapitalis mutakhir, semakin sulit ditemukan keberadaan kelas kapitalis yang sekaligus berperan dalam proses produksi, misalnya pada posisi direktur. Sebagian besar kelas kapitalis memilih berada di luar struktur perusahaan dan menggunakan hasil akumulasi kapitalnya untuk dipertaruhkan dalam pasar saham atau mata uang.

10 Sumber Data: Departemen Perindustrian.

TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) mencapai 33.894 orang. Sejalan dengan itu, asumsi penurunan yang sama dapat dikenakan pada sektor-sektor industri lain yang juga didera krisis, seperti industri perkayuan (termasuk mebel), industri baja, timah, dan beberapa sektor agrikultur.

Paparan di atas diperkuat oleh situasi investasi langsung yang sangat rendah. Investasi asing yang masuk, atau *foreign direct investment* (FDI), pada 1995 pernah membukukan angka US$ 40 miliar, namun tahun lalu hanya mencapai US$ 9,7 miliar. Untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), pernah mencapai puncaknya pada 1997 sebesar Rp 119,9 triliun. Tetapi sejak krisis melanda Indonesia, nilai persetujuan keduanya terus melorot sampai senilai Rp 25,3 triliun. Pertumbuhan investasi ini pun lebih didasarkan kepada gerak konsumsi, sehingga investasi baik domestik maupun asing memilih masuk ke sektor nonmanufaktur seperti jasa, perdagangan (pembangunan pusat-pusat perbelanjaan), dan properti. Berikutnya, penggunaan kapasitas produksi baru mencapai 70 persen dari kapasitas terpasang. Artinya, masih ada sekitar 30 persen lainnya yang menganggur (*idle capacity*). Menurut survei Bank Dunia, dalam periode 1996-1998, kapasitas produksi korporasi di Indonesia mengalami penurunan 21%.

Penyebab utama dari gejala kehancuran industri ini adalah fundamen perekonomian nasional yang rapuh, karena berdiri di atas ketergantungan pada modal asing dan substitusi impor (lihat tabel 2) serta menyesuaikan jenis produk komoditas dengan kebutuhan pasar internasional, yang merupakan suatu bentuk ketergantungan lain, yakni ketergantungan pasar. Ketergantungan ini berakibat fatal ketika tuntutan negeri-negeri kapitalis Barat — tempat segala sesuatu bergantung — berubah, karena pola hubungan yang terjadi saat ini tidak lagi mencukupi akumulasi keuntungan di negeri mereka. Masalah substitusi impor terbentur merosotnya nilai mata uang nasional terhadap dolar AS, dan berikutnya masalah pemasaran berbenturan dengan persaingan produk negara-negara berkembang lainnya. Untuk kepentingan persaingan tersebut, setiap pemodal berusaha menekan cost serendah mungkin, termasuk labour cost, sehingga berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan buruh.

Tabel 2
Kandungan Impor Industri Indonesia Tahun 1994

No	Sektor Industri	%

Sumber: Sri Mulyani Indrawati dalam Rachbini, 2000

Sejumlah kebijakan makro ekonomi yang lain turut memberikan andil terhadap gejala deindustrialisasi ini, di antaranya adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan setiap tahun serta liberalisasi perdagangan. Kenaikan harga BBM berdampak negatif terhadap sebagian besar industri, terutama yang menggunakan BBM sebagai salah satu bahan baku industrinya. Sementara itu liberalisasi perdagangan menghasilkan kompetisi yang tidak setara antara produsen dalam negeri yang kalah dalam hal modal dan teknologi — yang berpengaruh terhadap kompetisi harga komoditas — dibanding produsen asing.

Dampak-dampak dari kondisi di atas terhadap kelas buruh dan seluruh rakyat pekerja antara lain:

Pertama, terlihat jelas bahwa semakin banyak kelas pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hal ini tidak sebatas kehilangan atas penghasilan untuk kelanjutan hidupnya, namun juga kehilangan hak untuk berkarya sebagai manusia yang produktif. Pada tahun 2002 Depnakertrans mendata sejumlah 114.933 buruh yang ter-PHK. Kemudian di tahun 2003 sedikit menurun menjadi 110.145 buruh. Jumlah tersebut tidak termasuk 30-50% perkara yang belum diputuskan oleh pihak P4P, namun telah diputuskan secara

sepihak oleh pihak perusahaan. Salah satu faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya PHK adalah sistem *outsourcing* yang disahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 13 Tahun 2003. Sistem ini mengabaikan perlindungan terhadap jaminan pekerjaan. Buruh hanya dipekerjakan selama masih produktif dan bersaing dengan tenaga-tenaga lain. Apabila kemampuannya sudah melemah atau tidak memenuhi standar perusahaan, buruh akan dilempar dari *labour market*, tanpa pesangon dan tanpa pensiun.

Kedua, posisi tawar serta harga tenaga kerja kelas buruh menurun. Dalam kapitalisme, tenaga kerja dinilai sebagai salah satu jenis komoditas atau barang modal yang akan menghasilkan nilai baru bagi produk komoditas yang diciptakan. Dengan pasokan tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding permintaan, maka sesuai hukum pasar, harga tenaga kerja cenderung menurun. Tekanan terhadap upah secara langsung berpengaruh terhadap menurunnya daya beli. Tekanan terhadap daya beli berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi sehingga kelas kapitalis menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk menjangkau pasar pada tataran penghasilan yang minim sekalipun. Misalnya, pemasaran komoditas dengan sistem kredit yang bersedia melepas barang tertentu dengan harga yang sangat murah, namun menekan pembeli melalui kewajiban pembayaran bulanan. Atau, dengan cara memecah suatu komoditas tertentu ke dalam kemasan yang lebih sederhana dan lebih kecil/sedikit untuk menjangkau target pasar yang berpenghasilan rendah.

Ketiga, tuntutan kompetisi industri mengharuskan adanya efisiensi produksi, termasuk *cost* untuk upah buruh. Meski nilai nominal mengalami kenaikan dalam beberapa tahun ini, upah riil terus menurun seiring meningkatnya harga barang kebutuhan. Dalam situasi kompetisi yang semakin sengit, perusahaan-perusahaan induk (*buyers*) hanya bersedia membeli produk dengan harga yang serendah mungkin, dan salah satu *cost* yang harus ditekan adalah upah buruh, di samping pajak, infrastruktur, dan lain-lain. Tuntutan persaingan juga meningkatkan eksploitasi terhadap buruh dalam hal peningkatan jumlah dan kecepatan produksi, yang berkonsekuensi pada jam kerja. Dalam beberapa kasus dapat ditemukan buruh yang melakukan kerja lembur sampai 24 jam sehari. Tuntutan kerja seperti ini

berdampak pada teralienasinya buruh dari lingkungan sosial dan terabaikannya hak berserikat dan berkumpul. Situasi ini juga menjadi kritik (atau bantahan) serius terhadap pandangan yang menyatakan bahwa produktivitas kelas buruh menurun, sementara *cost* yang dikeluarkan untuk upah meningkat, oleh salah satu lembaga penelitian ternama di negeri ini. Pernyataan tersebut cenderung menyalahkan kelas buruh karena menuntut perbaikan kondisi mereka, yang berdampak pada masalah ekonomi yang lebih luas, seperti penanam modal menjadi enggan untuk masuk, kemampuan industri/dunia usaha merekrut tenaga kerja baru menurun, dan pernyataan-pernyataan sejenis lainnya.

Keempat, dampak lebih luas adalah yang dialami oleh semua rakyat pekerja, kelas buruh, dan kelas pekerja lain. Deindustrialisasi berakibat menyempitnya lapangan para pencari kerja. Ketika gagal memperoleh pekerjaan dalam sektor formal,[11] karena peluangnya yang menyempit, para pencari kerja ini kemudian masuk ke sektor informal dan menunggu peluang selanjutnya untuk memperoleh perkerjaan pada sektor formal. Sektor informal sendiri memiliki kerentanan dalam persaingan ekonomi yang semakin menajam. Argumentasinya adalah, pertama, banjir produk impor yang menjadi pesaing pada produsen sektor informal; kedua, persaingan memperebutkan pasar membawa dampak tingkat kejenuhan pasar semakin cepat mencapai puncaknya; ketiga, dengan penguasaan saham perbankan oleh asing, maka pemerintah — sekalipun memiliki komitmen memajukan sektor ini — tidak dapat mengontrol alokasi kredit untuk permodalan tersebut. Bank-bank yang telah dikuasai oleh asing akan lebih berkepentingan mengucurkan kredit bagi sektor yang memiliki kemampuan permodalan yang lebih tinggi, untuk menghindari risiko kredit macet. Karena kerentanan tersebut, perkembangan sektor informal cenderung mengalami nasib yang sama dengan sektor formal. Benar bahwa pertumbuhan sektor informal mengalami peningkatan jumlah unit kerja dalam dua tahun terakhir, namun situasi tersebut lebih menyerupai fenomena, yang sementara waktu dapat dimanfaatkan untuk mengisi kontribusi terhadap

[11] Pandangan umum masih mengasumsikan sektor formal lebih memberikan jaminan stabilnya tingkat penghasilan.

PDB yang menurun dari sektor formal.

Komunitas, Menemukan Kesatuan Kepentingan dalam Tekanan Krisis

Masalah komunitas adalah masalah kesatuan penduduk pada teritori tertentu yang memiliki latar belakang kelas yang beragam. Pengorganisasian berdasarkan komunitas menuntut kemampuan untuk menemukan persamaan-persamaan dari kelas-kelas yang berbeda, untuk menghasilkan suatu kekuatan tertentu. Untuk menghindari kerancuan tafsir, maka istilah komunitas di sini perlu dibuat lebih spesifik, yakni komunitas yang terdiri atas kelas buruh industri, semi proletariat, dan borjuis kecil miskin. Kecuali pada industri agrikultur, yang umumnya melokalisasi pemukiman buruhnya di sekitar perkebunan, buruh pada sektor-sektor industri yang lain cenderung membaur ke dalam komunitas yang terdiri atas beragam kelas sosial. Dari segi lokasi, buruh industri lebih dekat ke daerah pinggiran kota, sedangkan buruh jasa penyebarannya lebih merata.

Ada dua hal yang harus dijawab dalam mengorganisasikan komunitas, yang satu berkualifikasi prinsipil dan lainnya kualifikasi teknis. Hal yang prinsipil adalah menemukan kesamaan problem dan isu untuk dijadikan pembahasan bersama dalam komunitas, dan menemukan jalan keluar bersama. Sementara itu, hal teknis yang perlu dilakukan adalah menemukan metode pengorganisasian, bentuk organisasi komunitas, dan jenis aktivitas untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam satu komunitas.

Dalam komunitas-komunitas dengan pengertian yang spesifik seperti disebutkan di atas, isu kesejahteraan atau jaminan atas kesejahteraan adalah problem yang dirasakan merata dan mendesak oleh sebagian besar anggotanya.[12] Isu kesejahteraan tersebut kadang berangkat dari problem yang khusus dan spesifik, sehingga secara formal memberikan batasan-batasan untuk suatu perjuangan bersama. Sekalipun menurut logika ekonomi masalah-masalah yang tampak di permukaan tersebut

12 Survei yang dilakukan Bank Dunia bekerja sama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (September-Oktober 1998) menegaskan bahwa persoalan pengangguran, hilangnya penghasilan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau harus segera mendapatkan penyelesaian (Watterberg dkk., 1999).

bersumber pada penyebab yang sama, logika tersebut belum tentu dapat langsung dipahami oleh anggota komunitas. Misalnya, buruh yang menghadapi problem PHK dan pekerja konveksi yang menghadapi problem ketiadaan jaminan sosial. Masing-masing akan menganggap itu sebagai dua persoalan yang terpisah, sehingga cara penyelesaiannya pun dilakukan secara terpisah. Penjelasan terhadap suatu masalah yang belum dipahami oleh komunitas adalah penting, bahkan perlu terus ditingkatkan intensitasnya melalui berbagai kegiatan diskusi, bacaan, dan sebagainya. Namun, pada batas-batas tertentu, sebuah komunitas membutuhkan penyesuaian terhadap situasi kesadaran obyektif untuk menemukan sebuah kesepakatan atau tindakan bersama. Ketika identifikasi terhadap isu tersebut dilakukan, perlu dijelaskan kepentingan-kepentingan dari berbagai sektor terhadap isu yang diusung, baik kepentingan mendesak langsung ataupun kepentingan jangka panjang.

Cara menemukan aspek-aspek yang sama dalam suatu komunitas dapat dimulai dari diskusi-diskusi mengenai masalah yang dihadapi bersama. Umumnya, masalah bersama tersebut berhubungan dengan kebijakan publik, yang tidak hanya berimbas pada sektor tertentu, namun menyebar merata. Misalnya kebijakan mengenai subsidi sosial (pendidikan dan kesehatan), subsidi BBM, masalah korupsi, sampai dengan masalah sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah-masalah teknis, dibutuhkan jawaban yang praktis. Jawaban praktis tersebut sulit untuk dikembangkan secara rinci dalam paparan ini, karena berhubungan dengan dinamika lapangan yang dapat berubah-ubah. Namun beberapa hal yang bersifat umum sekiranya dapat menjadi pegangan awal untuk bertindak, yaitu:

1. Hal waktu
   Karena terdiri atas beragam kelas dan profesi, proses mengumpulkan dan membentuk organisasi komunitas mungkin akan menghadapi kesulitan dalam hal waktu untuk berkumpul. Masalah ini dapat disiasati antara lain dengan membuat pertemuan-pertemuan terpisah, yang pengelompokkannya berdasarkan kesiapan setiap individu meluangkan waktu, atau tidak berdasarkan sektoral. Pertemuan-pertemuan terpisah tersebut akan disatukan pada saat tertentu ketika seluruh

komunitas atau perwakilan komunitas diminta meluangkan waktu bersama.

2. Hal organisasi
   Selain mencakup teritorial, pengorganisasian menurut komunitas juga bersifat multi-sektoral. Karena itu, penggunaan alat berupa organisasi sektoral (seperti serikat buruh) mungkin menjadi tidak sesuai. Rumusan konsepsi organisasi setidaknya perlu memperhatikan kriteria-kriteria berikut: a) mampu menjangkau semua lapisan rakyat pekerja; b) mampu mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota ke dalam kegiatan-kegiatannya; c) mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah kolektif yang dihadapi oleh anggota, atau bila perlu sampai menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi; d) mampu memfasilitasi kebutuhan anggota akan ilmu pengetahuan dan pengembangan kapasitas kolektif.
3. Jenis dan bentuk kegiatan
   Jenis dan bentuk kegiatan sedapat mungkin melibatkan sebanyak-banyaknya anggota, karena setiap kegiatan positif akan sangat berguna bagi kemajuan kesadaran dan solidaritas anggota. Bentuk-bentuk yang lebih spesifik adalah keputusan anggota yang dilihat berdasarkan kebutuhan komunitas setempat.

Penutup

Pengalaman perjuangan sejak tahun 1998 adalah modal penting bagi perjuangan kelas buruh ke depan. Persatuan dan pembaruan ke dalam komunitas merupakan sebuah langkah politik untuk menguatkan posisi kelas buruh, sekaligus memberikan dan mendapatkan dukungan dalam perjuangan pada lingkup yang lebih khusus. Bagi kelas pekerja lain yang belum terbiasa berjuang melalui organisasi tertentu, kesempatan ini adalah peluang mengembangkan kapasitas politik.

Perkembangan ekonomi-politik, sejauh tidak ada perubahan yang fundamental dari pemerintah, akan menghasilkan sejumlah masalah sosial baru yang harus dihadapi oleh rakyat pekerja secara keseluruhan. Mengorganisasikan masyarakat dalam komunitas adalah salah satu langkah antisipasi dan penguatan dalam menghadapi masalah tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa selain melampaui batas sektoral dalam teritori tertentu, pengorganisasian komunitas rakyat pekerja juga perlu diperluas dalam suatu jaringan dan

koordinasi. Ini setidaknya tindakan yang dapat dilakukan oleh rakyat pekerja.

Daftar Istilah:

1. ***Proletariat***: Kelas sosial yang tidak memiliki alat produksi sendiri sehingga harus menjual tenaga kerjanya kepada kelas pemilik alat produksi, dalam corak produksi masyarakat kapitalis. Produksi kapitalis mensyaratkan aspek perkembangan teknologi dan manajemen pada kualifikasi tertentu sehingga tidak seluruh kelas sosial yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja untuk kelas pemilik alat produksi dapat disebut proletariat.
2. ***Semi Proletariat***: golongan kelas sosial yang tidak memiliki alat produksi sendiri, sehingga bekerja dan menerima upah dari suatu hubungan produksi dalam corak produksi prakapitalisme atau kapitalisme tahap awal. Kelas ini umumnya berproses menjadi kelas proletariat.
3. ***Borjuis kecil***: kelas sosial yang memiliki alat produksi sendiri dan terlibat dalam kerja porduksi. Dalam perkembangan kapitalisme, kelas ini cenderung berproses menjadi kelas borjuis.
4. ***Kelas fundamental***: adalah kelas-kelas yang dilahirkan dari corak produksi yang berlaku, atau kelas-kelas yang tidak mungkin kita temukan di bawah corak produksi tertentu/lainnya. Kontradiksi mendasar dari corak produksi yang berlaku terwujud dalam pola hubungan dan pola perjuangan antarkelas. *Semua corak produksi yang antagonistik bisa ditunjukkan dengan adanya dua kelas yang secara fundamental saling bertentangan.*
5. ***Tenaga produksi***: tenaga produksi adalah gabungan antara faktor-faktor produksi (termasuk alat produksi) dengan tenaga kerja manusia yang menggerakkannya. Tenaga produksi merupakan elemen yang paling *mobile* dalam masyarakat. Mereka terus-menerus berubah sebab manusia terus-menerus meningkatkan alat-alat kerja (teknologi) dan mengumpulkan pengalaman-pengalaman dalam berproduksi.
6. ***Corak produksi***: suatu kesatuan antara tenaga produksi dan hubungan produksi yang mencirikan cara dan karakter produksi masyarakat pada fase tertentu. Misalnya, fase masyarakat kapitalisme memiliki corak produksi berupa: 1) hubungan produksi antara kelas buruh dan kelas kapitalis; 2) menggunakan tenaga

produksi yang modern, dengan penggunaan teknologi serta kapasitas manusia yang menggunakan alat produksi tersebut.

Daftar Rujukan

Edy Priyono. 2000. "Mengapa Angka Pengangguran Rendah di Masa Krisis? Menguak Peran Sektor Informal sebagai Buffer Perekonomian" <http://akademika.or.id/arsip/Pengangguran-Edy.pdf> (19 September 2005).

Frederich Engels. 2004. Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara. Jakarta: Kalyanamitra.

Kompas. 2004. 'Sektor Manufaktur Mulai Menyerap Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian'. 16 Juni.

Lourimer, Doug. 2000. "Kelas-Kelas Sosial dan Perjuangan Kelas." Jurnal Kiri Tahun 1 Nomor 1: 4 42 .

M. Khusaini. 2001. "Refleksi Perjalanan Ekonomi Indonesia (Tinjauan Kritis atas Fundamental Ekonomi)." Lintasan Ekonomi Volume XVIII Nomor 1, Januari 2001 : 40 47.

PERUMAHAN BAGI RAKYAT PEKERJA: PERDEBATAN, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI

Yudi Fajar Margono Wahyu [1]

Abstract

The description illustrates the importance of housing matter. Not only for the labors but also for the working people, since a house is not seen only as a room for private activities, but give important impacts towards the process of assets accumulation. It is started from home that labors go to work and go back again in order to do more jobs the following days. A house is the place for the working people to reproduce and develop.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Perumahan tidak sekadar dalam arti bangunan semata, tetapi lebih pada tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan manusia (*human settlement*). Di sana terdapat tempat untuk menjalankan aktivitas keseharian mulai dari pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sarana transportasi, sarana kesehatan, tersedianya infrastruktur jalan, penerangan jalan, selokan, tersedianya ruang untuk aktivitas publik (fasilitas umum dan fasilitas sosial), dan terjaminnya keamanan bagi para penghuni. Perjuangan untuk memperoleh rumah yang layak sebaiknya tidak hanya menjadi perjuangan segelintir orang saja. Perjuangan masalah kesejahteraan telah menjadi perdebatan sengit di antara serikat buruh sejak awal 1920-an di Indonesia.

1 Penulis merupakan staf pengajar tidak tetap di Departemen Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Politik Perkotaan. Kontak bisa melalui email: satukota@yahoo.com

Perdebatan dalam Serikat Buruh: Masalah Upah vs Kesejahteraan

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, serikat-serikat buruh di Indonesia telah dengan sengit memperdebatkan hal-hal yang patut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam gerakan buruh. Pandangan yang paling utama adalah serikat-serikat buruh seharusnya tidak hanya peduli dengan masalah perbaikan upah dan kondisi kerja para buruh, melainkan juga dengan kesejahteraan para anggotanya. Pandangan ini memperoleh tantangan dengan adanya pendapat bahwa semangat perjuangan yang ada di antara para pekerja tidak boleh ditumpulkan oleh adanya tindakan yang hanya mengurangi kemiskinan tetapi tidak menghilangkan sebab pokoknya. Pada masa itu, perjuangan dasar serikat buruh adalah meningkatkan upah dan kondisi kerja, dengan daya tarik tambahan yang penting yaitu layanan kesejahteraan dengan membentuk koperasi, dana untuk kecelakaan, dan kesehatan.[2]

Pada masa pasca-Soeharto, serikat-serikat buruh yang ada di Indonesia masih juga memfokuskan diri pada perjuangan upah dan perbaikan kondisi di tempat kerja. Persoalan kesejahteraan belum menjadi prioritas utama, termasuk mengenai pengadaan perumahan pekerja. Ada federasi serikat buruh yang melihat tanggung jawab pengadaan perumahan pekerja terletak di tangan perusahaan, tetapi ada pula yang menyerahkan tanggung jawab tersebut pada negara.

Peran yang diambil oleh federasi serikat buruh menjadi bermacam-macam. Federasi serikat buruh yang melihat tanggung jawab pengadaan perumahan terletak di tangan perusahaan, menyerahkan urusan itu pada pengurus unit kerja (PUK) tingkat pabrik sehingga salah satu perjuangan utama PUK adalah memasukkan tuntutan kesejahteraan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama dalam negosiasinya dengan perusahaan. Sedangkan federasi serikat buruh yang melihat pengadaan perumahan pekerja sebagai tanggung jawab negara terbagi menjadi dua sikap, yaitu tidak berupaya sama sekali terlibat dalam pengadaan rumah bagi anggotanya dan ada pula yang memainkan peran dengan mengadakan

2 John Ingleson. 2000. "Sarekat Buruh dan Penyediaan Jaminan Sosial di Jawa Masa Kolonial" dalam Iskandar P. Nugraha (ed.).2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja, dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 153-159

kerja sama dengan salah satu institusi negara.[3]

Perumahan: Tantangan Terhadap Serikat Buruh dan Rakyat Pekerja

Melalui pemaparan di bawah ini, penulis ingin memperlihatkan bahwa ada ruang yang belum dimanfaatkan serikat buruh dan rakyat pekerja di Indonesia. Pengadaan perumahan bagi buruh mempunyai dua dampak, yaitu sebagai tempat reproduksi tenaga kerja dan pembangunan komunitas. Kerja sama antara buruh dengan rakyat pekerja diperlukan untuk menghadapi struktur pembagian kerja yang semakin fleksibel (kepentingan modal) dan menyatukan kepentingan (melalui tuntutan fasilitas konsumsi kolektif) kepada pemerintah daerah/pusat.

Perumahan dapat menjadi sebuah tempat cadangan buruh bagi kelompok pengusaha. Bagi industri pelayaran, salah satu cara menghadapi fluktuasi tenaga kerja adalah dengan menyediakan jaring keamanan dengan menyediakan perumahan gratis beserta makanan bagi penduduk yang bekerja maupun tidak bekerja di sebuah kampung.[4] Namun, Jan Breman mengingatkan bahwa terbentuknya massa buruh cadangan tidak bisa dipakai untuk mempertalikan hubungan dua kelompok pekerja yang berbeda kemampuannya: kelompok yang satu memerlukan keterampilan khusus sedangkan kelompok yang lain tidak.

Bagi Breman, apabila kita memakai istilah sektor formal dan informal, maka para pekerja yang lebih terdidik dan terampil dalam sektor formal merupakan lapisan elite yang kepentingannya semata-mata menjadi urusan serikat buruh, sedangkan para pekerja tidak tetap yang tidak terorganisasi dan berada dalam sektor informal tidak mampu bersaing dengan para buruh elite tersebut. Akibatnya, massa buruh di dua sektor ini berada dalam dua lingkaran terpisah dan tidak dapat dikatakan bahwa massa buruh sektor informal akan menjadi cadangan massa buruh yang mengancam pekerja di sektor formal.

3 Yudi Fajar M Wahyu. 2004. "Partisipasi Politik Serikat Buruh dalam Politik Perumahan di Indonesia Periode 1998-2003 Studi Kasus: FSPLEM SPSI, SBSI, FNPBI dan PUK PT Showa FSPMI," Skripsi Sarjana Ilmu Politik FISIP UI Depok. Hal. 118-138.

4 John Ingleson. 1988. "Perkotaan di Jawa Selama Masa Depresi Tahun 1930-an", dalam Iskandar P. Nugraha (ed).2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*.Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 119.

Tekanan yang diberikan Breman adalah persoalan keterampilan yang dibutuhkan pekerja untuk memasuki suatu pekerjaan. Apabila terdapat surplus pasar tenaga kerja karena kebanyakan pekerjaan tidak memerlukan keterampilan, angkatan kerja tidak terorganisasi dan langkanya tindakan perlindungan, serta hubungan perburuhan yang menjadi informal, maka, pada tingkat ini, pernyataan bahwa adanya cadangan buruh industri lebih bisa diterima.[5]

Sejak awal tahun 1970, perkembangan industri di dunia semakin kompleks dan turut membuat hubungan industrial semakin fleksibel. Arah yang terjadi adalah perusahaan yang dahulu memakai sistem kerja penuh waktu (buruh tetap) semakin bergeser untuk mempekerjakan buruh paruh waktu, buruh sementara, buruh kontrak, dan penggunaan buruh dengan sistem sub-kontrak (*outsourcing*). Tempat bekerja pun tidak hanya dilakukan di pabrik, melainkan sudah merambah ke rumah-rumah penduduk (*homeworkers*). Pada survei tahun 1995 yang dilakukan di 15 negara anggota Uni Eropa, diketahui jumlah buruh yang bekerja dari rumah rata-rata 12%, bahkan di Irlandia mencapai 21% dan di Inggris mencapai 27% dari total pekerja yang ada di negeri tersebut.[6]

Pengertian tempat bekerja pada saat ini seharusnya sudah lebih luas dari pemahaman umum yaitu pabrik dan kantor menuju rumah. Hal itu menunjukkan bahwa proses produksi menghasilkan barang atau jasa sudah dapat dilakukan di rumah. Jika kondisinya demikian, maka konsekuensinya terhadap serikat buruh adalah segera melakukan kerja sama dengan rakyat pekerja yang berada di perumahan.

Penulis melihat perumahan sebagai satu lokasi pembentukan komunitas. Perkembangan pembagian kerja yang semakin fleksibel ini berdampak pada masuknya mekanisme pasar ke komunitas, salah satunya dengan adanya *homeworkers*. Terdapat perbedaan pendapat tentang perkembangan dampak proses produksi di komunitas. Bagi Francis Fukuyama dan Robert Putnam, modal sosial[7] yang dimiliki komunitas dapat memberikan

5 Jan Breman. 1996. "Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik terhadap Konsep Sektor Informal", dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (ed). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal.168-169.

6 Guy Standing. 1999. *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. Great Britain: Macmillan Press Ltd. Hal. 101-102, 109, 171, 175.

7 Modal sosial merupakan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, hubungan timbal balik, dan dijaganya

kontribusi positif terhadap keberhasilan perekonomian pasar. Sementara bagi André Gorz dan Richard Sennett, masuknya mekanisme pasar justru berdampak buruk pada nilai-nilai yang ada di komunitas. Gorz dan Sennett lebih lanjut berpendapat bahwa pada iklim fleksibilitas pasar tenaga kerja saat ini, kepentingan pasar dan komunitas tidak dapat duduk berdampingan secara harmonis antara satu dengan yang lain.[8]

Gorz mempunyai strategi untuk menghadapi iklim fleksibilitas tenaga kerja dengan mengajukan kebijakan pengurangan jam kerja bagi buruh. Jam kerja yang berkurang ini akan didistribusikan pada rakyat pekerja yang masih menganggur. Gorz juga menawarkan kepada pemerintah untuk menyediakan dana cadangan (*second cheque*) bagi buruh sebagai dana tambahan gaji dan jaminan terhadap segala bentuk kerugian yang dialami buruh akibat pengurangan jam kerja. Melalui pengurangan jam kerja ini, maka akan semakin terbuka kemungkinan bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas di komunitas yang didasari oleh tindakan sukarela (tidak dibayar).[9]

Perumahan juga dapat dilihat sebagai tempat berlangsungnya reproduksi tenaga kerja. Reproduksi tenaga kerja ini meliputi segala aspek yang memungkinkan munculnya tenaga buruh baru (melalui proses reproduksi) dan tempat memulihkan tenaga bagi buruh agar bisa bekerja lagi. Menurut Manuel Castells, reproduksi tenaga kerja tergantung pada intervensi negara yang berhubungan dengan bidang-bidang sosial (*non profit*) seperti fasilitas kesehatan, subsidi untuk perumahan dan transportasi, serta fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Peran negara, menurut Castells, adalah menjamin berjalannya fungsi-fungsi penting guna berlangsungnya akumulasi modal yang efektif. Pada proses reproduksi tenaga kerja ini dibutuhkan tindakan konsumsi yang dilakukan buruh. Tindakan konsumsi ini bisa dilakukan secara individual maupun kolektif.

Konsumsi individual bisa berupa belanja kebutuhan sehari-hari, pemakaian barang-barang kebutuhan pribadi, makanan, dan pakaian. Konsumsi kolektif merupakan penggunaan fasilitas yang memang dibu-

komitmen di antara individu. Modal sosial muncul karena ada kepercayaan (*trust*) yang terbangun sebelumnya.

8 Adrian Little. 2002. *The Politics of Community*. Great Britain: Edinburgh University Press. Hal.102-103.

9 *Ibid.* hal.120-121.

tuhkan banyak orang seperti: tempat parkir, rumah sakit, infrastruktur jalan, sekolah, pasar, dan lain-lain.[10] Castells menggunakan studi kasusnya di Prancis pada periode 1941-1963 untuk kasus perumahan. Ketika itu terjadi percepatan industrialisasi, peningkatan konsentrasi buruh di pusat perkotaan (khususnya Paris), krisis perumahan yang mencapai situasi dramatis, yang akibatnya menghantam kondisi buruh dengan amat keras. Situasi ini berkembang karena aksi protes; mulai dari bentuk pendudukan rumah secara ilegal sampai tuntutan pengadaan rumah secara sosial di tahun 1947-1951.[11]

Implikasi Hubungan Modal-Negara-Buruh pada Perumahan Pekerja

Pada bagian ini akan dibahas secara singkat perkembangan pengadaan perumahan bagi pekerja di Indonesia pada masa orde baru sampai masa pasca-Soeharto. Analisis yang dipakai adalah mengaitkan tiga hubungan utama kekuasaan yaitu kekuatan modal, negara, dan buruh.

Pada awal berdirinya Orde Baru, pemerintah memaksakan partai-partai politik untuk bergabung dengan hanya memperbolehkan 3 partai yang hidup. Organisasi buruh disatukan dalam organisasi tunggal pada tanggal 20 Februari 1973 yang bernama Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Kebutuhan pemerintah untuk memasukkan investasi ke Indonesia sangat besar, sehingga pemerintah dengan segera membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal yang kemudian menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973.

Dalam rangka melaksanakan UU PMDN (Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri) di bidang perumahan, dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pedoman Penanaman Modal Bidang Pembangunan Perumahan beserta Fasilitasnya, yang antara lain menetapkan perbandingan jumlah pembangunan rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana yaitu 1:3:6, dan luas lantai rumah sederhana maksimum 70 m^2.[12]

10 Mike Savage dan Alan Warde. 1993. *Urban Sociology, Capitalism and Modernity*. Hong Kong: The Macmillan Press. Hal 153-154.
11 Manuel Castells. 1978. *City, Class and Power*. The Macmillan Press. Hal. 51.
12 Siswono Yudohusodo dan Soearli Salam (editor). 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL. Hal. 114.

Pada tahun 1974 didirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dan Bank Tabungan Negara (BTN). BTN ditugaskan oleh Menteri Keuangan sebagai lembaga pembiayaan perumahan yang berfungsi sebagai bank yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi rumah sederhana yang dibangun oleh Perum Perumnas dan *developer* swasta. Para pengembang swasta telah disatukan dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) yang dibentuk pada tanggal 11 Februari 1972.

Baru pada tahun 1987 terdapat payung hukum yang mendukung bahwa koperasi dapat pula mengadakan perumahan bagi anggotanya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koperasi dan Menteri Perumahan Rakyat No.02/SKB/M/X/87 dan No.01/SKB/M/10/1987 tentang Penyediaan Perumahan dan Permukiman Melalui Koperasi. Keberadaan SKB ini memberikan kemudahan-kemudahan agar koperasi mampu melaksanakan pembangunan perumahan mulai dari penyiapan lahan permukiman, penyusunan perencanaan pembangunan, pembangunan fisik dan pembangunan rumah tumbuh, penyediaan dan pengelolaan dana, industri dan pengadaan bahan bangunan, hingga pengelolaan lingkungan permukiman.[13]

Perkembangan investasi dari tahun 1990-1992 serta semakin derasnya modal asing mengalir masuk ke negara-negara lain yang menjadi saingan Indonesia, terutama ke Cina dan Vietnam, sempat menjadi keprihatinan perencana ekonomi pemerintah. Keluhan-keluhan kalangan swasta baik dari dalam maupun luar negeri agar Indonesia mempunyai iklim investasi yang lebih baik (berupa infrastruktur, peraturan yang transparan, prosedur yang sederhana, dan pelayanan aparat pemerintah terkait), ditanggapi pemerintah dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Oktober 1993 tentang Tata Niaga Ekspor Impor, Tarif, Izin Penanaman Modal, Industri Farmasi dan Amdal atau lebih dikenal dengan nama **Pakto '93**. Isinya sebagian besar menyederhanakan proses perizinan dalam membuka usaha industri, termasuk perizinan lokasi yang berkaitan dengan penggunaan lahan.[14]

---

13 Surat Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Menteri Perumahan Rakyat No.02/SKB/M/X/87 dan No.01/SKB/M/10/1987 tentang Penyediaan Perumahan dan Permukiman Melalui Koperasi, pasal 1.

14 Andrinof A. Chaniago. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Hal. 54-57.

Di dalam Pakto '93 tersebut terdapat Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri, yang di dalamnya antara lain mengatur kewajiban perusahaan Kawasan Industri untuk mencadangkan tanah Kawasan Industri antara 10%-30% sesuai dengan luasnya untuk penyediaan kavling perumahan (dan perumahan bagi pekerja jika luas kawasan industri lebih dari 200 hektar).

Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993 dan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 28 Tahun 1974 (yang menetapkan perbandingan jumlah pembangunan rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana yaitu 1:3:6) menunjukkan relasi antara negara-modal-buruh yaitu kepentingan negara untuk mempermudah modal luar negeri masuk telah memberikan efek terhadap diperhatikannya usaha pengadaan perumahan buruh.

Pada masa pasca-Soeharto, Ditjen Binawas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi merumuskan sebuah "Konsep Penyelenggaraan Peru-

Tabel 1.
Standar Teknis Penyiapan Kavling Perumahan bagi Perusahaan Kawasan Industri

Luas Kawasan Industri	Kavling Industri	Kavling Komersial	Kavling Perumahan	Jalan dan Sarana Penunjang Lainnya	Ruang terbuka Hijau
10-20 Ha	65%-70%	Maks. 10 %	Maks. 10%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>20-50 Ha	65%-70%	Mak.10%	Maks.10%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>50-100 Ha	60%-70%	Maks 12,5 %	Maks.15 %	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>100-200 Ha	50%-70%	Maks.15%	Maks.20%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>200-500 Ha	45%-70%	Maks.17,5%	10%-25%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%
>500 Ha	40%-70%	Maks.20%	10%-30%	Sesuai kebutuhan	Min. 10%

Kett. : Kavling perumahan adalah kavling yang disediakan oleh pengelola Kawasan Industri untuk perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya seperti tempat olahraga dan sarana ibadah.
Sumber : Lampiran II SK Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993 Tanggal 23 Oktober 1993

mahan/Permukiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya."[15] Usaha Depnakertrans untuk mewujudkan perumahan dan permukiman bagi pekerja/buruh perusahaan terus berlanjut.

Kesepakatan antara Menakertrans dengan Menkimbangwil tercapai pada tanggal 27 Desember 1999. Hal itu ditindaklanjuti dengan penyamaan persepsi antara Dirjen Binawas dengan Dirjen Kimbangwil pada 6 Januari 2000. Kemudian disusul pertemuan dengan organisasi pekerja/buruh serta perusahaan BUMN pada tanggal 21 Januari 2000. Proses ini terus bergulir hingga menghasilkan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja RI dengan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah RI Nomor Kep-33/MEN/2000 dan Nomor 01/SKB/M/2000 tentang Perumahan dan Permukiman Pekerja Perusahaan, pada tanggal 21 Maret 2000.

Penandatanganan surat keputusan bersama[16] tanggal 21 Maret 2000 diikuti langkah sosialisasi kepada rakyat pekerja dan pengusaha di beberapa daerah seperti di Bekasi, Surabaya, Semarang, Batam, dan Medan dalam bentuk Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan (Tabel 2). Sosialisasi ini diikuti dengan kesepakatan-kesepakatan antarpelaku terkait untuk mewujudkan perumahan bagi pekerja perusahaan yang difasilitasi oleh para pengusaha dan pemerintah.

Pengadaan perumahan bagi buruh masih dititikberatkan pada pihak perusahaan. Serikat buruh masih terus berkutat dalam tuntutan upah dan perbaikan kondisi di tempat kerja (pabrik/kantor). Negara mempunyai peran sangat minimal dalam mengatasi krisis pengadaan perumahan bagi buruh karena jumlah rumah yang mampu disediakan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerja yang membutuhkan rumah. Hingga saat ini terdapat dua lembaga yang membantu pendanaan perumahan buruh yaitu PT Jamsostek melalui penyaluran Pinjaman Uang Muka Perumahan (sejak tahun 1997) dan BTN melalui skema kredit KPR Bersubsidi.

---

15 Budi Hartati. 1999. "Pokok-pokok Pikiran Rumusan Konsep Penyelenggaraan Perumahan/Permukiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya," (Jakarta, Ditjen Binawas Depnakertrans, tidak diterbitkan.)

16 Organisasi pekerja yang tercantum dalam surat keputusan bersama ini adalah: FSPSI, FSPSI Reformasi, FSBDSI, FSBSI, SP BUN, dan INKOPKAR.

Tabel 2
Kegiatan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan

No.	Lokasi	Kegiatan yang Dilakukan	Keterangan	Tanggal
1	Jakarta (di Kantor Departeman Tenaga Kerja)	Penandatanganan SKB No.: Kep-33/MEN/2000 No.01/SKB/M/2000	Tentang Perumahan dan Permukiman Pekerja Perusahaan	21 Maret 2000
2	Bekasi, Jawa Barat (Cikarang Baru, KI Jababeka)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	23 Juni 2000
3	Surabaya, Jawa Timur (KI Rungkut)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	13 Juli 2000
4	Semarang (Bukit Beringin Lestari, Perum Perumnas)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	25 Juli 2000
5	Batam (Rusun Tanjung Piayu) (Perum Perumnas dan Otorita Batam)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	29 Juli 2000
6	Medan (Kawasan Siap Bangun Griya Martubung, Perum Perumnas)	Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan	Penyerahan Sertifikat kepada Perusahaan	5 Juli 2001

Catatan:
Khusus untuk Jababeka telah dikembangkan Rumah Susun Sewa PT. MATTEL dan Rumah Pekerja yang disediakan pengembang.
Untuk Surabaya telah dikembangkan sertifikasi oleh REI kepada anggotanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk Semarang telah diupayakan kerja sama pembangunan perumahan oleh PT. INDOFOOD dan Perum Perumnas.
Untuk Batam telah dibangun Rumah Susun yang dibangun oleh PT. JAMSOSTEK (penyandang dana) dan Perum Perumnas.
Sumber: Sambutan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Rangka Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan, Medan 5 Juli 2001, (Depkimpraswil, tidak diterbitkan, 2003)

Menentukan Langkah ke Depan

Uraian di atas menggambarkan pada kita bahwa pengadaan perumahan bagi buruh sangat ditentukan oleh kepentingan negara dalam menjaga investasi di Indonesia. Persoalan pengadaan perumahan bagi buruh masih terus dialihkan pada tingkat lokal tanpa berupaya melihat pemecahan yang seharusnya mampu dilakukan negara di tingkat nasional.

Apabila serikat buruh mampu melihat potensi lain dari perumahan yaitu sebagai tempat pembangunan komunitas bersama rakyat pekerja, maka tuntutan kebutuhan akan kondisi perumahan yang layak bukanlah hal mustahil untuk ditujukan pada negara. Fungsi perumahan sebagai

tempat reproduksi tenaga buruh dan tempat akumulasi modal sudah sangat disadari oleh negara dan kepentingan modal.

Strategi ke depan serikat buruh yang bisa dijalankan adalah membangun pengorganisasian komunitas rakyat pekerja, sementara menunggu dan melihat dampak langsung dari masuknya proses produksi ke komunitas, dengan menyatukan kepentingan pada kebutuhan konsumsi kolektif. Mungkin hal tersebut dapat menjadi amunisi dalam pembangunan gerakan sosial perkotaan ke depan yang terwujud dalam perjuangan politik di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

Buku

Breeman, Jan. 1996. "Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal", dalam Chris Manning & Tadjuddin Noer Effendi (peny.). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Castells, Manuel. 1977. *The Urban Question*. London: Edward Arnold. Kutipan diambil dari Mike Savage dan Alan Warde. *Urban Sociology, Capitalism and Modernity*. Hal. 153-154. London: Macmillan, 1993.

_____. 1978. "Urban Crisis, State Policies and the Crisis of the State: the French Experience". *City, Class and Power,* Chapter 3. London: Macmillan.

Chaniago, Andrinof A. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Eurostat. 1996. "Labour Force Survey: Result 1995". Luxemburg: Eurostat, Table 63. Kutipan diambil dari Guy Standing. *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*, hal.109. Great Britain: Macmillan Press Ltd, 1999.

Ingleson, John. 1988. "Perkotaan di Jawa Selama Masa Depresi Tahun 1930-an", dalam Iskandar P. Nugraha (peny.). *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial.* Jakarta: Komunitas Bambu. Jakarta: Komunitas Bambu, 2004.

_____. 2000. Sarekat Buruh dan Penyediaan Jaminan Sosial di Jawa Masa Kolonial. dalam *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial,* ed. Iskandar P. Nugraha, Jakarta: Komunitas Bambu, 2004.

Little, Adrian. 2002. *The Politics of Community*. Great Britain: Edinburgh University Press.

Standing, Guy. 1999. *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. Great Britain: Macmillan Press Ltd.

Yudosodo, Siswono dan Soearli Salam, ed. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL.

Bahan-bahan yang tidak diterbitkan

Hartati, Budi. 1999. Pokok-pokok Pikiran Rumusan Konsep Penyelenggaraan Perumahan/Permukiman Sebagai Wujud Dasar Kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya, Jakarta: Ditjen Binawas Depnakertrans. Fotokopi.

Pidato oleh Erna Witoelar (Medan 5 Juli 2001). Dalam: Sambutan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Rangka Pencanangan Gerakan Pembangunan Perumahan Pekerja Perusahaan. Jakarta: Depkimpraswil.

Wahyu, Yudi Fajar M. 2004. Partisipasi Politik Serikat Buruh dalam Politik Perumahan di Indonesia Periode 1998-2003 Studi Kasus: FSPLEM SPSI, SBSI, FNPBI dan PUK PT Showa FSPMI. Skripsi Sarjana Ilmu Politik, FISIP UI.

OJO NJAWIL OJO NYADUK

HUBUNGAN SOSIAL BURUH DALAM KOMUNITI RUNGKUT LOR, SURABAYA

Maria Dona & Selly Riawanti [1]

Abstract

One of the obsessions of recent labor movement is organizing the community-base labor movement. The study shows that labors have a not very lucky social identity in the community they live, in which it differ them from their lords. The identity is formed due to: (1) the social demographic character of the labor, (2) The working rhythm in factories which limits their time and energy to socialize themselves with their lords. Such unlucky differences are still strengthened by: (1) the regulation of inhabitant administration, (2) labor allocation by industries, and (3) various interventions towards communities. Establishing the community-base labor movement is supposed to consider such realities, in order not to strengthen the differences, but build up understanding among communities.

Kata kunci: buruh, komuniti, identitas, pengorganisasian buruh

Pendahuluan

"Nek ora gelem dijawil ojo njawil, nek ora gelem dicaduk ojo nyaduk" ("Jika tak ingin disinggung jangan menyinggung, jika tak mau ditendang, jangan menendang"). Ini adalah sebuah ungkapan umum yang dipahami oleh setiap buruh yang datang dan tinggal di Rungkut Lor (Rungkut Utara), yang menggambarkan sikap mereka dalam berhubungan dengan warga lain di tempat tinggalnya. Rungkut Lor adalah kawasan permukiman padat pen-

[1] Peneliti pada Yayasan AKATIGA

duduk yang terletak di sisi Selatan kawasan industri Surabaya yang terkenal dengan nama SIER (*Surabaya Industrial Estate Rungkut*). Kawasan industri yang dibangun tahun 1980 ini ramai dengan dinamika keluar-masuk buruh. Terutama sejak tahun 1997, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) 'merontokkan' sebagian besar buruh industri di kawasan ini karena relokasi ke kawasan industri Pasuruan (PIER-*Pasuruan Industrial Estate Rungkut*) atau mengubah status buruh yang dipekerjakan setelah ter-PHK menjadi pekerja dengan kontrak kerja waktu tertentu (KKWT). Mayoritas buruh tidak lagi memiliki kepastian jaminan kerja di pabrik karena kontrak kerja semakin 'lentur dan longgar', sedangkan pabrik bukan satu-satunya tempat kerja. Akibatnya, menjamurlah industri rumahan yang menjalankan produksi secara subkontrak sebagai akibat dari sistem desentralisasi proses produksi, karena di dalam komuniti kini tersedia buruh murah yang umumnya terdiri dari para korban PHK.

Salah satu perhatian para pengamat perburuhan di Indonesia adalah mengenai kehidupan buruh dalam komuniti. Perhatian ini menguat seiring dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam relasi industri, khususnya akibat-akibat krisis ekonomi sejak 1997 sebagaimana yang digambarkan sepintas dengan kasus Surabaya tadi. Gejala PHK yang melemparkan buruh keluar dari pabrik, atau penurunan status-status kerja berikut imbalannya, menimbulkan keprihatinan tentang hilang atau menurunnya tingkat kesejahteraan buruh dan mendorong gagasan tentang pengorganisasian buruh di luar tempat kerja atau pengorganisasian buruh berbasis komuniti, untuk menghadapi persoalan-persoalan mereka.

Gagasan mengorganisasi buruh memintas batas-batas tempat kerja sesungguhnya bukan baru muncul setelah krisis relasi industri. Munck misalnya, sejak 1980 telah mengemukakan konsep "kelas pekerja" yang merangkum para pekerja di dalam maupun di luar industri (petani, pengrajin, dll.). Konsep ini menurutnya dapat dijadikan landasan guna menggalang gerakan sosial demi perbaikan nasib para buruh dalam pengertian yang luas. Vedi Hadiz (2001) yang tekun mengamati perburuhan di Indonesia juga mengemukakan gagasan pengorganisasian buruh berbasis komuniti. Namun studi empirik tentang pengorganisasian buruh dalam komuniti, baik sebagai kemungkinan atau sebagai kenyataan, masih langka. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan hubungan di antara buruh dengan

warga lain dalam komuniti di tempat tinggalnya. Resmi Setia dari AKATIGA yang meneliti strategi buruh di kawasan industri tekstil di Majalaya, Jawa Barat, dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan mereka, menemukan keanekaan cara buruh menyiasati persoalan sehari-hari. Hal ini telah memunculkan keanekaan identitas buruh, yang dikhawatirkan akan menyulitkan pengorganisasian (2005:134-150).

Melanjutkan perhatian kepada kehidupan buruh dalam komuniti, pada bulan Juni-Juli 2005, AKATIGA melakukan penelitian di Rungkut Lor, Surabaya. Daerah ini dipilih berdasarkan dugaan bahwa keragaman identitas buruh dalam komuniti mungkin lebih rendah daripada di Majalaya, setidaknya dari latar etniknya. Di Majalaya, banyak buruh yang berasal dari luar Jawa Barat, termasuk dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Para pendatang ini lebih berkonsentrasi ke pekerjaan mereka, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu terlibat dalam kegiatan komuniti di tempat mereka tinggal. Di Surabaya, diduga buruhnya kebanyakan berasal dari Jawa Timur, kalaupun ada golongan etnik lain di sana mungkin orang Madura. Pengalaman Maria Dona dari studinya tentang Dewan Pengupahan (2004), juga dari beberapa diskusi dengan jaringan pendamping buruh, mengesankan bahwa aktivisme buruh di sini lebih tinggi daripada di Majalaya. Berdasarkan pengetahuan semacam itu, para peneliti AKATIGA menduga bahwa keseragaman etnis dan aktivisme buruh di Surabaya akan membuka peluang lebih besar bagi pengorganisasian buruh dalam komuniti.

Penelitian dilakukan bersama beberapa aktivis dari suatu serikat buruh (SB) independen yang tinggal dan melakukan pengorganisasian buruh di komuniti Rungkut. Kegiatan pengorganisasian ini menanggapi kondisi basis buruh di pabrik yang semakin rentan dan berkurang jumlahnya, sedangkan korban PHK semakin meningkat. Pengorganisasian dilakukan dengan mengumpulkan pedagang kaki lima dan pekerja subkontrak rumahan menjadi kelompok yang mandiri dan kuat. Para aktivis ini percaya akan solidaritas antar 'rakyat pekerja'. Pengertian 'rakyat pekerja' ini meliputi para pekerja baik di sektor formal maupun informal, dan digunakan dengan asumsi memudahkan penggalangan solidaritas di antara mereka. Di Rungkut, mereka yang dianggap termasuk golongan ini adalah para buruh pabrik, pedagang kali lima, dan pekerja subkontrak. Namun menerapkan sebuah konsep besar 'rak-

yat pekerja' pada suatu komuniti yang warganya memiliki beragam identitas, tidak hanya identitas 'pekerja', apalagi ada konotasi 'kelas bawah' dalam konsep 'rakyat pekerja' itu, tentu menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri.

Tulisan ini mengupas tantangan bagi pengorganisasian buruh berbasis komuniti, berdasarkan hasil penelitian AKATIGA mengenai buruh dalam komuniti di Rungkut Lor. Terlebih dahulu akan diulas konsep-konsep pokok yang digunakan, yakni komuniti, kelas, organisasi, dan identitas. Selanjutnya adalah pemerian riwayat komuniti Rungkut Lor dalam kaitannya dengan perkembangan industri di kawasan ini. Bagian berikutnya melukiskan struktur sosial setempat serta tempat buruh di dalamnya. Bagian terakhir mengulas kemungkinan menggalang solidaritas antarwarga di komuniti untuk memperjuangkan kepentingan buruh.

Identitas, Komuniti, Kelas, Organisasi

Ada empat konsep sosiologis pokok yang akan dijelaskan dulu pengertiannya untuk membahas isu pengorganisasian buruh berbasis komuniti, yakni komuniti, kelas, organisasi, dan identitas.

Identitas. Identitas adalah konsep diri seseorang atau segolongan orang, yang hanya muncul dalam interaksi atau hubungannya dengan orang atau golongan lainnya. Mengingat bahwa setiap orang akan berhubungan dengan banyak orang atau golongan dalam banyak konteks, maka identitasnya juga akan relatif beragam dan beragam pula sumbernya (Robbins, 1973; Castells, 1997). Identitas seseorang terjalin dari persepsinya dan persepsi orang lain mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat orang itu yang membuatnya sama seperti atau tidak sama dengan orang lain (Goodenough, 1963). Ciri-ciri yang relevan ini meliputi berbagai dimensi seperti penampakan fisik, usia, jenis kelamin, nama pribadi, keanggotaan dalam suku bangsa, keterampilan atau keahlian, kedudukan atau kelas sosial, dan seterusnya. Biasanya dimensi identitas bersifat *bipolar* (berkutub dua), seperti "kaya-miskin", "kurus-gemuk", dsb.

Pemunculan identitas akan berlaku secara selektif bergantung kepada kepentingan pelakunya (perorangan maupun kolektif) dan konteks interaksi yang dihadapinya. Berhubung identitas itu hanya muncul dalam interaksi, maka secara teoretik kemun-

culan identitas itu menyangkut dua pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang menyatakan identitas tertentu dan pihak lain yang mengakui (atau menolak) identitas tersebut. Untuk penelitian tentang buruh dalam komuniti, setidaknya ada dua sumber identitas yang penting bagi buruh yang bersangkutan, yakni: (1) kedudukannya sebagai pekerja, yang dalam hal ini menghadapkannya dengan pemberi kerja (baik di dalam maupun di luar komuniti) dan menyatukannya ke dalam golongan pekerja secara umum; dan (2) dari kedudukannya sebagai warga komuniti setempat (yang menyatukannya dengan sesama warga komuniti, dan menghadapkannya kepada pihak-pihak lain di luar komuniti ybs).

Penggalangan identitas penting bagi suatu upaya mengorganisasi. Ini berarti bahwa identitas dapat dibentuk dan dibangun berdasarkan berbagai bahan. M. Castells menunjukkan bahan-bahan pembentuk identitas sejarah, geografi, biologi, institusi produksi dan reproduksi, ingatan kolektif, khayalan atau bayangan pribadi, aparatus kekuasaan, dan keagamaan (1997:7).

Komuniti. Definisi konsep ini bermacam-macam, tetapi pada dasarnya ada dua golongan definisi: (1) melihat komuniti sebagai suatu kesatuan sosial atau kolektivitas; dan (2) melihat komuniti sebagai hubungan-hubungan sosial atau sentimen kolektif. Dalam pengertian yang pertama, komuniti biasanya dianggap berupa: (1) suatu kelompok manusia yang tinggal bersama di suatu ruang fisik atau wilayah geografis seperti kelompok ketetanggaan, dusun atau desa, kota, dan sebangsanya; (2) kelompok yang memiliki suatu ciri bersama tertentu, suatu perasaan kebersamaan, dan/atau memelihara ikatan-ikatan sosial serta interaksi di antara anggotanya sehingga membentuknya menjadi suatu satuan sosial seperti komuniti etnik, komuniti agama, komuniti akademik, atau komuniti profesional. Perbedaannya terletak pada pendekatan teritorial atau non-teritorial.

Beberapa ahli melihat bahwa wilayah bersama merupakan landasan penting bagi pembentukan komuniti. Sedangkan mereka yang menggunakan pendekatan non-teritorial melihat bahwa komuniti tidak harus terikat oleh kesamaan tempat tinggal, karena ada banyak sumber untuk menumbuhkembangkan ikatan demikian — kesamaan pengalaman (sejarah), kesamaan penganutan nilai, kesamaan kepentingan, hubungan kekerabatan, dll — yang tidak mensyaratkan tinggal bersama. Pendekatan non-teri-

torial ini menjadi semakin populer berkat kenyataan kemajuan teknologi komunikasi yang mereduksi nilai kedekatan teritorial sebagai landasan asosiasi manusia. M.M. Webber pernah mengemukakan konsep *community without propinquity* (komuniti tanpa kedekatan fisik); dan senada dengan pendekatan ini dapat disebutkan pula pendekatan jaringan sosial yang mengemukakan pentingnya perhatian kepada kolektivitas tanpa pengelompokan teritorial (a.l. Boissevain 1968).

Kelas. Kelas adalah konsep yang *ajeg* digunakan dalam gerakan perburuhan, juga sebuah konsep yang telah cukup tua sejarah perdebatannya di dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum kelas sosial merujuk ke suatu golongan penduduk yang (1) dibedakan dari golongan lainnya berdasarkan kekayaan serta status sosial yang terkait; (2) status tersebut terutama berpangkal dari kedudukan golongan tersebut dalam produksi dan distribusi kekayaan sosial; (3) memiliki kepentingan tersendiri yang bertentangan atau melengkapi kepentingan golongan lainnya; dan (4) karenanya memperlihatkan kecenderungan sikap dan tingkah laku — politik, budaya, dan sosial — yang 'khas' golongan yang bersangkutan. Awalnya memang konsep kelas mengandung arti ekonomi, berkat pengaruh konsepsi David Ricardo yang mengidentifikasi golongan sosial pekerja dengan kategori ekonomi dari kerja, yang dilihat sebagai salah satu faktor bagi produksi. Prinsip ini dirujuk oleh Karl Marx yang konsep kelas pekerjanya hingga kini masih populer dalam gerakan perburuhan. Sumbangan Marx yang penting adalah pandangannya bahwa kelas merupakan sumber utama bagi dinamika sosial, sehingga harus menjadi landasan bagi penafsiran tentang dinamika sosial. Sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan antarkelas; perubahan sosial terjadi melalui revolusi kelas; konflik antara majikan yang kapitalis dan pekerja yang berpangkal pada moda produksi kapitalis, akan mengarah ke revolusi proletar dan suatu tata produksi baru, yakni sosialis. Marx sangat yakin bahwa konsep ini memiliki nilai penjelasan dan prediksi yang tinggi (bd. Bauman, 1985; Ritzer & Goodman, 2004).

Bauman (1985) melihat kesuksesan konsep kelas dari Marx disebabkan oleh: (1) keselarasannya dengan pandangan liberal, yang menafsirkan tindakan individu sebagai upaya rasional untuk memenuhi kepentingannya, dan (2) dimensi peluang pengelolaan surplus sosial dalam perjuangan atau pertentangan antarkelas. Kelas yang

tersisih dari akses terhadap surplus dapat memperbaiki situasinya bukan dengan memiliki surplus tersebut, melainkan dengan mengupayakan perolehan hak untuk mengelolanya. Ini mengilhami kajian-kajian tentang pertentangan antara kelas majikan dan kelas pekerja, dan lebih mutakhir lagi, mengilhami gerakan untuk memajukan pekerja dari kedudukan sebagai sekedar faktor produksi kapitalis dengan membangun kesadaran tentang situasi mereka agar nantinya dapat menyusun strategi politik yang ditujukan untuk mengatasi pengungkungan kapital terhadap mereka dengan menghapuskan moda produksi kapitalis itu sendiri.

Memang ada kesenjangan antara kenyataan historis dengan teori kelas Marx: hingga dewasa ini, para buruh industri belum banyak melangkah maju ke arah yang diimpikan Marx sejak pertengahan abad ke-19 itu. Telah banyak pula sumbangan teori sosial untuk mengembangkan gagasan perjuangan kelas dari Marx itu. Di antara yang penting adalah konsep G. Lukacs tentang kesadaran kelas (1967 [1923]). Menurutnya, ada dua jenis kesadaran: (1) kesadaran dari kelas (*consciousness of class*) yang empirik yang didapat dari pengalaman hidup sehari-hari para anggota kelas yang bersangkutan, dan (2) kesadaran akan kelas (*class consciousness*) yang lebih konseptual, yang timbul dari suatu pandangan yang berperspektif luas terhadap konstelasi kelas secara menyeluruh dalam suatu masyarakat. Kesadaran empirik tidak dengan sendirinya akan berubah ke kesadaran konseptual tadi. Informasi yang diperlukan untuk membangun kesadaran kelas tidak begitu saja dapat dipungut dari pengalaman sehari-hari para anggota kelas yang terkungkung oleh rutinitas kehidupan sehari-hari. Sebab itulah Lukacs menyebut kesadaran yang pertama sebagai "kesadaran palsu" (*false consciousness*); "palsu" karena dibatasi oleh sempitnya cakrawala pengalaman individu. Maka diperlukan bantuan analisis ilmiah tentang situasi kelas tersebut, untuk kemudian 'dicekokkan' ke alam pikiran para buruh melalui saluran organisasi-organisasi politik mereka. Jadi, Lukacs menganjurkan suatu perjuangan ideologis untuk mencapai perubahan yang memperbaiki kedudukan buruh. Begitulah, beberapa ahli sosiologi lain mengembangkan lagi gagasan ini, yang ujungnya adalah pemahaman bahwa kesadaran kelas itu bukan hal yang begitu saja ada pada setiap anggota kelas, melainkan sesuatu yang berproses.

Kita lihat bahwa teori kelas a la Marx menunjuk ekonomi sebagai variabel dominan — kalau pun bukan tunggal — untuk menjelaskan hubungan antarkelas. Telah banyak kritik penting terhadap gagasan seperti ini, terutama berdasarkan kenyataan bahwa kehidupan sosial tidak hanya dikendalikan oleh ekonomi, tetapi juga oleh banyak hal lain. Untuk memahami kedudukan buruh dalam komuniti, konsep kelas memang harus diperluas pengertiannya dari sekedar suatu golongan ekonomi. Melihat buruh sebagai suatu kelas dalam relasi produksi belaka akan menyulitkan pemahaman mengenai posisi mereka dalam komuniti, meskipun status buruh sendiri sebagai status ekonomi tetap penting sebagai salah satu sumber identitas mereka. Untuk itu dapat dirujuk gagasan Max Weber bahwa kelas itu bersifat multidimensi (lih. Bauman, 1985; Ritzer & Goodman, 2004)

Bagi Max Weber, kelas memang bertolak dari hubungan ekonomi, tetapi bukan hanya itu. Ada dimensi sosial politik pula dalam konsep kelas. Perbedaan atau persamaan kedudukan ekonomi tidak dengan sendirinya menghasilkan perbedaan kepentingan. Kepentingan bisa beragam sesuai dengan keragaman barang dan peluang pasar. Misalnya, ada kelas ekonomi yang hanya terkait pada suatu komoditas tertentu, seperti "kelas permukiman", sehingga kepentingan kelasnya juga amat terbatas. Artinya bagaimana pentingnya kelas bagi seseorang, tidak dapat ditentukan secara *a priori*, tetapi harus dikaitkan dengan konteks pasar yang dihadapinya. Ini berarti pula bahwa kelas yang dalam pengertian Weber terutama merujuk ke pembedaan sosial, bisa beragam, dan bahkan bisa berubah-ubah. Oleh para ahli sosiologi Amerika Serikat, gagasan Weber itu dikembangkan menjadi konsep dan teori tentang ketidaksetaraan atau ketimpangan sosial, yang lebih bersifat gradual daripada dikotomis. Bagi mereka, perlu dikaji ada tidaknya korelasi di antara kekayaan, gengsi sosial (*prestige*) dan pengaruh atau kekuasaan. Dalam hal ini, konsep kelas diubah ke konsep stratifikasi (pelapisan) sosial.

Di antara ahli sosiologi yang menggunakan konsep stratifikasi sosial adalah Randall Collins (1975), terutama untuk menjelaskan konflik. Menurutnya, stratifikasi sosial itu menyangkut begitu banyak aspek kehidupan seperti kekayaan, politik, karier, keluarga, komuniti, gaya hidup, dll. Collins juga melihat bahwa tingkah laku manusia didorong oleh tujuan pemenuhan kepentingannya

sendiri, hanya saja dorongan itu bukan semata-mata rasional melainkan juga emosional. Untuk memahami konflik antarlapisan sosial, perlu diperhatikan perbedaan penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada di tingkat pelaku-pelakunya. Pelaku dengan sumber daya banyak dapat mengubah kendala-kendala bagi pencapaian tujuannya, dan sebaliknya bagi yang terbatas sumber dayanya. Dalam situasi ketimpangan, pemilik sumber daya yang banyak memang cenderung mengeksploitasi mereka yang kurang, atau memaksakan gagasan mereka kepada yang lebih lemah. Namun Collins mengingatkan bahwa eksploitasi atau pemaksaan gagasan demikian belum tentu dilandasi hitung-hitungan untung-rugi yang cermat terhadap hubungan yang timpang itu, karena seringkali pelaku lebih terdorong untuk mengejar kepentingannya sendiri. Aspek lain yang dianggap penting adalah pengalaman individu. Mereka yang terbiasa memerintah akan berbeda sikap dan tingkah lakunya dari yang biasa diperintah. Hal ini penting untuk memahami sikap pekerja terhadap organisasi. Pekerja sebagai pihak yang lebih sering diperintah daripada memerintah, akan menjadi orang-orang yang patuh dan fatalistik: ada kecondongan untuk lebih mementingkan imbalan ekstrinsik dan menjauh dari cita-cita organisasi (pekerja).

Organisasi. Organisasi adalah pengaturan kegiatan kolektif. Ada organisasi yang formal dan ada organisasi komuniti. Organisasi formal biasanya bertujuan khusus dan menggunakan cara-cara yang khusus pula serta relatif baku untuk mencapai tujuannya. Orientasi atau arah organisasi yang formal ke tujuan yang khusus itu, akan membatasi hubungan di kalangan anggotanya sebagai hubungan di antara peranan-peranan yang tertentu saja. Pengorganisasian demikian tentu berbeda dari pengorganisasian komuniti yang cakupan hubungan antarwarganya lebih luas, meliputi banyak aspek kehidupan mereka. Dalam kenyataan kehidupan sosial, kedua jenis organisasi ini dapat memiliki bagian yang sifatnya berbeda. Misalnya, dalam suatu komuniti bisa terdapat organisasi yang resmi (kelompok pengajian, kelompok arisan, dll.), dan sebaliknya, dalam suatu organisasi formal berkembang ikatan-ikatan primer seperti persahabatan yang menyerupai kekerabatan, dan seterusnya.

Pengorganisasian kerap membutuhkan dukungan penggalangan identitas tertentu. Terlebih lagi bila pengorganisasian itu meliputi populasi yang

beragam identitasnya, maka upaya mencari kesamaan di balik keragaman mutlak diperlukan. Seorang ahli sosiologi, R. Dahrendorf (1959) mengajukan konsep "kelompok semu" untuk merujuk ke suatu golongan luas yang memiliki suatu kesamaan dan karenanya berpotensi untuk digalang dan bahkan diorganisasi menjadi suatu kelompok kepentingan. Salah satu cara untuk mengubah "kelompok semu" menjadi "kelompok kepentingan" adalah dengan membangun identitas bersama. Sumber-sumber identitas bersama itu cukup beragam, termasuk komuniti dan kelas atau golongan sosial.

Demikianlah keempat konsep ini akan digunakan untuk membahas kehidupan buruh dalam komuniti Rungkut Lor dan menjajaki kemungkinan melakukan pengorganisasian buruh berbasis komuniti.

Rungkut Lor: dari Pertanian ke Industri

Kisah tentang asal-mula daerah Rungkut diawali oleh kedatangan seorang pedagang Persia bernama Zarkasyi yang berlayar dari Banten ke tanah Jawa, bersama putranya yang bernama Tholabuddin. Setibanya di Jawa Timur, Tholabuddin muda dititipkan oleh ayahnya ke sebuah pesantren milik Sunan Ampel untuk mempelajari ilmu agama. Sekitar tahun 1200 H, Tholabuddin dewasa yang sakti dan kuat mendapat amanat dari Sunan Ampel untuk membuka daerah Rungkut dengan cara melakukan syiar Islam.

Di masa itu Rungkut merupakan daerah yang dipenuhi oleh rawa, semak belukar dan alang-alang yang rapat (rungkut) dan tinggi seperti hutan. Tholabuddin *membabad* (membuka) daerah Rungkut dari bagian Selatan kemudian ke arah Barat dan Timur. Upayanya gagal terus, dan baru berhasil ketika ia sampai ke bagian Utara. Dari sanalah nama daerah ini sekarang, Rungkut Lor. Tahun 1209 H, Tholabuddin memulai syiar Islamnya dari daerah Rungkut Lor dengan membangun sebuah rumah dan sumur. Syiar Islam dilakukan secara damai di tengah masyarakat yang saat itu telah menganut ajaran Budha. Sisa-sisa masa Budha tampak dari praktik membuat sesajen dengan kembang tujuh rupa, yang bertahan konon sampai tahun 1950-an. Di kemudian hari, rumah Tholabuddin kemudian dibangun kembali oleh warga menjadi mesjid Tholabuddin yang berornamen indah di sisi Utara jalan Rungkut Lor; sedangkan sumurnya sempat diper-

cayai merupakan sumber penyembuhan penyakit. Kepercayaan ini lambat laun memudar sejalan dengan perkembangan industri yang juga mengubah banyak cara hidup masyarakat setempat. Sementara itu riwayat syiar Islam oleh Tholabuddin kerap dirujuk sebagai sumber identitas masyarakat Rungkut Lor sebagai masyarakat Islam yang 'fanatik'. [2]

Sebelum tahun 1960, daerah Rungkut merupakan daerah agraris yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan bekerja sebagai petani. Banyak warganya yang pandai menjahit menjalankan usaha konveksi rumahan; hampir setiap rumah saat itu memiliki mesin jahit. Seorang pengumpul mendatangi setiap rumah mengambil hasilnya untuk dijual di pasar. Para penjahit dapat juga langsung menjual produk mereka di pasar atau warung mereka masing-masing. Ketika itu sudah ada pasar Soponyono, meski masih sedikit jumlah kiosnya yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat Rungkut.

Tahun 1960-1970 wilayah persawahan Rungkut berangsur-angsur dibeli oleh para investor untuk dijadikan tanah landasan pembangunan industri. Industri awal yang berdiri saat itu adalah PT Kedaung (1970; kini bernama Kedaung Group), PT Lotus (1973; sebuah pabrik tekstil), dan PT Horison Syntex (1975; sekarang PT Star In). Pembangunan wilayah Rungkut sebagai kawasan industri membuat Rungkut mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah mulai menyalurkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana kampung seperti MCK, listrik, saluran air, dan jalan. Secara bertahap, tanah landasan tidak hanya dibeli oleh investor untuk pembangunan industri awal namun juga untuk kawasan industri SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) dan perumahan. Saat itu harga jual tanah/sawah per *gogolan* (3/4 ha atau 4 *ancer*) sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,-, sedangkan harga tanah yang berada di pinggir jalan bisa mencapai Rp. 2.000.000 per m2. Luasan lahan sawah yang terjual di daerah Rungkut Lor di masa itu mencapai 11.000 m2.

Kemunculan industri, disusul oleh perkembangan perumahan kota di daerah Rungkut, mengubah mata pencaharian dan beberapa segi

2 Istilah 'Islam fanatik' itu digunakan oleh beberapa warga, termasuk ulama setempat, dan penduduk Surabaya di luar Rungkut yang dijumpai dalam waktu penelitian. Sayangnya kami tak dapat menemukan sumber-sumber tertulis mengenai perkembangan Islam di daerah ini untuk mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan demikian.

budaya atau cara hidup masyarakat Rungkut. Dari sisi mata pencaharian, warga tidak dapat lagi bertani karena tanah persawahan telah beralih ke tangan investor industri dan perumahan. Usaha konveksi pun tidak lagi menguntungkan ketika pakaian jadi telah diproduksi secara massal oleh pabrik. Namun bekerja di pabrik juga bukan pilihan. Beberapa warga yang mencobanya menemukan bahwa waktu kerja yang panjang dengan sedikit saja waktu istirahat — terutama untuk shalat — dirasakan tidak sesuai bagi mereka. Banyak warga lalu mengandalkan sumber nafkah mereka dari usaha pondokan,[3] yang berkembang menyambut kedatangan para pekerja industri dari berbagai daerah.

Awalnya, tarif pondokan yang satu dengan yang lain seragam. Kamar pondokan yang disewakan berbentuk bedeng dari kayu dan bambu. Lama-kelamaan pemilik pondokan membangun kamar menjadi bangunan permanen menggunakan batu, semen, dan keramik. Peningkatan mutu kamar pondokan meningkatkan pula tarifnya, dan terjadilah persaingan harga kamar pondokan. Tidak hanya kamar pondokan, pontèn[4] (sarana MCK) umum pun disewakan. Setiap kebutuhan pendatang disediakan oleh pemilik pondokan asalkan dapat membayar sesuai harga yang ditetapkan. Tarif penggunaan sarana umum seperti ponten tadi, ditentukan oleh rapat RT. Sedangkan tarif air PDAM ditentukan oleh masing-masing pelanggan PDAM tersebut. Para perempuan yang semula bekerja sebagai penjahit kini menerima 'penitipan anak' bagi buruh perempuan yang harus bekerja dan meninggalkan anak.

Perubahan yang kasat mata antara lain dalam cara berpakaian. Para perempuan tidak lagi mengenakan *sewe* (kain) sebagai pakaian sehari-hari, dan menanggalkan kerudung yang dilapisi *remong* (berbentuk seperti mukena). Kini mereka bercelana atau bergaun selutut dengan blus kaos, seperti pakaian yang dikenakan oleh para perempuan muda pendatang yang bekerja sebagai buruh. Pengajian rutin setiap minggu di

3 Penduduk setempat, baik pemilik maupun penyewa pondokan, lebih kerap terdengar menggunakan istilah 'kos-kosan' atau 'indekosan' (dari *in de kost* [Belanda] yang berarti 'tinggal di tempat sewaan'). Demikianlah, penyewa yang rata-rata berusia muda suka disebut 'anak kosan'.

4 Pontèn adalah istilah yang dipakai penduduk setempat, mungkin mengambil dari kata bahasa Belanda fontein (pancuran air). Dulu pemerintah Hindia Belanda sempat melakukan pembangunan fasilitas umum di permukiman penduduk pribumi di kota-kota (kampung verbetering), yang mencakup jaringan air bersih yang berujung di pancuran-pancuran air setempat pada tahun 1920-1930 an (bd. Dick 2002:161-179).

setiap gang bergeser menjadi setiap bulan dan hanya dilakukan per RT/RW. Pengajian rutin tiap minggu hanya milik kelompok jemaah tertentu atau dilakukan di rumah tokoh agama. Meski begitu, dalam percakapan dengan para ulama setempat, masih disebutkan bahwa ciri komuniti Rungkut Lor adalah komuniti Islam yang 'fanatik'. Mungkin ini adalah suatu bentuk pernyataan "identitas defensif" yang merujuk ke "ingatan kolektif" tentang aktifnya syiar Islam di sini. Menurut Castells, identitas defensif merupakan gejala reaksi komuniti lokal terhadap serbuan-serbuan orang, barang, dan gagasan dari luar yang tidak mampu mereka kendalikan (1997:60-64).

Dikotomi Warga Asli-(Buruh) Pendatang di Komuniti dan Pabrik

Asal-usul dan pembedaan kewargaan secara sosial. Penjualan tanah penduduk asli Rungkut Lor kepada industri sekitar tiga dasawarsa yang lalu disertai oleh kesepakatan melalui *rembug desa* antara warga dengan industri, yang meliputi kesediaan industri untuk memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerja. Namun ketika itu hanya sedikit warga asli yang menanggapi tawaran menjadi tenaga kerja di pabrik, karena hasil penjualan tanah membuat kemampuan ekonomi rumah tangga penduduk setempat meningkat. Lurah Rungkut kemudian mencari tenaga kerja dari daerah di sekitar Jawa Timur untuk menjadi tenaga kerja di kawasan industri Rungkut. Para pencari kerja dari kota-kota di Jawa Timur dan Madura berdatangan ke Rungkut. Beberapa di antaranya pendatang dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTT. Kedatangan buruh dari luar Rungkut memunculkan kategori warga asli Rungkut dan pendatang.

Ada beberapa pengertian yang diberikan masyarakat terhadap istilah warga asli dan pendatang. Mengenai kategori warga asli, dapat berarti:

- Keturunan atau kerabat dari warga asli Rungkut lainnya. Sebelum industri berdiri di Rungkut dan menarik pendatang ke sini, perkawinan antarkerabat dekat (antarsepupu derajat pertama) cukup lazim. Konon sebabnya antara lain karena dulu penduduk Rungkut bermukim dalam kelompok-kelompok rumah yang penghuninya berkerabat dekat, dan jarak antarkelompok rumah cukup jauh, sehingga perjodohan pun terbatas pada kalangan terdekat. Kini, bertolak dari kriteria ini, pendatang yang masih mempunyai hubungan

kerabat dengan orang asli Rungkut akan dimasukkan ke dalam lingkaran warga asli.
- Warga yang lahir dan menetap di Rungkut. Pengakuan ini termasuk bagi mereka yang orang tuanya berasal dari luar Rungkut, namun sudah cukup lama tinggal di sini.

Sedangkan pendatang dibedakan menjadi pendatang menetap dan pendatang musiman. Pendatang menetap adalah pendatang yang mempunyai tanah dan rumah di Rungkut. Sedangkan pendatang musiman adalah pendatang yang tinggal di pondokan (milik pendududuk asli) karena tidak memiliki tanah dan rumah. Meskipun tidak punya tanah dan rumah, pendatang musiman banyak yang telah tinggal di pondokan-pondokan di Rungkut Lor lebih dari 10 tahun.

Dari golongan pendatang musiman ini bagian terbesar adalah para buruh yang bekerja di kawasan SIER. Ciri demografis sosial yang menonjol adalah bahwa kebanyakan dari mereka berusia muda, antara 17-30 tahun, lajang, pendatang dari desa, dan tinggal di kamar-kamar pondokan. Ada pula buruh yang sudah menikah dan tinggal bersama keluarganya di Rungkut. Di antara pasangan semacam ini, ada yang salah satunya bekerja sebagai buruh industri, ada pula yang keduanya bekerja. Di kalangan penduduk asli, khususnya para orang tua, terdapat pandangan stereotipik bahwa buruh pendatang muda itu adalah golongan yang kurang bertatakrama dan/atau beribadat. Penilaian demikian dikaitkan misalnya dengan cara berpakaian yang serba terbuka atau ketat khususnya pada perempuan pendatang, pada pola pergaulan antarjenis kelamin yang konon relatif bebas (misalnya saling bertamu di malam hari di kamar-kamar pondokan).

Di antara warga asli dan pendatang, terutama pendatang musiman, terdapat semacam batas yang tak kasat mata namun nyata akibatnya dalam berbagai aspek kehidupan sosial setempat.

Pembedaan kewargaan dan akses ke sumber daya lokal. Dari kalangan warga asli dan pendatang menetap muncul orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama (Islam), tokoh masyarakat (para penggiat atau pengurus di institusi setempat dari RT, RW, sampai ke Kelurahan), dan *sesepuh*. *Sesepuh* merupakan sebutan bagi orang yang dituakan dan dihormati berkat pengalamannya baik sebagai tokoh masyarakat maupun tokoh

agama. Dari kalangan pendatang menetap ada yang menjadi tokoh masyarakat karena sempat menjadi pengurus di tingkat RT/RW/Kelurahan; ada pula yang menjadi tokoh agama berkat kontribusinya bagi kehidupan beragama di Rungkut, seperti membangun masjid atau musholla atau memimpin pengajian berjamaah secara rutin di rumahnya. Demikianlah pengaruh warga asli dalam kegiatan keagamaan mulai tersaingi oleh pendatang menetap. Tetapi masih banyak ruang bagi warga asli untuk mengukuhkan posisinya dalam kehidupan komuniti, dengan membangun jaringan keke-rabatan dalam kepengurusan pasar, kegiatan komuniti, maupun kegiatan partai.

Jaringan kekerabatan penting untuk mempertahankan kedudukan warga asli dalam kepengurusan pasar, karena pasar merupakan sumber penghasilan yang penting bagi mereka. Telah disebutkan bahwa pasar ini diawali oleh penduduk setempat yang membangun kios-kios di sana berdikit-dikit; karenanya. orang Rungkut selalu menyebutnya sebagai "pasar rakyat". Kemudian pasar diresmikan pada tahun 1982 oleh pemerintah, dan sejak itu pemerintahlah yang membangunnya. Harga kios pun meningkat pesat, kini mencapai jutaan rupiah. Pendapatan para pengurus pasar diambil dari SHU (Sisa Hasil Usaha), di antaranya dari pendapatan parkir yang mencapai 40 juta rupiah. Selain digunakan untuk mengupah pengurus pasar, pendapatan pasar dalam bentuk SHU didistribusikan untuk kegiatan keagamaan (30%), fakir miskin/yatim-piatu dan beasiswa (25%), untuk pengembangan pasar (25%), dan untuk pengembangan lingkungan (20%) yang dikelola setiap triwulan. Dengan demikian, pasar memang merupakan sumber daya yang penting bagi komuniti Rungkut Lor.

Selain kepengurusan pasar, warga asli juga diprioritaskan sebagai pengurus kampung. Perbedaan perlakuan warga asli terhadap pendatang ini tetap ada meski tidak diakui oleh warga asli. Dalam pemilihan ketua RT/RW, hanya pendatang menetap dan warga asli yang berhak menjadi kandidat ketua RT/RW, sedangkan bagi warga pendatang musiman hanya tersedia 'ruang' tipis untuk menjadi pengurus kampung, yaitu bila tidak ada lagi calon dari kalangan warga asli atau pendatang menetap, jadi sebagai calon cadangan.

Hak istimewa (*privilege*) warga asli memang bersumber dari status sebagai keturunan orang-orang yang jauh lebih lama atau "sejak awal" telah

menetap di Rungkut, sehingga keturunannya dipastikan lebih mengetahui situasi daerah dan masyarakat setempat dibandingkan pendatang, meski telah menetap lebih dari 10 tahun di Rungkut. Anggapan ini mencerminkan suatu bentuk "identitas defensif" (Castells, 1997), "ingatan kolektif" warga asli dianggap lebih sahih karena dibangun oleh pengalaman panjang yang diwariskan turun temurun; sedangkan pendatang, apalagi pendatang musiman, hanya tahu sebagian-sebagian saja.

Selanjutnya, jaringan kekerabatan yang dibangun oleh warga asli baik di kepengurusan pasar maupun di kepengurusan RT/RW menjadi 'motor' bagi aktivitas mereka di kepengurusan partai. Hubungan antarwarga asli Rungkut terlihat dalam aktivitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Rungkut. Rungkut merupakan basis PKB dan mayoritas pengurusnya adalah penduduk asli Rungkut. Mereka memanfaatkan kekuatannya untuk mempengaruhi warga pendatang agar mendukung para calon legislatif atau kepala daerah usulan PKB. Beberapa *sesepuh* maupun tokoh menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh dukungan massa sebagai calon legislatif daerah tahun 2004. Pengaruh mereka sangat kuat sehingga hampir tidak ada partai lain yang mampu merebut atau sekedar menandingi kekuatan massa PKB.

Dengan mempertahankan jaringan kekerabatan di kepengurusan RT/RW maka akses terhadap bantuan pemerintah pun mudah diprioritaskan bagi warga asli. Bantuan pemerintah tersebut berupa raskin (beras miskin), kartu JPS (Jaring Pengaman Sosial) - sebuah kartu yang diperuntukkan bagi penduduk yang tak mampu membayar pelayanan kesehatan - dan bantuan sembako (sembilan bahan pokok). Resminya, yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah adalah keluarga yang hanya mempunyai satu orang pencari nafkah dan memiliki banyak anak. Namun warga asli yang dapat menerima bantuan ternyata lebih luas, tidak terbatas pada yang memenuhi kriteria resmi itu.

Pembedaan kewargaan secara administratif. Terutama sejak pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KIPEM (Kartu Penduduk Musiman) pada tahun 1995, akses terhadap bantuan pemerintah diprioritaskan bagi pemilik KTP Surabaya. KIPEM merupakan kartu tanda pengenal bagi penduduk pendatang musiman yang tidak memiliki tempat tinggal permanen di Surabaya. Untuk mengurus KIPEM, seorang pendatang

musiman harus membawa surat jalan dari daerah asal dan mendaftar sebagai penduduk baru di RT setempat. Setelah mendapat ijin RT/RW, pendatang musiman dapat mengurus KIPEM di kelurahan. Sedangkan KTP Surabaya penting dimiliki warga untuk dapat mengakses kartu JPS. Bagi pendatang yang mampu membeli tanah dan membangun rumah di Rungkut boleh memiliki KTP Surabaya, karena memiliki tempat tinggal menetap. Dari kalangan buruh yang bisa memiliki KTP Surabaya terutama adalah para buruh perempuan Sampoerna. Penghasilan mereka yang yang relatif besar memungkinkan mereka menyisihkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah di Rungkut. Namun lebih banyak buruh yang tidak mampu mengubah statusnya jadi penduduk tetap, dan karenanya administrasi kependudukan ini menguatkan dikotomi antara warga asli dan penduduk musiman.

Pembedaan kewargaan di pabrik. Dikotomi antara pendatang dengan warga asli tidak hanya 'hidup' di komuniti namun juga terbawa hingga ke pabrik. Sumbernya terletak pada saat pabrik mulai membatasi dan menolak warga asli Rungkut yang ingin bekerja di pabrik. Pembatasan dan penolakan itu dipicu oleh konflik antara majikan-buruh atau mandor-buruh yang terjadi di pabrik, seperti kasus-kasus berikut ini.

> Seorang warga asli yang menjadi buruh di sebuah pabrik menuntut pembayaran pesangon dari masa kerjanya yang telah berakhir sebagai buruh kontrak waktu tertentu (KKWT). Pabrik tidak memperpanjang kontraknya karena kinerjanya dianggap buruk: ia hanya bekerja selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu. Protes terhadap mandor dilakukannya di pabrik dan tempat tinggal mandor tersebut. Penyerangan tidak dilakukannya sendiri tetapi bersama sekelompok pemuda asli Rungkut.
>
> Ketika terjadi PHK terhadap seorang buruh asli Rungkut yang menuntut pabrik untuk menyediakan waktu sholat. Kondisi pabrik tempat buruh tersebut bekerja tidak memberikan jam istirahat dan sholat karena setiap buruh bertanggungjawab pada mesin yang harus terus beroperasi. Saat protes kepada mandornya, buruh tersebut justru menuai PHK daripada persetujuan tuntutan. Protesnya tidak didukung oleh teman di pabrik karena mayoritas buruh yang bekerja di tempat itu adalah pendatang.
>
> Seorang buruh asli Rungkut di-PHK karena melawan perintah mandornya di pabrik. Sebagai warga asli Rungkut ia merasa

> tersinggung ketika ditegur oleh mandor karena kinerja yang buruk. Mandor yang memberi perintah kepada buruh tersebut dipukul dan terjadi perkelahian antara mandor dengan buruh.

Kasus-kasus seperti di atas rupanya lalu merupakan awal pencapan (*labeling*) buruh asli Rungkut sebagai 'pemberontak'. Memang mereka lebih berani melawan pabrik, dan terkadang merujuk cap demikian bagi diri mereka sendiri, karena merasa tidak takut kehilangan sumber penghidupan di kampung halamannya. Pengalaman bekerja di pabrik memberi kesan bagi warga asli bahwa pekerjaan di pabrik adalah pekerjaan rendah yang tidak bermartabat dan seringkali hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Sebagian warga asli yang tidak mau atau tidak diterima bekerja di pabrik membangun pondokan yang disewakan dengan harga 30 hingga 80 ribu per kamar. Sebagian lainnya berusaha membuka warung, menjadi pedagang keliling, atau pedagang di pasar.

Bersamaan dengan itu, berkembang anggapan pada warga asli bahwa pendatang lebih diterima oleh pabrik karena sifatnya yang 'penurut'. Asumsi ini juga dibenarkan oleh para buruh pendatang yang menegaskan alasan kedatangannya ke Rungkut hanya untuk bekerja di pabrik. Sesungguhnya stereotip "pendatang= penurut" itu memuat penilaian agak negatif. Ketika warga asli Rungkut ditolak bekerja di pabrik, permintaan terhadap buruh pendatang semakin besar. Hal ini semakin menguatkan perasaan negatif warga asli terhadap pendatang. Ketidaksukaan tersebut muncul dalam bentuk pencapan dan perlakuan negatif, seperti kasus-kasus berikut.

> Buruh perempuan yang pulang larut setelah menyelesaikan giliran (*shift*) kerja siang/petang atau perempuan yang berangkat untuk bekerja pada shift malam, disebut sebagai perempuan tak bermartabat. Dikembangkanlah wacana "kepantasan" bagi buruh pendatang yang perempuan: tak lazim apabila perempuan masih berada di luar rumah setelah maghrib terutama di atas jam 9 malam. Tuduhan tersebut menjadi senjata untuk menyerang pendatang yang tidak mengadopsi norma masyarakat setempat. Stigma negatif juga dilekatkan pada buruh perempuan yang sekali waktu ikut *cangkrukan* (nongkrong) di warung dengan kelompok laki-laki.
>
> Para perempuan pekerja pabrik yang tinggal di wilayah Rungkut sering diganggu oleh pemuda asli yang sedang *cangkrukan* sambil berjudi atau mabuk.
>
> Buruh pendatang perempuan pemondok juga menjadi sasaran pengusiran pemilik pon-

dokan apabila buruh perempuan tersebut terlihat dengan pria di atas jam sembilan malam. Anehnya, bukan pria yang diusir oleh pemilik pondokan tetapi perempuanlah yang sering menjadi korban pengusiran pemilik pondokan. Pengusiran tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga secara halus melalui rumor yang dilontarkan oleh pemilik pondokan di antara warga asli atau pendatang yang telah menetap.

Buruh pendatang perempuan juga sering dijadikan sasaran gunjingan bila dinilai berperilaku menyimpang dari kebiasaan masyarakat. Tindakan saling siram di tempat pondokan saat ulang tahun merupakan salah satu perilaku yang dilihat menyimpang dari norma masyarakat Rungkut, sehingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengusiran penghuni pondokan.

Tidak semua tindakan buruh pendatang musiman yang terkategori sebagai penyimpangan norma cukup diselesaikan oleh pemilik pondokan. Apabila perilaku menyimpang dianggap cukup ekstrem, maka sanksi dijatuhkan kepada pelakunya atas nama "masyarakat setempat".

Berpacaran di pondokan hingga larut malam dianggap perbuatan yang patut dihukum warga asli menganggap diri mereka berhak 'menggerebek' atau menangkap basah pendatang musiman tersebut. Korban akan diminta membayar uang sebesar 50 ribu rupiah kepada penangkap basah kemudian membayar uang dengan jumlah yang sama kepada pengurus RT/RW dan pergi dari wilayah tersebut. Pemuda asli terlibat sekaligus menjadi aktor utama penggrebegan tersebut. Meskipun warga asli juga pernah menjadi korban penggrebegan, mereka tidak dijatuhi sanksi berupa uang dan tidak diusir dari tempat tinggal. Mereka hanya diminta untuk membersihkan selokan sebagai bentuk sanksi sosial. Dalam hal ini terjadi pembedaan bentuk sanksi bagi pendatang dan warga asli yang menegaskan dikotomi diantara keduanya.

Penggerebekan tidak hanya dilakukan terhadap perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat, tetapi juga berlaku bagi ketidakpatuhan terhadap sistem pemerintahan lokal yang mewajibkan pembuatan KIPEM.

Razia KIPEM dilakukan oleh pengurus RT/RW dan kadangkala dibantu oleh aparat kepolisian. Pengurus RT/RW akan terkena wajib lapor dan mendapat *briefing* dari kepolisian selama satu bulan bila didapati salah satu warga musimannya menjadi target operasi kepolisian. Meskipun kegiatan ini dilakukan di setiap gang, namun tidak terjadwal dan tidak dilakukan setiap bulan. Biasanya dilakukan malam atau dini hari saat penghuni pondokan tidur. Bagi pendatang musiman yang tertangkap saat razia KIPEM diwajibkan mengurus KIPEM saat itu juga.

Warga asli pun memanfaatkan situasi ini dengan meneguhkan aturan masyarakat seperti: (1) jam malam untuk kunjungan maupun untuk berada di luar pondokan; (2) menegaskan kewajiban iuran (iuran sampah dan pengganti ketidakikutsertaan dalam kerja bakti) bagi penghuni pondokan; dan (3) aturan-aturan lain yang bertujuan untuk menjaga ketenangan kampung. Namun pengecualian sanksi masyarakat berlaku bila pelanggaran dilakukan oleh pemuda asli yang mabuk atau perkelahian antar gang. Aparat RT/RW setempat justru tidak mampu menindak pelanggaran tersebut. Untuk mengatasi persoalan dengan sesama warga asli, biasanya seorang *sesepuh* Rungkutlah yang digunakan sebagai mediator penyelesaian konflik.

> Sejak buruh asli Rungkut ditolak masuk pabrik maka pemuda asli banyak yang menganggur atau merantau ke kota atau pulau lain seperti Jakarta atau Sulawesi. Sebagian pemuda asli yang menganggur terjerumus dalam aktivitas kenakalan sekaligus kejahatan. Perkelahian antar gang dan antar kelompok pemuda asli selalu terjadi dengan merusak rumah penduduk atau luka serius yang dialami tidak hanya oleh pelaku namun juga oleh masyarakat setempat. Selain berkelahi mereka juga mencuri barang milik penghuni pondokan.

Beberapa tokoh masyarakat — diantaranya bekerja sebagai tenaga keamanan pabrik — yang merasa terganggu dengan aksi pemuda asli tersebut menginisiasi pembentukan organisasi P2R (Paguyuban Pemuda Rungkut) yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan bagi pemuda asli yang menganggur tanpa harus mewajibkan mereka terlibat dalam Karang Taruna. Para pemuda yang tergabung dalam P2R dianggap 'nakal' oleh pemuda asli yang tergabung dalam Karang Taruna. Mereka yang tergabung dalam Karang Taruna umumnya masih berada dalam usia sekolah dan tidak bersedia bergabung dengan pemuda asli yang dianggap 'nakal'. Begitu pula sebaliknya.

Berdirinya P2R berhasil mengumpulkan para pemuda asli yang dianggap 'nakal' dalam kegiatan bersama. Organisasi ini dimanfaatkan oleh warga sebagai tenaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan. Mereka pun pernah disewa sebagai tenaga keamanan saat pabrik mengadakan acara. Salah satu pengguna jasanya adalah Maspion. Bahkan beberapa anggota P2R mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga keamanan di pabrik maupun perumahan. Berdirinya P2R telah berhasil mengurangi kenakalan dan kejahatan pemuda. Wilayah Rungkut Lor yang semula

menjadi target operasi polisi nomor satu berangsur-angsur berubah menjadi wilayah yang aman. Namun bagi buruh yang tinggal di Rungkut Lor, P2R memaksa mereka mengeluarkan uang keamanan di luar uang keamanan kampung untuk menjaga barang mereka saat pulang kampung.

Siasat Buruh Sehari-hari. Sejauh ini kita lebih menyoroti kepentingan pihak warga asli. Namun dikotomi warga asli dan pendatang juga memperlihatkan kepentingan yang dimiliki oleh pendatang. Buruh yang tinggal di komuniti Rungkut Lor lebih banyak terdiri dari warga pendatang musiman daripada warga pendatang menetap. Dalam kehidupan sosialnya, buruh memilih kelompok yang homogen atau yang senasib dengan dirinya, dan kriteria yang lazim adalah kesamaan daerah asal dan/atau kesamaan tempat kerja.

- **Kelompok yang homogen** yang terdiri atas sesama buruh dapat ditemui dalam bentuk informal seperti kelompok *cangkrukan* dan dalam bentuk formal berupa kelompok pengajian. Buruh bisa mempunyai banyak kelompok pengajian yang dibentuknya sendiri bersama teman sesama pendatang. Mereka yakin kelompok pengajian tidak akan menjerumuskan mereka sekaligus bisa memperdalam ilmu agama. Sedangkan kelompok *cangkrukan* terbentuk dengan sendirinya berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Melalui kelompok ini buruh bertukar informasi tentang lowongan kerja bila kebetulan tengah menganggur. Di sini mereka juga bisa mendapatkan kredit barang murah atau reparasi gratis untuk barang elektronik.
- **Kegiatan berbiaya murah** dan tidak mengganggu jam kerja dan jam istirahat. Penghindaran kegiatan dengan warga asli di komuniti acap dilatari kesulitan biaya. Kegiatan bersama warga asli kerap melibatkan sejumlah besar orang, dan tuan rumah biasanya menyediakan konsumsi. Syarat sosial ini sulit dipenuhi buruh pendatang. Lain halnya dengan kegiatan sesama buruh pendatang: tuan rumah tidak perlu menyiapkan konsumsi dan tempat untuk banyak orang. Kegiatan sesama buruh biasanya tidak lebih dari 11 orang.
- **Bukan sumber pergunjingan** tetangga yang dapat mengancam posisinya di masyarakat. Kelompok kegiatan di komuniti tidak bisa dilepas dari efek negatif seperti pergunjingan/gosip. Beberapa buruh mengurungkan niat untuk rutin menghadiri kegiatan komuniti

karena takut menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Misalnya, buruh enggan mengikuti pertemuan SB di komuniti jika tuan rumahnya telah mengetahui bahwa pondokannya digunakan untuk aktivitas SB, karena tuan rumah tidak segan untuk menegur atau mengusir penyewa jika tidak memperhatikan larangannya.

Demikianlah, buruh cenderung mengikuti kegiatan dalam komuniti lebih disebabkan oleh pertimbangan agar ia tidak terkucil dalam komuniti. Tetapi mereka akan menghindari kegiatan komuniti ketika ketegangan antarlapisan sosial semakin kuat. Ini mirip yang pernah dikatakan Louis Wirth tentang mentalitas kaum minoritas. Dari pengalaman pribadi maupun wacana kalangan sendiri, buruh memiliki ketakutan sekaligus perasaan rendah diri apabila berhadapan dengan penduduk asli. Mereka sering menggunakan alasan capek akibat kerja di pabrik untuk menghindari kewajiban terlibat dalam kegiatan komuniti. Beberapa faktor bagi penghindaran ini adalah: (a) takut dituduh mengemis atau minta makan atau belas-kasihan orang asli; (b) buruh tidak mampu membayar iuran kegiatan komuniti karena prioritas pemenuhan kebutuhan lainnya; (c) takut menghadapi pelecehan seperti dipergunjingkan oleh warga asli yang mengikuti kegiatan tersebut.

Industri dan Dikotomi Warga Rungkut Lor. Demikianlah kita lihat betapa kemunculan industri merupakan prakondisi bagi dikotomi antara warga asli dan pendatang, dan akhirnya turut menguatkannya. Dikotomi yang terjadi di Rungkut Lor itu meruntuhkan asumsi awal kami bahwa di kawasan industri yang buruhnya relatif homogen dari segi etnis, akan ada hubungan sosial yang lebih baik antara pribumi dan pendatang yang berasal dari 'daerah budaya' yang sama. Namun data mengukuhkan teori-teori etnisitas, bahwa identitas etnis dapat mengendur dan mengerut. Di Rungkut Lor, di kalangan sesama orang Jawa Timur, kejawatimuran tidak lagi penting, dan rujukan penting bagi identitas dalam interaksi mereka adalah daerah asal. Pembedaan ini lalu menjadi mantap karena berlapis-lapis dimensi yang dirujuk: asal-usul (wilayah dan sosial), sumber penghidupan, cara hidup, dan kepentingan. Pembedaan juga dimantapkan oleh sistem administrasi kependudukan. Yang lebih penting adalah temuan bahwa dikotomi identitas asli-pendatang ini juga posisional, karena mendudukkan warga asli lebih tinggi daripada pendatang. Kita lihat bahwa dimensi ekonomi di sini

menjadi landasan pembedaan, tetapi digabung dan digunakan silih berganti dengan dimensi-dimensi lain: sosial, politik, dan budaya (termasuk agama).

Bagi warga asli, identitas utama para pendatang musiman itu adalah buruh. Buruh artinya penghasil uang, artinya konsumen potensial. Dalam kenyataannya, memang pendatang musiman hanya dianggap sebagai konsumen dari barang kebutuhan yang dijual oleh warga asli yang memiliki pondokan, warung, atau saluran PDAM. Memang sempat ada kasus istimewa, yakni ketika seorang pendatang musiman menjabat sebagai pengurus RT, warga asli menerima identitasnya sebagai pengurus RT. Namun demikian mereka tak pernah lupa menyebutkan identitasnya yang dominan, sebagai buruh.

Dengan demikian, dikotomi yang terjadi di komuniti telah memarginalkan pendatang musiman dengan identitas buruh. Sikap dan tingkah laku warga asli mirip dengan yang dikatakan Herbert Blumer (1961) tentang kompleks sikap golongan dominan, yaitu: (1) perasaan lebih unggul; (2) perasaan bahwa golongan yang lebih rendah, secara intrinsik adalah orang asing, orang lain (dalam kasus Rungkut Lor sebaliknya: pendatang atau orang lain adalah lebih rendah); (3) perasaan memiliki hak (*claim*) atas wilayah privilese dan keuntungan tertentu, dan (4) perasaan takut dan curiga (*jealousy*) bahwa golongan minoritas akan mengambil hak-hak istimewa golongan dominan. Namun kita bisa melihatnya dari sisi lain. Pembatasan akses bagi pendatang ke kepengurusan RT/RW dan parpol, ke sumber-sumber daya penting lain, dan tindakan penegakan norma dengan landasan stereotip identitas tunggal pendatang sebagai buruh. Pendek kata, politik identitas warga asli adalah benteng pertahanan mereka terhadap perkembangan situasi materi dan sosial yang tidak dapat mereka kendalikan sendiri. "Keaslian" berikut segala privilesenya, dengan begitu, adalah identitas defensif.

Menggalang solidaritas bagi buruh di komuniti?

Paparan di atas menimbulkan bayangan suram bagi kemungkinan menggalang solidaritas buruh lintas sektoral ("rakyat pekerja") dalam komuniti. Memperjuangkan kepentingan buruh tidak terlepas dari identitas yang memunculkan perlawanan antarkelas maupun kerjasama intrakelas di pabrik, serta ketegangan dan

kerjasama intra maupun antarlapisan di komuniti. Perjuangan buruh merupakan perjuangan yang dilakukan setiap hari, setiap jam kerja, setiap bertemu dengan keluarga dan teman di komuniti — sebagai perjuangan antarlapisan sosial — maupun di pabrik — sebagai perjuangan antarkelas produksi. Telah ditunjukkan penomorduaan kedudukan buruh dalam struktur administrasi kependudukan dan struktur sosial di Rungkut Lor; tetapi pada saat-saat tertentu mereka diangkat ke kedudukan yang lebih tinggi, sebagai golongan ekonomi yang lebih mampu daripada rata-rata warga, yakni bila sedang ada keperluan penggalangan dana. Namun terlihat pula bahwa dinamika status buruh yang kontekstual ini merupakan hasil keputusan pihak warga asli, bukan hasil kesepakatan antara warga asli dengan buruh pendatang. Kasus Rungkut Lor ini menunjukkan betapa rentan kedudukan buruh dalam komuniti, dan temuan ini harus dikembalikan ke pertanyaan tentang kemungkinan mengorganisasi buruh bertolak dari komuniti.

Akan tetapi sesungguhnya ketegangan hubungan dalam komuniti telah mendorong upaya buruh untuk menyiasati posisi diri mereka berhadapan dengan warga asli. Meskipun buruh pendatang memiliki halangan untuk mengikuti kegiatan masyarakat, mereka selalu mengundang *sesepuh* atau tokoh masyarakat dalam perayaan pribadi/keluarga buruh. Undangan tersebut selain kebutuhan normatif juga menjadi kebutuhan untuk mendapatkan legitimasi bagi keberadaan mereka dalam komuniti setempat. Kepercayaan warga asli penting bagi pendatang untuk membantu di saat sulit, menjamin keamanan tempat tinggal, memahami situasi pekerjaan yang harus dihadapi buruh setiap hari sehingga dapat 'menembus' akses bantuan pemerintah.

'Siasat' tersebut, entah siapa buruh yang memulainya, berhasil menimbulkan empati dari warga asli terhadap mereka. Warga asli yang bekerja sebagai keamanan pabrik dan punya peluang untuk memasukkan orang ke dalam pabrik, orang tersebut akan memilih buruh pendatang. Pendatang dinilai sebagai orang yang meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk satu niat, yaitu bekerja. Niat ini dinilai sebagai jaminan bagi kualitas kerja mereka dalam proses produksi, yang akhirnya akan memberikan kredit pula bagi sang buruh keamanan — warga asli — yang memasukkannya. Di beberapa wilayah Rungkut Lor, buruh pendatang musiman yang telah tinggal lebih dari sepuluh tahun berhubungan cukup

akrab dengan warga asli, sehingga menjamin uluran tangan spontan dari warga asli dalam peristiwa buruk maupun baik yang memerlukan bantuan. Misalnya warga asli akan membantu menyediakan perlengkapan untuk acara hajatan, dan bila ada kematian akan mengurus pemulangan jenazah ke kampung halaman, sekalipun pendatang tidak memiliki KIPEM.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa perkembangan pengalaman bersama bisa membuka peluang bagi terbentuknya saling pengertian. Tentu ada hambatan dari sisi demografi buruh industri, yakni *turnover* buruh yang tinggi akibat PHK, relokasi industri ke Pasuruan, dan sebagainya, yang memperkecil peluang penumbuhan saling pengertian atas dasar pengalaman bersama. Namun data kami memperlihatkan pula bahwa kini buruh yang terlempar dari pabrik tidak serta merta pergi meninggalkan Rungkut Lor dan kembali ke desa asalnya. Banyak juga yang bertahan tinggal di Surabaya, di Rungkut Lor, karena peluang untuk mencari uang bagaimana pun lebih besar di kota daripada di desa. Beberapa beralih ke usaha di sektor informal seperti berdagang kecil-kecilan. Jadi masih ada kemungkinan bagi penggalangan kebersamaan dengan penduduk asli.

Menjelang penutupan tulisan ini, boleh kiranya pembaca disarankan menengok sebuah hasil studi tentang kisah sukses perjuangan buruh berbasis komuniti, yakni di Nowa Huta, Polandia (Alison Stenning, 2003). Di Nowa Huta komuniti industri relatif lebih terpadu karena sejarah pertumbuhan industri yang bersamaan dengan pertumbuhan komuniti sejak awalnya. Jadi identitas kolektif di tempat ini memang terbentuk berdasarkan sejarah panjang kesamaan pengalaman dan saling ketergantungan yang besar antara industri dan komuniti penopangnya. Bahkan di Nowa Huta, organisasi buruh bekerja demi kelangsungan hidup komuniti buruh. Ini bukan berarti bahwa model Nowa Huta harus diadopsi dan diaplikasikan begitu saja, tetapi kasus Nowa Huta memperlihatkan bahwa diperlukan keuletan dan daya tahan tinggi untuk menekuni upaya menggalang solidaritas intragolongan maupun antargolongan dalam masyarakat yang sudah memiliki infratruktur kuat bagi kerjasama.

Jika temuan penelitian Rungkut Lor ini akan coba disumbangkan bagi gagasan pengorganisasian yang menggunakan pengertian 'rakyat pekerja', maka hambatan yang harus dihadapi adalah mengikis prasangka-pra-

sangka antargolongan yang hidup dalam komuniti. Jadi memperjuangkan nasib buruh hendaknya bukan berakhir pada kegiatan merumuskan agenda organisasi buruh saja, melainkan mempertimbangkan program-program yang dapat merangkum seluruh komuniti. Mungkin titik tolaknya dari program-program yang menumbuhkan pengertian tentang fungsi positif pihak lain bagi kehidupan masing-masing dan bagi komuniti secara keseluruhan; tentang persoalan yang dihadapi pihak lain yang mungkin melatari sikap negatif yang dirasakan selama ini. Identitas "rakyat pekerja" seyogyanya tidak hanya memperkaya strategi pengorganisasian buruh tetapi juga harus mampu memperkaya eksistensi warga asli yang juga merasa terancam dengan kehadiran buruh pendatang di komunitinya. Bila ditemukan solusi atas hambatan-hambatan tersebut, maka setidaknya terdapat peluang untuk memulai pengorganisasian berbasis komuniti.

Daftar Rujukan

Bauman, Zygmunt. 1985. "Class, Social", dalam Adam & Jessica Kuper (pny.). *The Social Science Encyclopedia*. London, dll.: Routledge & Kegan Paul. Hlm.112-113.

Bottomore, Tom (pny.). 1985. *A Dictionary of Marxist Thought*. England: Blackwell Publisher Limited.

Dick, Howard W. 2002. Surabaya, *The City of Work: A Socioeconomic History 1900-2000*. Athens: Ohio University Press.

Hadiz, Vedi R.1995. "New Organising Vehicles in Indonesia: Origins and Prospects", dalam Jane Hutchison & Andrew Brown (eds.). Organising Labour in Globalising Asia. London: Routledge. Hal. 108-126.

Maria Dona Dewi P. 2004. Institusi Pengupahan Kabupaten/Kota: Studi Kasus Cilacap, Sidoarjo, Gresik. Seri *Working Paper* AKATIGA No. 20.

Munck, Ronaldo. 1988. "Labour Dilemmas and Labour Futures", dalam R. Munck. *The New International Labour Studies: An Introduction*. London & New Jersey: Zed Books, Ltd. Hlm. 3-23.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. 6th Edition. (terjemahan Alimandan). Cetakan ke 2. Jakarta: Prenada Media.

Setia, Resmi. 2005. *Gali Lubang Tutup Lubang: Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Stenning, Alison. 2003. *Shaping the Economic Landscape of Post-Socialism? Labour, Workplace and Community in Nowa Huta, Poland*. http://www.nowahuta.info/ publications/stenning_antipode.pdf.

UPAYA MEMADUKAN PENELITIAN DAN PRAKSIS PERUBAHAN

SEBUAH REFLEKSI ANTARA INTELEKTUAL DAN AKTIVISME

Ika Wahyu[1]

Abstract

The description is trying to integrate the researchers' and the activists' interests. Such integration also means the effort of creating the convergence spot between the organic intellectual and the mechanic intellectual basics of thinking, between the theoretical and practical interests, and between the academic and public interests.

Peran intelektual dalam perancangan dan perubahan sosial telah lama menjadi bahan perdebatan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Secara ringkas, bisa digambarkan bahwa sebagian berpendapat bahwa intelektual seharusnya "berumah di atas angin." Artinya, tugas utamanya adalah bergelut dengan teori dalam bidang yang dipelajarinya di universitas atau lembaga-lembaga penelitian, karena peran seperti itulah yang memang harus dimainkannya dalam proses perubahan sosial. Biarlah para politisi, teknolog, dan ekonom saja yang terlibat dalam perancangan dan perubahan sosial. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa intelektual seharusnya "turun ke bumi," berpar-tisipasi langsung dalam proses perancangan dan perubahan sosial. Perdebatan yang kelihatan terlalu "hitam-putih" itu tampaknya kini sudah mulai dilupakan. Bukan saja karena keduanya sama-sama benar sekaligus sama-sama salah,

[1] Peneliti pada Yayasan AKATIGA

atau karena masing-masing punya kelemahan epistemologis sekaligus saling melengkapi, tetapi juga karena terlalu "hitam-putih" dan terlalu "steril", sementara kondisi-kondisi sosial dan politik yang menjadi latar belakangnya terus berubah.

Sekadar contoh, perdebatan itu akan sulit menjelaskan banyaknya aktivis organisasi non pemerintah (ornop) di luar universitas yang melibatkan diri dalam penelitian-penelitian akademis, dan juga sebaliknya, makin banyaknya intelektual universitas yang melibatkan diri dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh ornop-ornop, perancangan sosial, dan pengambilan kebijakan. Memang ini bisa saja menjadi soal pilihan. Namun, jelas jauh lebih kompleks dari sekadar pilihan "berumah di atas angin" atau "turun ke bumi," karena melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur dan formasi kultural, sosial, ekonomi, dan politik, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal, sehingga bukan saja akan menentukan peran intelektual dalam perancangan dan perubahan sosial, tetapi juga menentukan arah dan bentuk keberpihakan intelektual.

Meminjam istilah Gramsci, memadukan antara kepentingan peneliti dan aktivis adalah mengupayakan tercipta titik konvergensi antara basis pemikiran kalangan intelektual organis dan intelektual mekanis, antara kepentingan teori dan praksis dan kepentingan akademis dan publik. Dalam tesisnya yang kesebelas tentang Feuerbach, Marx menyatakan, "sampai saat ini para filsuf baru menafsirkan dunia, soalnya adalah bagaimana mengubah dunia." Ini tentunya bukan sekadar seruan untuk aktivisme membabi-buta. Dari tulisan-tulisannya yang lain jelas dia akan setuju dengan tesis berikutnya: jika kita ingin mengubah dunia, kita harus mempelajarinya secara menyeluruh, hati-hati, dan teliti.

Hal yang selalu dikritik kalangan aktivis terhadap para peneliti atau kalangan akademisi sosial ialah pemisahan antara teori dengan kepentingan. Padahal, menurut Habermas, upaya untuk membersihkan kepentingan itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah kepentingan, yakni kepentingan untuk membersihkan kepentingan dari ilmu-ilmu sosial. Kepentingan pembersihan itu adalah untuk membangun obyektivitas guna mengukuhkan eksistensi ilmu sosial yang setara dengan ilmu alam. Upaya ini sama sekali tidak dirancang untuk memperoleh kebenaran tentatif yang proses pengupayaannya tidak akan pernah mengenal kata akhir dalam

sejarah kehidupan manusia, melainkan merupakan sebuah pencarian legitimasi politik dalam ruang relasi kekuasaan — negara/pemodal *vis a vis* rakyat (lihat Ignas Kleden, 1987; dan Wallerstein, 1996).

Dalam sebuah makalah yang berjudul *Kontestasi antara Massa dan Negara: Massa Tanpa Pemimpin*, antropolog dari Universitas Gadjah Mada, Aris Arif Mundayat menyatakan, dominasi kapitalisme telah melahirkan sebuah proses pemisahan yang kuat antara lapisan akademik dan buruh. Dalam hal ini lapisan akademik memiliki kehidupannya sendiri yang sama sekali berbeda dengan masyarakat tingkat *grass root* (baca: buruh). Secara sosiologis, kata Mundayat, mereka hidup dalam dunia mereka sendiri-sendiri secara *encapsulated*. Benar bahwa mereka hidup di dalam alam dan bahasa yang sama, namun masing-masing mengembangkan dunianya sendiri-sendiri yang hampir tak pernah bersentuhan. Memang, ada upaya sentuhan lapisan akademik, baik itu yang berbentuk LSM, mahasiswa, akademisi, dan lainnya, ke tingkat *grass root*, namun sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi bagian dari *grass root* itu sendiri. Situasi inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara *late capitalism*. Di banyak negara itu, masyarakat akademik sering kali juga buruh itu sendiri. Mereka adalah buruh terdidik yang benar-benar memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi tokoh, ketimbang menjadi lapisan yang bergantung pada inisiatif lapisan yang lainnya. Di Indonesia, banyak lapisan akademik yang berupaya mengondisikan lapisan buruh untuk memiliki kesadaran ideologis yang kuat, tetapi dalam praktiknya hal itu lebih membuat lapisan buruh itu justru tergantung pada mereka sehingga tidak melahirkan pemimpin dari kalangan mereka sendiri.

Seperti juga gerakan sosial yang menganganken revolusi, hampir semua ilmu sosial juga mengandung unsur utopianisme tertentu. Hal ini jarang disadari oleh peneliti maupun kalangan intelektual yang menganggap kaum aktivis sebagai pemimpin. Bagaimanapun, setiap ilmuwan sosial sesungguhnya mengembangkan gagasan ideal tentang "masyarakat yang lebih baik" dan terus berpikir tentang bagaimana mencapai bentuk semacam itu. Salah satu perdebatan terbesar dalam ilmu sosial adalah mengenai manusia sebagai agen dan struktur sosial. Manusia jelas memiliki kemampuan untuk mengubah aturan, mengubah

struktur masyarakat mereka, atau dengan kata lain memiliki kemampuan sebagai agen yang melakukan perubahan. Revolusi sosial adalah perwujudan nyata dari kekuatan kreativitas manusia dan kehendak-kuasa mengubah struktur sosial. Namun, kita juga harus mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hal apa yang dapat diubah dan seberapa jauh mereka mampu mengubahnya. Setiap gerakan sosial, disadari atau tidak, berangkat dari analisis tertentu terhadap problem-problem sosial yang ada dan metode-metode yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Masalahnya, masih banyak aktivis yang percaya bahwa sebagian besar, bahkan semua, persoalan sosial bisa diselesaikan melalui mobilisasi massa militan, tanpa punya kesabaran menganalisis maksud dan tujuan mobilisasi itu sendiri dengan tajam. Hal inilah yang selalu menjadi perdebatan di antara kalangan intelektual dan aktivis gerakan. Aktivis percaya bahwa suatu perubahan sosial hanya bisa dicapai melalui revolusi dengan penggulingan kekuasaan. Kepercayaan ini jelas bukan tanpa dasar/asumsi tertentu. Kepercayaan ini berakar dari pengetahuan akan perubahan-perubahan sosial yang pernah terjadi dalam sejarah dan pengalaman mereka dalam mengorganisasi rakyat. Dalam pengalamannya, aktivis akan selalu berhadapan dengan tirani kekuasaan (militer). Contohnya, aktivis buruh percaya bahwa buruh akan bisa menang ketika sudah menguasai alat produksi.

Lalu bagaimana dengan pekerja ornop, apakah mereka berperan sebagai aktivis atau intelektual sosial? Ornop menghadapi krisis mendasar karena menyangkut persoalan ideologis, sehingga jika tidak teratasi akan berpengaruh besar terhadap masa depan mereka. Namun, sebagian besar ornop justru tidak menyadari bahwa mereka pada saat ini berada di persimpangan jalan: antara pilihan mengidentifikasikan diri sebagai *civil society* atau masyarakat sipil dalam konteks "demokratisasi" melalui sistem relasi politik dan ekonomi model neoliberalisme, atau memilih jalan sebagai bagian dari "gerakan sosial" dalam rangka transformasi sosial menuju masyarakat demokrasi kerakyatan, yaitu suatu tatanan relasi sosial ekonomi dan politik yang bersendikan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

Selama ini ornop diperebutkan untuk menjadi pendukung kebijakan neoliberalisme, keinginan serta cita-cita untuk tetap menjadi pembela kaum marginal, dan kedaulatan rakyat.

Saat ini kita menyaksikan bangkitnya gerakan perlawanan rakyat di mana-mana atau awal kebangkitan gerakan sosial secara global, tetapi pada saat yang sama kita juga menyaksikan menguatnya paham masyarakat liberal yang dipromosikan melalui penguatan masyarakat sipil yang banyak melibatkan ornop. Akibatnya, tak pelak lagi, ornop berada di persimpangan jalan.

Di sisi lain, ada tendensi di kalangan aktivis demokrasi, mereka cenderung mengikuti rekomendasi solusi *mainstream* agar mereka meninggalkan politik, menyerahkan urusan politik pada elite, dan kembali melakukan kegiatan dalam masyarakat sipil. Harapannya, dengan melakukan itu akan ada sebuah perubahan. Solusi seperti itu, terbukti tidak banyak membuahkan hasil. Gagasan *mainstream* dalam dunia internasional tentang demokrasi menekankan pada pembangunan institusi-institusi pada tingkat atas, menyerahkan urusan politik pada elite, dan prodemokrasi bergerak kembali pada *civil society*. Dengan melakukan itu, gerakan prodemokrasi masih tetap ada. Mereka harus diakui melakukan banyak hal yang bagus. Konsekuensi pilihan itu membuat kalangan aktivis sendiri merefleksikan sistem massa mengambang zaman Soeharto. Aktivis demokrasi terpecah-pecah, menyebar, tidak terorganisasi, dan hampir-hampir tidak memiliki keterkaitan dengan rakyat. Mereka mirip demokrat-demokrat yang mengambang.

Kalangan aktivis selalu berharap penelitian dapat menghasilkan suatu formula ampuh untuk melakukan pengorganisasian atau pun gerakan massa. Kepentingan inilah yang kerap kali bertentangan dengan kepentingan penelitian yang bertujuan eksplanatoris atau pun yang hanya bersifat deskriptif. Berdasarkan itu, peneliti maupun kalangan akademisi dari waktu ke waktu berusaha mencari strategi melakukan penelitian atau yang lebih dikenal sebagai metodologi. Penggunaan metode kualitatif dari waktu ke waktu semakin menguat akibat sangat lemahnya metode kuantitatif untuk menjawab persoalan-persoalan subjektif informan. Dalam metode kuantitatif, peneliti diajak untuk dengan cepat membuat generalisasi segala fenomena yang muncul. Dengan metode kualitatif, banyaknya fenomena atau pun menariknya satu fenomena kadang mengajak peneliti tercebur dan hanyut dalam hal yang ditelitinya. Keduanya memang mempunyai kelemahannya masing-masing, namun di sisi lain, kedua metode tersebut juga

mempunyai kelebihannya sendiri dalam mengungkap fenomena dan realitas sosial. Permasalahan metodologi kerap kali menjadi hal yang membedakan antara peneliti dan aktivis. Bila aktivis masuk dalam masyarakat sebagai bagian dari masyarakat tersebut, maka peneliti dengan konsep akademisnya berusaha menjadi '*outsider*' dari sebuah masyarakat.

Pada awal 1980-an sekelompok aktivis ornop dan mahasiswa yang sering terlibat dalam aksi-aksi sosial lokal mendirikan API (Asosiasi Peneliti Indonesia) dan memperkenalkan apa yang disebut *Participatory Action-oriented Research*, PAR (Penelitian Berhaluan Aksi Partisipatif). Sosiolog Ignas Kleden (1997) menyebutkan bahwa PAR memiliki empat kriteria. *Pertama*, jika dalam penelitian empiris orang-orang yang menjadi sasaran kajian tidak tahu-menahu dengan hasil-hasil temuan riset, maka dalam PAR orang-orang itulah justru yang pertama-tama harus tahu dan menggunakan hasil-hasil temuan tersebut. *Kedua*, orang-orang yang menjadi sasaran penelitian sosial harus tidak diperlakukan sebagai sasaran observasi ilmiah semata, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam penelitian tentang mereka sendiri. *Ketiga*, tujuan PAR bukanlah hanya untuk menghimpun data tentang kelompok orang-orang yang dikaji, tetapi untuk menanamkan pengertian yang lebih baik pada mereka serta memelihara solidaritas terhadap mereka. Ini berarti bahwa pada analisis terakhir tujuan PAR tidaklah hanya pada meluasnya lembaga pengetahuan, tetapi pada mendorong aksi bagi perubahan sosial. *Keempat*, mengingat tujuan-tujuan khusus PAR tersebut, maka penguasaan metodologi penelitian saja belumlah cukup, melainkan harus dilengkapi dengan suatu komitmen sosial yang jelas. Beberapa waktu terakhir ini, muncul juga metode baru yang diharapkan dapat memperlihatkan kehidupan sehari-hari masyarakat yang kita teliti, metode itu dikenal dengan *life story* dan metode *oral history* yang mengajak informan yang kita teliti untuk menceritakan kembali sejarah versi mereka dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki.

Yang menjadi persoalan sekarang: bagaimana peneliti di Indonesia seharusnya memposisikan diri dalam menyikapi ketidakadilan? Apakah penelitian jalan terus dengan mengedarkan kuesioner yang terangkai indah tanpa kepekaan sosial pada perjuangan keseharian mereka yang tersisihkan? Menurut salah seorang dokter humanis, yang juga aktivis dan antropolog,

Paul Farmer, yang dipertaruhkan oleh peneliti bukan hanya perdebatan akademis dengan adu kecanggihan teori, tetapi sebuah sikap keberpihakan terhadap korban struktural sebuah "patologi kekuasaan". Dialektika antara diri seseorang (*the self*) dengan dunia sosio-kultural itu melalui tiga momen dialektika. *Triad* dialektika itu adalah eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi; ketiga momen dialektik ini saling beroperasi secara simultan (Berger dan Luckmann, 1990:xx dan 6). Menurut Bourdieu, kekuasaan bekerja bukan hanya lewat kelas dalam arti hubungan yang tidak adil dengan *means of production* di dunia ekonomi, tetapi lewat produksi dan reproduksi "modal simbolis". Di Indonesia, wacana kebudayaan dipakai untuk meminggirkan penciptaan budaya kaum lemah dan melihat perjuangan sehari-hari mereka sebagai sesuatu yang tidak punya nilai, sebagai cermin peradaban.

Soedjatmoko, satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, (1984:12) menggarisbawahi:

> *...pelaksanaan program-program pemerintah pusat makin lama makin memerlukan penglihatan permasalahan dari dalam dan dari bawah, agar program-program itu dapat berakar kepada dinamika masyarakat sendiri, dan dapat hidup dari kekuatan sendiri dan bukan dipaksakan dari atas.*

Menurut Soedjatmoko juga,

> *...perlunya para peneliti mulai mawas diri dan mencoba mengungkapkan dalam dirinya sendiri* class bias-*nya yang secara tidak sadar mempengaruhi sikap penghadapan dirinya sebagai peneliti dan desain penelitiannya.* Class bias *ini juga nampak pada sangat kurangnya penelitian-penelitian tentang elite Indonesia sendiri, misalnya tentang perubahan-perubahan di dalam susunan dan dinamika internal golongan elite, proses-proses pengambilan keputusan, struktur kekuasaan, serta hambatan-hambatan yang berakar padanya yang menghalangi pelaksanaan yang efektif program-program pembangunan.*

Dalam pandangan aktivis maupun kalangan awam ilmu sosial terdapat stigma bahwa ilmu sosial pada dasarnya tidak jelas. Walau hasil dari sebuah penelitian sosial eksplanatoris/deskriptif mungkin tidak meyakinkan kalangan aktivis atau pun organisasi yang berkepentingan, sebagai peneliti kita tetap harus melakukan penelitian. Bahwa ada sekelompok orang yang menolak temuan kita, tidak berarti bahwa semua orang akan menolaknya, karena mungkin juga ada banyak orang yang terdorong oleh informasi

dan temuan kita yang akan berjuang untuk mengubah kebijakan tertentu. Adalah wajar bahwa ilmu sosial didorong oleh keinginan untuk memperbaiki masyarakat. Kebanyakan orang akan menganggapnya percuma jika tidak mampu menjawab persoalan-persoalan sosial. Namun demikian, kita harus tahu bahwa niat baik ternyata tidak cukup untuk menghasilkan ilmu yang baik pula. Untuk menghasilkan ilmu yang baik kita harus berpikir serius dan kreatif dalam mengidentifikasi masalah, membuat pengamatan kritis terhadap asumsi-asumsi yang ada, bekerja keras untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan, serta berpikir terbuka serta berani mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan keyakinannya.

Ada juga ilmuwan sosial yang tidak berusaha memberikan penjelasan terhadap masalah sosial tertentu dan tidak percaya bahwa ilmu sosial seharusnya dirancang untuk membawa perubahan sosial. Mereka merancang penelitian untuk menafsirkan perilaku manusia, bukan untuk menjelaskan apa yang menyebabkan orang bertindak. Mereka juga cukup terbuka untuk mengakui bahwa ada sekian banyak penafsiran berbeda yang sama sahnya terhadap apa yang mereka teliti. Masyarakat dalam pandangan mereka bukanlah seperti pasien yang gejala-gejala penyakitnya perlu didiagnosa dan disembuhkan, melainkan lebih seperti permainan. Tugas ilmuwan adalah memahami aturan mainnya sehingga kita semua dapat bermain lebih baik.

Bahkan saat mempelajari masyarakat lain, kita mau tidak mau mengambil masyarakat sendiri sebagai perbandingan. Margaret Mead, antropolog Amerika yang tersohor, pernah mengatakan bahwa tujuannya mempelajari masyarakat lain untuk tahu bagaimana mengubah masyarakatnya sendiri. Penelitiannya tentang seksualitas remaja di Samoa memperlihatkan bahwa pubertas bukanlah fase traumatik dalam kehidupan seperti halnya di masyarakat Barat. Apa yang selama ini dianggap alamiah atau tak terhindarkan ternyata bersifat kultural dan terbuka bagi perubahan. Namun, walaupun kesimpulannya mungkin benar, penelitiannya juga memperlihatkan bahaya dari niat baik. Seperti ditunjukkan sejumlah antropolog lain, lingkup informasinya tentang Samoa sangat terbatas dan ia juga keliru menafsirkan banyak hal dalam kebudayaan setempat.

Pengalaman yang didapat seorang peneliti sosial dari bergumul dengan mereka yang 'termarginalkan' bisa menghasilkan karier, tetapi juga bisa menghasilkan senjata untuk menyerang mereka, yang artinya peneliti berhutang besar pada kaum yang 'tersisihkan.' Akhirnya, hubungan antara peneliti dan aktivis gerakan sosial seharusnya mencoba - meminjam istilah Gramsci - 'memberi kerangka kembali' (*reframe*) pada kenyataan sosial yang kompleks dan melihat perbedaan sebagai ketegangan yang perlu ditangani ketimbang diabaikan. Dengan kata lain, diskusi yang sungguh-sungguh mengenai kemungkinan mempertemukan bentuk-bentuk perjuangan yang ada, dengan berbagai kapasitas lembaga/keorganisasian maupun individu, jauh lebih bermanfaat ketimbang menonjolkan perbedaan dan mempertentangkannya.

Daftar Pustaka

Dickinson, Torry dkk. 2001. Fast Forward: *Work, Gender and Protest in A Changing World*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.

Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist Press.

Hardiyanto, Barid. 2005. *Pendidikan Rakyat Petani: Perjuangan Perlawanan Menuntut Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hutchinson, Jane dkk. 2001. *Organising Labor in Globalising Asia*. London: Routledge.

Kompas. 2001. '*Aksi-aksi Politis Para Buruh*', 22 Juni.

Indra Jaya Piliang. 2002. '*Banten: Jawara dan Pustaka*', Suara Pembaruan.30 Mei.

FAST FORWARD:

Work, Gender and Protest in a Changing World

Ika Wahyu [1]

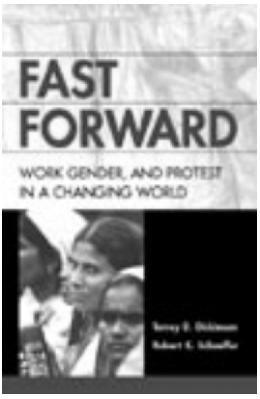

Judul Buku	:	**Fast Forward: Work, Gender and Protest in A Changing World**
Penulis	:	Torry D. Dickinson
Penerbit	:	Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Tahun	:	2001
Tebal	:	301 halaman (termasuk bibliografi dan indeks)

Persoalan buruh dalam dunia yang terus berubah menjadi tema utama yang dibahas dalam buku ini. Buku ini mengulas mulai soal makna kerja, kerja-kerja rumah tangga, hingga protes yang dilakukan buruh dalam kaitannya dengan perubahan teknologi industri yang makin pesat. Sejak awal terbentuk, kapitalisme tumbuh dengan basis feodalisme, oleh karenanya nilai-nilai feodal pun masih belum lepas dari dunia kapitalis yang kita rasakan saat ini. Persoalan perempuan dan kerja perempuan menjadi permasalahan yang selalu muncul dalam setiap fase perubahan.

Untuk memahami gerakan sosial, sangatlah penting untuk memahami perubahan kerja dan konteks kultural tempat gerakan sosial itu terjadi. Dengan mengkombinasikan analisis feminis dan dan sistem dunia (Wallerstein), buku ini melihat secara

1 Peneliti pada Yayasan AKATIGA

global dengan cara yang berbeda. Metodologi sistem dunia berbeda dengan pendekatan penelitian lainnya karena studi ini juga mempelajari isu perubahan dalam dunia modern yang terus berlanjut dan juga yang telah terhenti. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara partisipatoris yakni dengan melibatkan aktivis gerakan sosial yang membantu kita untuk menganalisis sebuah protes sosial dengan cara baru. Teori sistem dunia dan metodologinya digunakan untuk melihat bagaimana dunia modern ini telah berubah dan dipengaruhi oleh perubahan, sekaligus juga melihat siapa saja yang telah berjuang untuk perubahan. Kerangka teoretis ini juga memberikan kontribusi pada identifikasi sebuah proses sejarah. Unit analisis yang digunakan adalah **dunia;** tempat tinggal yang telah terintegrasi secara sistematis oleh sistem ekonomi dunia. Mempelajari perubahan global membutuhkan pencarian data dan analisis yang cukup rumit. Penulis mengakui, selama lima tahun, mungkin hanya sebagian perubahan dari kerja, gender, dan protes yang bisa terekam dalam buku ini. Dengan pendekatan sistem dunia, dijelaskan mengapa dalam masyarakat dunia ketiga terdapat berbagai hubungan produksi sekaligus, di mana terdapat buruh upahan namun juga terdapat tenaga kerja yang mendukung kerja produksi namun tidak diupah.

Buku ini mengeksplorasi konsep rakyat pekerja (*working people*) di mana terminologi *buruh* hanya dipakai bila mengacu pada terminologi *gerakan buruh.* Pada bagian pendahuluan penulis menyajikan analisis holistik atas buruh yang dibayar dan kerja yang tidak diupah baik kerja yang dilakukan laki-laki maupun kerja yang dilakukan perempuan. Dalam sistem kapitalisme yang berlangsung secara global, *ruling class* dan *working class* terbentuk dan bereproduksi secara global. Bila kita melihat kapitalisme sebagai sistem global, maka kita juga harus melihat buruh sebagai kelas buruh global. Dalam hal ini buruh secara global juga memasukkan seluruh kelas rakyat pekerja di dunia (*the world's working class*, hal.17). Dalam definisi kerja-kerja rumah tangga, kerja informal dan segala jenis pekerjaan yang menyumbang pada produktivitas kapital merupakan bagian dari kelompok rakyat pekerja. *Global labor* merupakan kelas yang komposisinya multigenerasi seperti juga kapital global. Konsep *global labor* mengacu pada siapa saja dan tidak mendasarkan diri pada keberadaan upah sebagai penanda posisinya sebagai bagian dari kelompok buruh. Pada konsep tradi-

sional yang membedakan antara budak dan buruh adalah keberadaan upah. Namun, perkembangan industri dan meluasnya makna kerja telah memperluas makna upah itu sendiri.

Saat ini banyak anggota rumah tangga (terutama dengan pendapatan minim) berperan juga sebagai buruh upahan untuk waktu yang tidak tentu dalam hidupnya. Ketika konsep kerja muncul yang selalu dibayangkan adalah laki-laki dengan upah/ bayaran. Penulis dengan tegas menyatakan bahwa ini merupakan konsepsi sempit dari kerja. Faktanya saat ini dari keseluruhan jumlah orang yang bekerja tidak hanya melulu laki-laki, dan mereka mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda. Perempuan melakukan banyak kerja di rumah tangga maupun kerja-kerja rumahan yang merupakan bagian dari proses produksi formal dan banyak di antaranya tidak dibayar. Kerja yang dilakukan perempuan di rumah atau pun kerja rumah tangga dianggap sebagai bagian dari kerja subsisten, di mana *reward* atau upah yang diberikan tidak dalam bentuk formal.

Orang bekerja dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja adalah sumber segala kekaya-an, demikian dinyatakan oleh para ahli ekonomi-politik. Inilah, di sam-ping alam, yang membekalinya dengan material, yang diubahnya menjadi kekayaan. Namun, kerja secara tidak-terhingga juga lebih daripada ini. Ia adalah kondisi dasar utama bagi semua keberadaan manusia, dan hingga batas sedemikian rupa, dalam arti tertentu, mengharuskan kita berkata: kerja itu sendiri yang menciptakan manusia. Konsep kerja tidak dapat dipahami tanpa melihat gender sebagai hal yang terkait dengan relasi sosial. Kerja-kerja rumah tangga maupun kerja-kerja reproduksi yang dilakukan perempuan merupakan sumbangan yang tidak kecil demi berlangsungnya sistem kapital. Dalam pemahaman ekonomi, kerja semacam ini disebut sebagai kerja informal untuk membe-dakan dengan pola kerja yang diupah.[2] Dalam literatur lain (Moore dalam Saptari, 1997:14) dikatakan bahwa definisi tentang kerja sering kali tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga menyangkut kondisi yang melatarbe-

2 Hernando de Soto, seorang ahli ekonomi dari Amerika Latin, menyatakan bahwa orang yang terjebak di sektor informal adalah karena tiadanya pilihan yang bisa diambilnya untuk bekerja di sektor formal. Dia menyatakan bahwa 'jika dalam suatu negara tidak ada kerja informal, maka yang dipunyai adalah kerusuhan di jalan-jalan'.

lakangi kerja tersebut, serta penilaian sosial yang diberikan terhadap pekerjaan tersebut. Kerja upahan dianggap sebagai kerja yang produktif; pendapat ini didasarkan adanya pandangan bahwa uang merupakan ukuran atas bernilai/berarti tidaknya suatu kegiatan. Dalam masyarakat yang berpendapat seperti ini, kerja perempuan sering kali dianggap tidak tampak, karena keterlibatan perempuan sering kali berada dalam pekerjaan yang tidak membawa upah sebagai hasil kerjanya.

Meskipun memiliki waktu kerja dan beban kerja yang sama, kerja perempuan dan kerja laki-laki mempunyai makna sosial yang berbeda. Makna kerja tersebut dipertajam oleh tiga pertanyaan seperti, siapa yang mengorganisasikan kerja, siapa yang melakukannya, dan bagaimana kerja tersebut dihargai. Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut, makna sosial dari kerja juga dipertajam lagi oleh konteks gender, etnisitas, dan usia kerja. Kerja yang dilakukan oleh anak berbeda maknanya dengan kerja yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, persoalan kerja juga dipengaruhi oleh konteks di mana kerja itu dilakukan. Di Afganistan, misalnya, pemerintah lebih memperbolehkan anak laki-laki bekerja dan melarang perempuan dewasa bekerja. Perbedaan makna kerja sangat dipengaruhi oleh relasi sosial dalam masyarakat, namun dalam sistem dominan yang sedang berlangsung, makna sosial kerja ditentukan juga oleh pemilik alat produksi yang mengabaikan kerja reproduksi yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga.

Bervariasinya jenis kerja dan makna kerja secara sosial juga memisahkan objek-objek pelaku kerja tersebut. Buruh, misalnya, sebagai tenaga produksi ia juga merupakan konsumen dari beberapa barang hasil produksi. Artinya buruh tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan identitas semata. Ketika buruh mempunyai kepentingan jamak sebagai buruh maupun konsumen, aktivitas mereka sebagai konsumen kemungkinan membunuh status mereka sebagai pekerja bayaran. Hal ini juga dapat menjadi salah satu hal yang memperlemah solidaritas di antara buruh upahan. Terpisahnya faktor kepentingan dan identitas membuat rakyat pekerja sulit untuk membangun satu identitas untuk merespons masalah seperti upah. Dalam situasi seperti ini amatlah tidak beralasan untuk mengharapkan (seperti harapan Marx) bahwa buruh akan mengadopsi identitas kelas yang tunggal. Selain identitas sebagai buruh dan konsumen, buruh dalam

komuniti juga menghadapi berbagai masalah hidup yang menciptakan identitas lagi bagi dirinya sebagai strategi bertahan (Resmi Setia, 2005). Artinya, selain terdiferensiasi antara kerja laki-laki dan perempuan, buruh upahan sebagai buruh formal juga mengalami perpecahan identitas dalam dirinya sendiri. Beragamnya identitas dan kepentingan bersama di kalangan kaum buruh menjadi pertanyaan, "Bagaimana buruh bisa mengorganisasi diri untuk merespons masalah yang merupakan kepentingan bersama?"

Untuk mengerti bagaimana buruh merespons masalah-masalah bersama, kita perlu menganalisis perubahan secara keseluruhan sehingga dapat melihat kerja dalam skala yang lebih luas. Persoalan kerja dan upah sudah menjadi persoalan yang krusial dibahas dalam gerakan buruh. Hal ini mengingat isu-isu yang berkaitan dengan upah hampir selalu bisa menyatukan kepentingan di antara buruh upahan. Namun sayangnya, isu ini tidak bisa menarik buruh non-upahan untuk menyatukan diri. Salah satu jenis kerja yang juga dibahas secara khusus dalam bab-bab akhir oleh penulis ialah persoalan kerja rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan. Bila melihat konsep kerja dalam skala yang lebih luas, makna upah menjadi konsep yang perlu dipertanyakan. Bagaimana menjawab masalah-masalah kerja rumah tangga yang tidak diupah? Untuk itu, gerakan buruh pun memperluas arena kerjanya untuk tidak lagi berhadapan dengan perusahaan sebagai pemberi upah, namun juga menuntut negara untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat melindungi dan mensejahterakan pekerja-pekerja non-upahan. Dari sinilah sebuah transisi gerakan sosial yang tadinya hanya didominasi buruh mulai berubah.

Selama ini studi tentang formasi kelas dan transisi sosial selalu dipelajari dalam tataran yang bersifat umum tanpa melihat pada rumah tangga dan sektor informal. Kerja rumah tangga mempunyai kaitan yang saling memiliki ketergantungan dengan kerja upahan. Laki-laki, misalnya, bisa dengan leluasa menjadi buruh upahan dan mempunyai produktivitas tinggi ketika ditopang oleh kerja rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan, baik itu istri atau pun ibu. Rumah tangga menjadi hal yang menghubungkan relasi formal dan informal, antara global dan lokal, antara dominan dan subordinat, dan antara laki-laki dan perempuan pekerja. Kenyataannya saat ini adalah banyak perempuan yang sudah keluar dari rumah tangga dan bekerja seba-

gai buruh upahan. Oleh karenanya, gerakan buruh saat ini juga banyak melibatkan perempuan sebagai aktor. Banyaknya angkatan kerja perempuan yang diserap industri membuat jumlah buruh perempuan saat ini, terurtama di dunia ketiga, lebih besar dari angkatan kerja laki-laki, terutama di sektor-sektor industri tertentu. Meskipun kerja upahan saat ini telah banyak dilakukan perempuan, stigma akan tanggung jawab kerja rumah tangga yang harus diemban perempuan belumlah hilang sepenuhnya.

Dengan perubahan kerja, makna kerja, dan relasi gender, gerakan sosial baru membawa isu mengenai adanya upah untuk semua jenis kerja. Gerakan sosial ini meminta negara untuk menyusun kebijakan untuk mendukung keluarga. Setelah melahirkan gerakan baru yang selama ini bertumpu pada gerakan buruh upahan, gerakan ini juga telah meluas menjadi gerakan perempuan dan gerakan-gerakan lain yang berjuang untuk mencapai kesejahteraan. Pada saat ini kita dapat melihat bahwa gerakan protes telah melibatkan tidak hanya buruh upahan namun juga buruh non-upahan dengan isu gender sebagai pengikatnya.

Buruh dan rakyat pekerja umumnya melihat negara dengan cara yang berbeda. Mereka melihat bahwa negara seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatur relasi antara pengusaha dan buruh. Kelompok revolusioner berusaha menggulingkan negara dengan cara kekerasan sementara kelompok reformis berusaha untuk memenangkan kekuasaan melalui proses elektoral. Memiliki kekuasaan baik dengan kekerasan maupun cara damai masih merupakan tujuan politik dari banyak gerakan buruh. Namun, dalam praktik yang berlangsung saat ini, banyak gerakan buruh tidak berusaha untuk menguasai negara, namun lebih mendorong negara untuk membuat kebijakan adil. Negara merupakan institusi dari sistem kapitalis dunia, maka negara mempunyai banyak keterbatasan untuk mempromosikan kesetaraan, meredistribusi sumber daya, dan menjaga keadilan. Negara, baik di wilayah industri inti, periferi, maupun semi-periferi, tidak hanya memotong dan mengurangi keuntungan dari buruh, namun juga memindahkan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke institusi formal dan informal lainnya di masyarakat. Otoritas pemerintahan tingkat lokal dan NGO menjadi salah satu agen formal dari negara. Kecenderungan lain saat ini adalah pemerintahan pusat juga memindahkan konflik yang seharus-

nya terjadi antara negara dengan rakyat menjadi konflik horisontal.[3] Di negara-negara periferi dan semi-periferi, otoritas negara lebih berkurang lagi. Banyak pemerintahan di negara-negara ini telah memindahkan kekuasaannya pada NGO, organisasi bantuan internasional, agen PBB, dan organisasi pejaga pedamaian. Di beberapa negara seperti Somalia yang kondisi negaranya sudah sangat lemah, NGO menggantikan peran negara sebagai institusi. Kalau kita melihat Indonesia, terutama Aceh pasca-Tsunami, kondisi ini tidak jauh berbeda. Saat ini di Aceh peran negara sangat sedikit, kalau tidak bisa dikatakan tidak terlihat; yang banyak melakukan perbaikan di sana adalah kalangan NGO dan donor internasional.

Pada akhirnya, sesuai dengan kondisi dunia yang berubah, buruh dengan cepat mengorganisasi kebutuhannya untuk bertahan. Meluasnya gerakan buruh menjadi gerakan perempuan, gerakan mencari keadilan, dan gerakan demokrasi telah membuka ruang protes yang luas dan melibatkan banyak institusi lain di luar serikat buruh. Kerja non-upahan yang dilakukan di rumah dan di jalanan, kerja subsisten yang dilakukan di rumah, dan berbagi kerja dengan yang lain membuat buruh tetap bertahan sebagai sebuah kelompok. Sumbangan mereka dalam membuka ruang ekonomi dan ruang politik di mana buruh bisa mengorganisasikan diri secara independen digambarkan sebagai *diversifying movements*. Partisipasi dalam aksi gerakan bukan hanya mengkonstruksi teori tetapi juga merupakan cara belajar yang terbaik untuk membangun masyarakat yang lebih adil di masa depan. Saat ini gerakan buruh telah bergerak jauh dengan isu-isu yang tidak terbatas mengacu pada perbaikan upah. Gerakannya telah melibatkan isu-isu yang dihadapi kelompok-kelompok lain seperti, kondisi kerja rumahan, kesetaraan gender, etnis dan usia, jaminan kesehatan, kesehatan lingkungan, kualitas pendidikan yang baik, keamanan demokrasi dan politik, dan partisipasi demokratis dalam badan pemerintahan. Oleh karena itu, sudah saatnya juga gerakan buruh keluar dari konsep perjuangan sektoral yang hanya melibatkan buruh dan bersama-sama dengan gerakan lainnya membangun kekuatan bersama untuk membangun masyarakat di masa depan.

3 Di Indonesia misalnya, kebijakan Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM secara nyata telah memindahkan konflik dari negara vs rakyat menjadi konflik horisontal di antara anggota masyarakat sendiri. (Kompas, 21 Oktober 2005)

Buku ini bertutur secara lugas mengenai konsep dan makna kerja, persoalan gender, dan protes sosial yang telah berkembang sedemikian rupa sejalan dengan perubahan dunia. Dari sini kita dapat melihat bahwa perkembangan gerakan sosial tidaklah lepas dari relasi gender yang terjadi. Meluasnya agenda dan isu dari gerakan sosial sangatlah dipengaruhi oleh masuknya isu perempuan dalam gerakan sosial. Gerakan sosial tradisional yang tadinya hanya melibatkan buruh upahan sebagai aktor gerakan telah meluas dengan melibatkan elemen masyarakat lain ketika melihat makna kerja secara lebih luas.

Buku yang ditulis berdasarkan penelitian dan pengamatan selama lima tahun di negara-negara inti, semi-periferi, dan periferi ini telah menggambarkan bahwa sebuah proses sosial yang berlangsung di negara inti akan mempengaruhi relasi dan formasi sosial di negara-negara semi periferi dan periferi. Meskipun mungkin prosesnya berjalan berbeda atau konteks sosial negara tersebut berbeda, hubungan saling mempengaruhi di antaranya tetap ada.

Dalam konteks Indonesia, membaca buku ini membuat kita bisa melihat lagi peran negara dan kondisi pekerja informal kita. Peran negara sebagai pemegang otoritas atas rakyatnya, kian hari kian melemah, terlindas oleh kepentingan sistem dominan yang berlangsung. Negara menjadi 'impoten' di tengah kepentingan dunia internasional terhadap pasar dan tenaga kerja Indonesia. Sebagai bagian dan agen dari kepentingan kapitalis internasional, pemerintah hanya bertindak menjadi pengatur berjalannya sebuah sistem kapital. Pemerintah tidak lagi menjadi simbol penguasa, karenanya masalah-masalah yang harusnya menghadapkan rakyat dengan negara seperti kasus pencabutan subsidi BBM telah dipindahkan konfliknya menjadi rakyat *vis a vis* otoritas lokal, di mana pemerintah menghindari konflik masif dengan rakyat.

Dalam konteks ini, gerakan buruh masih berada dalam posisi yang lemah karena buruh yang terorgani-sasi masih sangat sedikit dan kurang menggalang kekuatan. Bila tercerai-berainya gerakan buruh dalam buku ini lebih didasarkan perbedaan paradigma mereka dalam melihat negara atau kekuasaan, dalam konteks Indonesia, perdebatannya lebih kompleks. Bermacam-macam kepentingan dan eksistensi kelompok buruh menjadi faktor tidak bisa bersatunya serikat buruh untuk merespons hal-hal yang menjadi permasalahan bersama.

JURNAL ANALISIS SOSIAL YANG TELAH TERBIT

Vol. 10 No.1 Juni 2005
Perdebatan Konseptual tentang Kaum Marginal
(Harga Rp. 20.000,-)

Vol. 9 No. 3 Desember 2004
Demokratisasi Akar Rumput: Gagasan dan Praktik
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 9 No. 2 Agustus 2004
Usaha Kecil dan Masa Depan Perekonomian Indonesia
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 9 No. 1 April 2004
Pembaruan Agraria: Antara Negara dan Pasar
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 8 No. 3 Desember 2003
Antara Informalisasi, Jaminan Sosial, dan Pengorganisasian Buruh
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 8 No. 2 Oktober 2003
Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 8 No. 1 Februari 2003
Pasar yang Adil bagi Usaha Kecil
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 7 No. 3 Desember 2002
Menegaskan Kembali Konteks Pembaruan Agraria
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 7 No. 2 Juni 2002
Demokrasi dan Kemiskinan: Kesempatan atau Kesempatan?
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 7 No. 1 Februari 2002
Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: Peluang dan Tantangan bagi Serikat Buruh
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 6 No. 3 Desember 2001
Lembaga Keuangan Mikro dalam Wacana dan Fakta: Perlukah Pengaturan?
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 6 No. 2 Juli 2001
Sumber Daya Agraria: Dimensi Pengelolaan dan Tantangan Kelembagaan
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 6 No. 1 Februari 2001
Perempuan: Dalam Transisi Demokrasi dan Globalisasi
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 5 No. 1 Januari 2000
Lampu Kuning Desentralisasi
(*Harga Rp. 10.000,-*)

Vol. 4 No. 2 Mei 1999
Situasi Krisis: Titik Balik Kekuatan Buruh?
(*Harga Rp. 10.000,-*)

Vol. 4 No. 1 Januari 1999
Usaha Kecil pada Masa Krisis Mampukah Bangkit?
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-6 (1997)
Pungutan dan Usaha Kecil
(*Harga Rp. 4.000,-*)

Ed-5 (1997)
Pekerja Anak dan Anak Jalanan Versus Konvensi Hak Anak
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-4 (1996)
Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-3 (1996)
Tanah: Komoditas Strategis
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-2 (1996)
Tantangan Globalisasi: Mampukah Usaha Rakyat Menjadi Aktor Utama dalam Perekonomian Nasional
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-1 (1995)
Buruh dan Krisis Hubungan Industrial
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)